



JURNAL MAJELIS

Media Aspirasi Konstitusi

AKTUALISASI PANCASILA BAGI GENERASI MILENIAL

Badan Pengkajian MPR RI

2019

Susunan Dewan Redaksi

Penasehat : Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E., M.M.
Dr. Mahyudin, S.T., M.M.
E.E. Mangindaan, S.IP.
Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A.
Dr. (H.C.) Oesman Sapta Odang
Dr. Ahmad Basarah, M.H.
H. Ahmad Muzani
Dr. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.

Pengarah : Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS
Prof. Dr. Hendrawan Supratikno
Rambe Kamarul Zaman, M.Sc., M.M.
Martin Hutabarat, S.H.
Ir. Tifatul Sembiring

Penanggung Jawab : Dr. Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H.

Wakil Penanggung Jawab : Dra. Selfi Zaini

Pemimpin Redaksi : Drs. Yana Indrawan, M.Si.

Redaktur Pelaksana : Tommy Andana, S.IP, M.AP.
Drs. Joni Jondriman

Editor : Siti Aminah; Pradita Devis Dukarno; Otto Trengginas Setiawan.

Pengumpul Bahan : Endang Sapari; Endang Ita; Rindra Budi Priyatmo; Dian Kartika Sari; Widhi Aditia Putra; Wafistrietman Corris; Elias Petege; Indra Ardianto; Wasinton Saragih;

Alamat Redaksi

Biro Pengkajian, Sekretariat Jenderal MPR RI

Gedung Bharana Graha, Lantai 3,

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6 Jakarta 10270

Telp. (021) 57895421, Fax: (021) 57895420

E-mail : biro.pengkajian@setjen.mpr.go.id / biro.pengkajian@gmail.com

DAFTAR ISI

	Hal
Daftar Isi	I
Pengantar	III
Sepatah Kata	VII
Sambutan	IX
Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Penguatan Pendidikan Karakter Generasi Milenial Pada Satuan Pendidikan Formal - Rahmat	1
Aktualisasi Pancasila Bagi Generasi Milenial Melalui Revitalisasi PKn Sebagai Pendidikan Karakter Pancasila - Suwarma Al Muchtar	21
Membentuk Generasi Muda Millenials Berkarakter Pancasila Di Era Revolusi Industri 4.0 - Cecep Darmawan	39
Transformasi Nilai-Nilai Kebangsaan Kepada Generasi Muda Indonesia Pada Era Digital - Dasim Budimansyah	51
Aktualisasi Pancasila Bagi Generasi Milenial - Endang Danial. Ar	79
Aktualisasi Cinta Tanah Air: Apa Yang Membuat Kaum Milenial Bangga Berbangsa Indonesia? - Karim Suryadi	89
Aktualisasi Pendidikan Pancasila Di Sekolah Bagi "Generasi Z" Melalui Habitiasi - Kokom Komalasari	97
Pemberdayaan Generasi Milenial Dalam Rangka Aktualisasi Pancasila - Syaifullah	109
Aktualisasi Pancasila Bagi Generasi Milenial - Idrus Affandi	123
Membangun Kesadaran Warganegara Milenial Dalam Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Pancasila - Dadang Sundawa	131
Daftar Penulis	140

Pengantar

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Jurnal Majelis dengan pokok bahasan “Aktualisasi Pancasila Bagi Generasi Milenial” dapat diselesaikan tepat waktu. Jurnal ini berisikan hasil penelitian yang dilakukan oleh pakar dan akademisi dari berbagai kalangan. Penelitian salah satu bentuk upaya dalam rangka memasyarakatkan sekaligus pengkajian sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan MPR yakni Badan Pengkajian MPR.

Artikel dengan tema “Aktualisasi Pancasila Bagi Generasi Milenial” merupakan salah satu varian, dalam rangka mengemban amanah tugas MPR sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yaitu (a) memasyarakatkan Ketetapan MPR, (b) memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, (c) mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya, dan (d) menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kumpulan tulisan ini merupakan hasil penelitian dan yang dikaji bersama dengan Pimpinan dan Anggota Badan Pengkajian dalam rangka memperkaya materi kajian tentang penataan sistem ketatanegaraan melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sedang disusun oleh Badan Pengkajian MPR. Secara simultan, kajian difokuskan pada upaya-upaya melakukan penataan konstitusi agar sesuai dengan tuntutan, kebutuhan, peluang dan tantangan zaman. Dalam jurnal ini memuat pendapat dan pemikiran dari:

Pertama, Rahmat, dengan judul tulisan “*Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila melalui Penguatan Pendidikan Karakter Generasi Milenial pada Satuan Pendidikan Formal*”. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjabarkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila melalui penguatan pendidikan karakter yang merupakan suatu gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan sebagai bentuk upaya memperkuat karakter warga negara (generasi milenial) yang didasarkan pada pengaktualisasian nilai-nilai luhur Pancasila sebagai bagian dari gerakan revolusi mental sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal.

Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila

melalui pendidikan karakter berbanding lurus dengan penguatan karakter jati diri bangsa dan berimplikasi terhadap pembentukan pengamalan nilai normatif konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mampu menjadi faktor filtrasi terhadap pengaruh negatif globalisasi. Hal ini menjadi inti penguatan pendidikan karakter sebagai sarana strategis dalam upaya mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang Pancasila-lis dalam mewujudkan warga negara yang baik dan cerdas (*smart and good citizenship*) terutama bagi generasi milenial sebagai subjek yang paling rentan terhadap pengaruh negatif dari berbagai paham ideologi, karena generasi milenial sudah sangat akrab dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi.

Penguatan pendidikan karakter bagi generasi milenial menjadi salah satu upaya progresif dalam mempertahankan dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila agar tidak terkikis dan kehilangan jati diri bangsa. Pancasila sebagai dasar filsafat atau *core philosophy* mengandung *local genius* sekaligus *local wisdom* bangsa Indonesia merupakan buah hasil pemikiran para pendiri negara yang kemudian disepakati sebagai suatu konsensus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila adalah sekumpulan nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai sosial budaya dan nilai-nilai religius bangsa Indonesia yang terkristalisasi dalam Pancasila yang mencerminkan karakteristik bangsa Indonesia.

Kedua, Suwarma Al Muchtar, dengan judul tulisan "*Aktualisasi Pancasila Bagi Generasi Milenial Melalui Revitalisasi Pkn Sebagai Pendidikan Karakter Pancasila*". Penulis menuturkan bahwa Perubahan sosial budaya dalam era global yang dipicu dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan generasi milenial, fenomena demografik ini membawa dampak terhadap perubahan nilai sosial budaya. Perubahan ini menumbuhkan tantangan terhadap tatanan sistem sosial termasuk dalam bidang pendidikan. Dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan kualitas aktualisasi Pancasila bagi generasi milenial perlu diawali dengan memperkuat pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter Pancasila" supaya warganegara milenial menjadi warga negara Pancasila memiliki kecerdasan berideologi Pancasila sebagai dasar dalam menjalani kehidupan milenial. Tulisan ini melakukan kajian mengapa aktualisasi Pancasila bagi generasi milenial perlu melalui revitalisasi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter Pancasila dengan pendekatan pengintegrasian konsep, Nilai Pancasila, kenegaraan, kewarganegaraan, teknologi dan pembelajaran, bagi generasi milenial

Ketiga, Cecep Darmawan, dengan judul tulisan "*Membentuk Generasi Muda Millennial Berkarakter Pancasila Di Era Revolusi Industri 4.0*". Artikel ini mendeskripsikan upaya pembentukan generasi muda millennial yang berkarakter Pancasila di era revolusi industri 4.0. Era revolusi industri keempat

antara lain ditandai dengan adanya digitalisasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perkembangan ini mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu pesat. Generasi muda millennial dengan berbagai ikonnya memiliki potensi dan tantangan dalam menghadapi kemajuan Iptek di era ini. Akan tetapi berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di era revolusi industri keempat ini, justru menimbulkan kekhawatiran pada sikap, mental, dan perilaku generasi muda millennials. Untuk itu perlu adanya upaya untuk membentuk generasi muda millennials yang berkarakter Pancasila di era revolusi industri 4.0. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui tiga jalur utama yakni, keluarga, peer group (komunitas) dan pendidikan sekolah formal (baik secara kurikuler, co-kurikuler, maupun ekstrakurikuler).

Keempat, Dasim Budimansyah, dengan judul tulisan "*Transformasi Nilai-nilai Kebangsaan Kepada Generasi Muda Indonesia Pada Era Digital*". Penulis menjelaskan Merefleksi tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia dapat diambil pelajaran bahwa konsepsi dan cita-cita ideal harus terus dipupuk dan dilestarikan sebagai landasan moralitas bagi kebesaran negara-bangsa. Tantangan terbesar pada era digital adalah bagaimana nilai dan sikap kebangsaan yang telah dicontohkan oleh para pejuang, senantiasa terpatri dalam sanubari setiap anak bangsa. Paling tidak ada dua instrumen yang perlu disiapkan untuk dapat menghadapi tantangan tersebut, yaitu nilai-nilai kebangsaan harus sudah mempribadi pada sanubari manusia Indonesia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan menjadikan Indonesia sebagai pemenang dalam kompetisi global. Strategi yang perlu dipertimbangkan untuk menguasai dua instrumen tersebut adalah: (1) Mewujudkan pelestarian (*preservation*) dan pemajuan (*advancement*) nilai-nilai kebangsaan Indonesia; (2) Mewujudkan proses internalisasi nilai-nilai kebangsaan Indonesia melalui program intervensi sosial politik; (3) Mewujudkan program sosialisasi nilai-nilai kebangsaan Indonesia melalui program kurikuler, gerakan sosial kultural, dan intervensi sosial politik untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkapasitas unggul; dan (4) Mewujudkan pembentukan lembaga nasional yang bertanggung jawab terhadap penyelarasan nilai-nilai kebangsaan Indonesia sebagai bagian dari sistem politik nasional.

Kelima, Endang Danial Ar. dengan judul tulisan "*Aktualisasi Pancasila Bagi Generasi Milenial*". Penulis menjelaskan tentang ada lima teknologi yang menjadi penopang industri 4.0, yaitu AI, internet of things, human-machine interface, teknologi robotik dan sensor, serta teknologi percetakan tiga dimensi (3D). Kesemuanya sudah diaplikasikan dalam berbagai kepentingan dan secara kontributif berpengaruh terhadap perilaku manusia di dunia ini. Perkembangan teknologi dalam kehidupan memunculkan perilaku yang khas seperti generasi milenial yang menurut para ahli lahir antara tahun 1980-2000 yang sekarang masa-masa produktif mereka. Karakteristik mereka ini unik seiring dengan masa pembelajaran mereka dipenuhi dengan media sosial berbasis web R.I

4.0. Termasuk karakteristik kebangsaan remaja milenial yang sekarang duduk dibangku SMA. Aktualisasi nilai-nilai kebangsaan berbasis Pancasila dan UUD 1945 dalam keseharian mereka bersama teman, keluarga, sekolah, dan kehidupan kenegaraan mereka seringkali memberikan kesan yang aneh, sehingga dianggap nilai kebangsaan mereka menurun atau erosi nilai. Padahal menurut para ahli perwujudan mereka tentang nilai kebangsaan sesuai dengan zamannya, berbeda dengan pandangan nilai-nilai kebangsaan orang tua pada zamannya. Terjadi pergeseran paradigma antara nilai-nilai kebangsaan remaja yang dianggap oleh kalangan orang tua sudah tergerus nilai-nilai hedonisme/vandalisme. Padahal gaya mereka dengan gaya orang tua dalam mengaktualisasikan dalam kehidupan mereka berbeda.

Keenam, Karim Suryadi, dengan judul artikel "*Aktualisasi Cinta Tanah Air: Apa yang Membuat Kaum Milenial Bangga Berbangsa Indonesia?*". Penulis menjelaskan tentang kaum milenial bisa disebut anak peradaban serba internet (*internet of things*). Mereka tumbuh dan berkembang di kampung-kampung yang terkoneksi secara global, dikelilingi mesin pintar, dan dimanjakan oleh berbagai media baru. Mereka umumnya anak-anak muda kreatif, melek teknologi, dan memiliki rasa ingin tahu yang kuat. Sayangnya, mereka cenderung malas bergerak dan gemar menempuh jalan pintas (*short cut*), dan kurang menghargai proses. Penulis menjelaskan tentang pasang surut rasa cinta tanah air kaum milenial baik karena aktivitasnya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi maupun refleksinya tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk kepentingan ini, telah dilakukan jajak pendapat kepada 225 orang mahasiswa yang lahir antara 1996 dan 1999. Kepada mereka diajukan pertanyaan terbuka tentang contoh-contoh tindakan yang paling mencerminkan rasa cinta tanah air, paling bertentangan dengan rasa cinta tanah air, tindakan yang dapat memupuk rasa cinta tanah air, kelakuan yang dapat mengikis rasa cinta tanah air, serta hal-hal yang dapat membuat bangga dan hal-hal yang dinilai dapat merusak rasa bangga sebagai Bangsa Indonesia.

Ketujuh, Kokom Komalasari, dengan judul tulisan, "*Aktualisasi Pendidikan Pancasila di Sekolah Bagi Generasi Z Melalui Habitiasi*". Artikel ini mengkaji tentang peserta didik di persekolahan merupakan "Generasi Z atau Generasi Net" yang lahir dan menjalani kehidupan di era digital dengan karakteristik tersendiri yaitu memiliki ambisi besar untuk sukses, berperilaku instan, cinta kebebasan, percaya diri, menyukai hal yang detail, keinginan untuk mendapatkan pengakuan, digital dan teknologi informasi. Di sisi lain "Generasi Z" ini menghadapi masalah degradasi nilai, moral, dan norma Pancasila yang diakibatkan arus informasi tanpa batas (*borderless*) semakin membuka masuknya pengaruh kuat ideologi lain. Oleh karena itu perlu aktualisasi Pendidikan Pancasila di sekolah melalui pendekatan habitiasi, sehingga mampu memberikan pemahaman, internalisasi, dan penerapan Pancasila (*in action*) bagi "Generasi Z". Proses habitiasi dilaksanakan melalui langkah-langkah: 1) pengembangan nilai-nilai Pancasila;

2) nilai Pancasila dan perilaku yang diharapkan didefinisikan dan dirumuskan secara jelas; 3) Perilaku yang diharapkan sesuai nilai Pancasila dituangkan dalam tata tertib sekolah; 4) Perilaku sesuai nilai Pancasila dibelajarkan dalam konteks sesungguhnya; 5) Perilaku yang sudah sesuai dengan harapan dihargai secara teratur; dan 6) Perilaku yang menyimpang dikoreksi secara proaktif dan dengan prosedur yang jelas. Dalam Pelaksanaan habituasi nilai-nilai Pancasila perlu ditegakkan prinsip keteladanan, penghargaan, sanksi yang tepat, dan teguran.

Kedelapan, Syaifullah, berjudul "*Pemberdayaan Generasi Milenial Dalam Rangka Aktualisasi Pancasila*". Penulis menjelaskan bahwa generasi milenial sebagai bagian dari Generasi muda memiliki peran sangat penting dalam perjalanan bangsa saat ini, dan tentu saja bagi masa depan bangsa. Hal ini hanya akan dapat dimanifestasikan dengan baik manakala generasi milenial memiliki kompetensi yang memadai, baik menyangkut pengetahuan (*knowledge*), sikap (*disposition*), dan keterampilan (*skill*). Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, sudah barang tentu harus diaktualisasikan nilai-nilai fundamentalnya dalam konteks kehidupan sehari-hari, tidak terkecuali oleh generasi milenial.

Disadari bahwa aktualisasi Pancasila bagi generasi milenial tidaklah mudah, karena dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan, baik secara internal maupun eksternal terutama hegemoni globalisasi dewasa ini. Kendatipun demikian, dengan sejumlah potensi yang dimiliki generasi milenial, sangat memungkinkan untuk dapat menghadapi berbagai tantangan tersebut secara komprehensif. Terlebih manakala dukungan yang kuat diberikan oleh pihak keluarga sebagai institusi pertama dan utama, juga oleh segenap komponen masyarakat, dalam proses pendidikan dan pembinaan generasi milenial, maka tantangan yang dihadapi akan mampu disikapi secara positif sehingga menjadi potensi kekuatan. Dengan begitu, generasi milenial akan mampu mengaktualisasikan Pancasila dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Kesembilan, Idrus Afandi, dengan judul tulisan "*Aktualisasi Pancasila Bagi Generasi Milenial*". Menurut penulis banyak keunggulan yang dimiliki oleh generasi milenial, terutama kemampuannya dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi sebagai piranti yang dapat mempermudah dalam kegiatan sehari-hari. Sebaliknya, secara jujur harus diakui pula bahwa ada kelemahan mendasar yang dimiliki generasi milenial, yakni potensi dalam pemanfaatan teknologi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Padahal Pancasila merupakan dasar negara yang harus menjadi landasan etika dan moral seluruh masyarakat, tidak terkecuali bagi generasi milenial.

Aktualisasi Pancasila oleh generasi milenial sangat penting agar generasi milenial tidak kehilangan jatidirinya sebagai bangsa Indonesia. Generasi milenial dalam mengaktualisasikan Pancasila harus didasari oleh landasan filosofis, yuridis, historis, dan sosiologis.

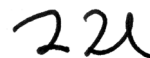
Sesuai dengan kompetensi atau kemampuan yang melekat pada diri generasi milenial, maka berbagai perwujudan aktualisasi Pancasila harus terus didorong oleh semua komponen masyarakat. Apapun bentuk aktualisasi tersebut, sepanjang positif dan konstruktif harus diapresiasi secara proporsional, agar generasi milenial merasa tertantang untuk terus memberikan kiprahnya untuk mendukung terwujudnya kemajuan bangsa Indonesia.

Kesepuluh, Dadang Sundawa, dengan judul tulisan *“Membangun Kesadaran Warganegara Milenial Dalam Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Pancasila”*. Penulis menjelaskan bahwa permasalahan yang muncuk kepermukaan dalam upaya mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila bagi warganegara muda di antaranya adanya berbagai krisis, seperti semakin marak perkembangan media sosial; krisis ketauladanan; krisis identitas; krisis kesadaran ideology; krisis ketauladanan dan krisis hukum. Permasalahan tersebut harus bisa diatasi dengan berbagai kegiatan sosialisasi untuk menanamkan atau mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial.

Generasi milenial adalah generasi yang gemar menggunakan berbagai teknologi dan media sosial. Oleh karena itu kegiatan sosialisasi yang dirasakan efektif adalah sosialisasi melalui media sosial. Oleh karena itulah, ada kebijanya bila pemerintah mengisi konten-konten media sosial dengan hal-hal yang berkaitan dengan aktualisasi nilai-nilai Pancasila pada warganegara milenial, dengan harapan mereka kelak akan menjadi generasi emas yang dapat menjadi warganegara milenial yang berakhlak mulia, bermoral, bertetika, berbudaya dan beradab berdasarkan Pancasila.

Atas segala kekurangan yang hadir dalam penyusunan jurnal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis atas partisipasi dan kesediaanya menyampaikan tulisan serta memberikan izin untuk dimuat dalam Jurnal Majelis. Harapan kami, semoga jurnal ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya Anggota MPR, kalangan akademisi dan cendekiawan.

Pemimpin Redaksi,



YANA INDRAWAN

Sepatah Kata

Pada tahun 2014, dalam Sidang Akhir Masa Jabatan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2009-2014, telah diputuskan keputusan MPR Nomor 4/MPR/2014 tentang rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2009-2014. Muatan rekomendasi MPR masa jabatan 2009-2014 adalah: (1) Melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tetap berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara dan Kesepakatan Dasar untuk tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem pemerintahan presidensial serta melakukan perubahan dengan cara adendum, (2) Melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan negara, (3) Melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika secara melembaga melalui semua tingkatan pendidikan nasional dalam rangka pembangunan karakter bangsa, (4) Membentuk lembaga kajian yang secara fungsional bertugas mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika serta implementasinya, (5) Mewujudkan akuntabilitas publik lembaga negara dalam melaksanakan tugas konstitusional yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui laporan kinerja pelaksanaan tugas dalam Sidang Tahunan MPR, (6) Melakukan penataan sistem peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara, dan (7) Memperkuat status hukum Ketetapan MPRS dan MPR dalam sistem hukum Indonesia.

Rekomendasi tersebut menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan wewenang dan tugas MPR sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tugasnya, dibentuk alat kelengkapan MPR yaitu Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, dan Badan Penganggaran MPR. Selain alat kelengkapan MPR yang beranggotakan Anggota MPR, MPR juga telah membentuk Lembaga Pengkajian yang keanggotaannya berasal dari pakar ketatanegaraan, anggota MPR yang pernah terlibat langsung secara aktif dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta Ketetapan MPR maupun kajian sistem ketatanegaraan.

Sesuai dengan sifat wewenang dan tugas, wewenang MPR adalah insidental dan dilaksanakan pada waktu tertentu sesuai dengan siklus ketatanegaraan, seperti pelaksanaan sidang untuk pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum. Wewenang lain menunggu mengikuti mekanisme ketatanegaraan apabila hal tersebut terjadi, seperti mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar atau apabila dalam hal melaksanakan tugas dalam rangka proses pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden ataupun dalam hal pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Peran MPR lebih lanjut pada pelaksanaan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yaitu (a) memasyarakatkan Ketetapan MPR, (b) memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, (c) mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya, dan (d) menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, MPR dengan dukungan Sekretariat Jenderal MPR menyusun dan menetapkan program serta rencana kerja untuk menjadikan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila, dan Kedaulatan Rakyat. MPR menetapkan program dan kegiatan dengan fokus pada bidang tugas MPR, baik untuk pelaksanaan pemasyarakatan, pengkajian, maupun penyerapan aspirasi masyarakat. Penerbitan buku Jurnal Majelis yang berisi tentang artikel yang ditulis oleh beberapa pakar dan akademisi dari berbagai kalangan ini merupakan salah satu bentuk upaya dalam rangka memasyarakatkan sekaligus pengkajian sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan MPR yakni Badan Pengkajian MPR.

Artikel dalam bentuk jurnal yang disusun ini memuat tentang bahasan mengenai "Aktualisasi Pancasila Bagi Generasi Milenial". Dalam jurnal ini dibahas antara lain "*Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila melalui Penguatan Pendidikan Karakter Generasi Milenial pada Satuan Pendidikan Formal*"; "*Aktualisasi Pancasila Bagi Generasi Milenial Melalui Revitalisasi Pkn Sebagai Pendidikan Karakter Pancasila*"; "*Membentuk Generasi Muda Millennial Berkarakter Pancasila Di Era Revolusi Industri 4.0*"; "*Transformasi Nilai-nilai Kebangsaan Kepada Generasi Muda Indonesia Pada Era Digital*"; "*Ujaran Kebencian Merusak Kematangan Demokrasi di Indonesia*"; "*Aktualisasi Cinta Tanah Air: Apa yang Membuat Kaum Milenial Bangsa Berbangsa Indonesia?*"; "*Aktualisasi Pendidikan Pancasila di Sekolah Bagi Generasi Z Melalui Habituaasi*"; "*Pemberdayaan Generasi Milenial Dalam Rangka Aktualisasi Pancasila*"; "*Membangun Kesadaran Warganegara Milenial Dalam Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Pancasila*".

Penyusunan jurnal ini didasari dengan semangat untuk memberikan informasi yang mendalam sekaligus membangun pemahaman mengenai materi Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa, dan Negara Dalam UUD NRI Tahun 1945. Artikel yang dimuat berisi tentang informasi dan kajian yang khusus sehingga pembaca dapat memperoleh pandangan yang komprehensif mengenai pokok bahasan yang disampaikan. Dengan penerbitan jurnal ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat yang hendak mengetahui dan melakukan kajian tentang Pancasila. Dengan pengetahuan yang mendalam, seluruh warga masyarakat dapat senantiasa memberikan sumbangsih pemikiran untuk mewujudkan sistem ketatanegaraan. Melalui jurnal ini juga, diharapkan dapat memberikan informasi serta menjadi rujukan yang berharga bagi Anggota MPR dan pihak yang berkepentingan dalam rangka membangun pendapat yang menyeluruh tentang sistem dalam kerangka penataan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sekretaris Jenderal MPR,



Dr. MA'RUF CAHYONO, S.H., M.H.

Sambutan

MPR masa jabatan 2009-2014, telah menyampaikan rekomendasi melalui Keputusan Nomor 4/MPR/2014 untuk menjadi pertimbangan MPR masa jabatan 2014-2019 dalam melakukan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia serta memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu muatan rekomendasi itu adalah: “Melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tetap berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara dan Kesepakatan Dasar untuk tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Penataan sistem bernegara perlu terus menerus dilakukan agar sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mampu menjadi instrumen hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Pengkajian sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya, merupakan suatu kebutuhan dalam rangka melakukan penataan sistem ketatanegaraan, konsepsi konstitusi dan implementasinya agar tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara.

Aspirasi masyarakat dan daerah memiliki nilai yang sangat penting bagi MPR sebagai lembaga demokrasi dan perwakilan yang dituntut responsif terhadap dinamika aspirasi masyarakat dan daerah. Oleh karenanya setiap aspirasi masyarakat dan daerah yang diterima oleh MPR perlu dikelola dan dikaji secara seksama untuk ditindaklanjuti dalam pengambilan kebijakan. Responsifitas MPR dalam mengelola aspirasi masyarakat adalah bagian daripada upaya untuk menegakan kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi.

Melihat urgensi tersebut Badan Pengkajian memilih tema jurnal kali ini dengan judul “Aktualisasi Pancasila Bagi Generasi Milenial”. Menghimpun dan menyusun materi tentang pokok kajian merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh Badan Pengkajian MPR untuk memberikan ruang pemikiran dan gagasan secara akademis dari para pakar, penyelenggara negara, dan praktisi dalam bidang tertentu untuk merumuskan materi sesuai dengan fokus kajian. Tugas Badan Pengkajian termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, dan DPD, dan DPRD menetapkan tugas MPR adalah memasyarakatkan Ketetapan MPR, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika serta mengkaji sistem ketatanegaraan dan menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan tugas tersebut, MPR telah menetapkan berbagai program kegiatan berupa kegiatan sosialisasi, kajian, dan penyelenggaraan aspirasi masyarakat.

Harapannya, dengan terbitnya Jurnal Majelis ini dapat menginspirasi para pembaca untuk berpikir kritis terhadap permasalahan bangsa dan negara yang terjadi serta turut berkontribusi dalam pembenahan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam kesempatan ini, tidak lupa saya mengucapkan terimakasih kepada para akademisi dan peneliti yang telah dengan serius berkontribusi menyumbangkan gagasan pemikirannya dan seluruh pihak yang terkait. Semoga jurnal ini memberikan manfaat.

BADAN PENKAJIAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Ketua,



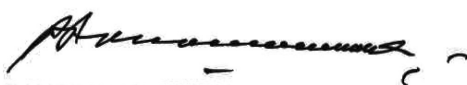
Dr. dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS

Wakil Ketua,



Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO

Wakil Ketua,



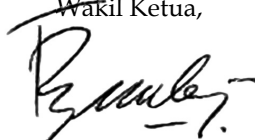
RAMBE KAMARUL ZAMAN, M.Sc., MM

Wakil Ketua,



MARTIN HUTABARAT, S.H.

Wakil Ketua,



Ir. TIFATUL SEMBIRING

AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER GENERASI MILENIAL PADA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Rahmat

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjabarkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila melalui penguatan pendidikan karakter yang merupakan suatu gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan sebagai bentuk upaya memperkuat karakter warga negara (generasi milenial) yang didasarkan pada pengaktualisasian nilai-nilai luhur Pancasila sebagai bagian dari gerakan revolusi mental sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan karakter berbanding lurus dengan penguatan karakter jati diri bangsa dan berimplikasi terhadap pembentukan pengamalan nilai normatif konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mampu menjadi faktor filtrasi terhadap pengaruh negatif globalisasi. Hal ini menjadi inti penguatan pendidikan karakter sebagai sarana strategis dalam upaya mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang Pancasila-lis dalam mewujudkan warga negara yang baik dan cerdas (smart and good citizenship) terutama bagi generasi milenial sebagai subjek yang paling rentan terhadap pengaruh negatif dari berbagai paham ideologi, karena generasi milenial sudah sangat akrab dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Penguatan pendidikan karakter bagi generasi milenial menjadi salah satu upaya progresif dalam mempertahankan dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila agar tidak terkikis dan kehilangan jati diri bangsa. Pancasila sebagai dasar filsafat atau core philosophy mengandung local genius sekaligus local wisdom bangsa Indonesia merupakan buah hasil pemikiran para pendiri negara yang kemudian disepakati sebagai suatu konsensus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila adalah sekumpulan nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai sosial budaya dan nilai-nilai religius bangsa Indonesia yang terkristalisasi dalam Pancasila yang mencerminkan karakteristik bangsa Indonesia.

Keywords : Aktualisasi, Nilai-nilai Pancasila, Penguatan Pendidikan Karakter, Generasi Milenial

PENDAHULUAN

Pengaruh negatif globalisasi telah mengikis nilai-nilai Pancasila yang berkedudukan sebagai pandangan hidup, dasar negara dan ideologi bangsa. Hal ini berimplikasi terhadap terjadinya fenomena dekadensi moral. Hal ini mengisyaratkan bahwa perlunya aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu melalui penguatan pendidikan karakter diyakini dapat mengaktualisasikan kembali nilai-nilai Pancasila. Fenomena dekadensi moral tersebut menjadi masalah serius yang harus segera ditangani secara masif dan berkelanjutan. Perkembangan zaman dan globalisasi diberbagai bidang kehidupan telah memberikan dampak positif dan negatif yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Daradjat (1982) menjelaskan bahwa degradasi moral merupakan implikasi dari perkembangan teknologi yang tidak diimbangi dengan budi pekerti, dan dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya masyarakat khususnya diakibatkan oleh tatanan sosial yang kurang dapat mengendalikan perubahan sosial yang bersifat negatif. Perubahan sosial tersebut adalah salah satu dampak dari globalisasi. Selain itu globalisasi telah memunculkan ideologi Neo seperti neo-liberalisme, neo kapitalisme dan lain-lain. Hal ini tentu dapat mempengaruhi implementasi dan kemurnian ideologi negara, serta dapat berpengaruh terhadap pengaplikasian dan kemampuan warga Indonesia

dalam mengaktualisasikan ideologi Pancasila.

Proses globalisasi diberbagai bidang kehidupan telah menciptakan generasi *gadget*, yaitu istilah yang dipakai untuk menandai munculnya generasi milenial. Istilah *gadget* hakikatnya dimaknai sebagai peralatan, namun dalam konteks generasi gadget yang dimaksudkan adalah generasi yang kehidupan sehari-harinya selalu bersinggungan dengan peralatan teknologi informasi (*high-technology*). Peralatan *high-technology* tersebut seolah-olah telah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari kehidupan mereka (Zuhal, 2000; Naisbitt, 2002). Modernisasi globalisasi telah membawa perubahan sosial dan budaya yang sangat cepat dan telah menyentuh perubahan sistem nilai, sehingga mempengaruhi masalah sosial-budaya. Kompleksitas masalah sosial semakin kuat ke arah situasi turbulensi. Perubahan sosial budaya yang diakibatkan oleh revolusi dari globalisasi tersebut telah membawa masyarakat untuk dapat menghadapi perubahan tersebut sebagai bagian dari warga dunia (Malihah, 2015, hlm. 151).

Menyikapi perubahan tersebut, penguatan pendidikan karakter menjadi salah satu upaya progresif dalam mempertahankan dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila agar tidak terkikis dan kehilangan jati diri bangsa. Pendidikan karakter dibangun berdasarkan tiga hal penting, yaitu aspek pengetahuan, perasaan dan perilaku moral, seperti

yang telah diungkapkan Lickona (1992:53), bahwa makna pendidikan karakter sebagai pendidikan yang menitikberatkan pada pembentukan kepribadian melalui *moral knowing, moral feeling, dan moral behavior* yang hasilnya terlihat dalam tindakan nyata seseorang, yaitu tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, dan kerja keras.

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila bagi generasi milenial sangat penting dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan karena generasi milenial menjadi subjek yang paling rentan terhadap pengaruh negatif dari berbagai paham ideologi. Selain itu generasi milenial sudah sangat akrab dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, oleh karena itu diperlukan suatu filtrasi bagi generasi milenial agar dapat menyikapi secara bijaksana pengaruh dari globalisasi dengan berbagai paham ideologi yang menyertainya, salah satunya melalui penguatan pendidikan karakter dalam rangka mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, warga negara Indonesia harus ditanamkan dan memiliki karakteristik nilai-nilai Pancasila, sebab warga negara adalah cerminan karakteristik suatu negara dan memberikan kekhasan yang dapat membedakan karakteristik masyarakat Indonesia dengan masyarakat dunia lainnya.

Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan

Karakter menjelaskan “Penguatan pendidikan karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)”. Penguatan pendidikan karakter berorientasi kepada penanaman nilai-nilai karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam proses pendidikan, baik dalam lingkup pendidikan formal, informal maupun non formal. Dalam hal ini proses penguatan pendidikan karakter tersebut memiliki peran sentral dalam pembentukan karakter peserta didik.

Pendidikan menjadi salah satu pondasi yang harus dibangun dengan baik dalam proses pembangunan negara. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut dibentuklah pendidikan karakter untuk mendukung terselenggaranya pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu pelaksanaan pendidikan disetiap jenjang harus diselenggarakan secara sistematis guna mencapai tujuan pendidikan. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Amanah Undang-Undang tersebut salah satunya dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendidikan karakter dalam setiap ranah mata pelajaran disetiap jenjang persekolahan. Pendidikan karakter dapat menjadi salah satu jawaban dan solusi dari permasalahan-permasalahan bangsa dari serangkaian masalah moralitas dan karakter warga negara yang semakin tidak terkendali dan berada di luar tata nilai serta norma Pancasila. Permasalahan-permasalahan tersebut memunculkan sebuah komitmen bersama dari semua pihak bahwa penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter harus secara masif digerakkan sebagai upaya penanaman nilai-nilai karakter terhadap peserta didik dengan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila baik dalam ruang lingkup sekolah, keluarga maupun masyarakat.

Dalam lingkungan pendidikan sebagai sebuah lembaga terdapat tiga hal penting yang dapat dioptimalkan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi penguatan karakter peserta didik, yaitu pertama melalui proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), kedua proses pembiasaan dalam kegiatan sehari-hari pada lingkungan tersebut, dan yang terakhir ialah dalam proses kegiatan ekstrakurikuler. Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang berorientasi kepada

pembentukan kepribadian dan menitikberatkan pada konteks moral yang meliputi pengetahuan, perasaan, dan perilaku yang outputnya adalah berupa tindakan nyata yang dilakukan seseorang dan mencerminkan karakter kepribadiannya seperti berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, saling menghormati satu sama lain dan pekerja keras (Lickona, 1992, hlm. 53).

Orientasi pembangunan karakter tersebut dielaborasi dengan aspek-aspek pengembangan kompetensi kewarganegaraan. Branson (1998) menyatakan bahwa kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*), meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*), dan watak kewarganegaraan (*civic disposition*). Hal ini didasarkan kepada orientasi pembentukan warga negara *‘to be a good citizenship’* yang memiliki kesadaran terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara, karena kebebasan, hak dan rasionalitas individu manusia diakui ketika individu adalah bagian dari anggota masyarakat politik (Dumont, 1986, hlm. 216).

Pendidikan karakter didefinisikan sebagai upaya yang disengaja untuk mengembangkan nilai-nilai etis dan kinerja universal pada kaum muda (Lickona, Schaps, & Lewis, 2011). Pendidikan karakter dapat diartikan sebagai orientasi penanaman kecerdasan dalam aspek pemikiran, penghayatan, bertindak dan berperilaku yang dilandasi nilai-nilai moral dan norma serta diaplikasikan dalam interaksi dengan

Tuhan, antara sesama dan diri sendiri serta lingkungannya. Implikasi dari hal tersebut adalah bahwa pendidikan karakter tidak cukup hanya dengan mentransfer ilmu pengetahuan, namun memerlukan suatu proses, contoh suri tauladan, pembiasaan dan pembudayaan dalam lingkungan sekolah, keluarga dan juga masyarakat (Maksudin, 2013, hlm. 17).

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter (PPK) di Indonesia saat ini. Indonesia merupakan negara yang berideologi Pancasila, maka dalam konsep pengembangan PPK harus dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila yang merupakan jati diri bangsa. Melalui penguatan pendidikan karakter, nilai-nilai luhur Pancasila dapat teraktualisasikan dalam pembentukan karakter peserta didik dalam upaya membangun manusia Indonesia yang Pancasila yang mencirikan karakter jatidiri bangsa.

PEMBAHASAN

Globalisasi membawa pengaruh besar diberbagai bidang kehidupan, hal ini ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi komunikasi dan informasi. Perkembangan zaman tersebut membawa masyarakat beralih menuju era digital. Kemajuan peradaban dan kecanggihan teknologi,

informasi diberbagai bidang dapat diakses dengan sangat mudah melalui media online seperti internet. Hal ini merupakan salah satu pengaruh dari globalisasi. Pengaruh globalisasi tersebut disamping memiliki banyak sisi positif tapi juga mempunyai sisi negatif yang mengiringinya dan tidak dapat dihindari. Pengaruh negatif ini yang mengikis nilai-nilai sosial budaya Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Subjek yang memiliki potensi paling tinggi terkena dampak negatif globalisasi tersebut adalah generasi milenial yang merupakan generasi yang hidup di era informasi digital dan teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka.

Ali dan Purwandi (2016) menjelaskan bahwa berdasarkan hasil riset yang dirilis oleh Pew Research Center pada tahun 2010 menjelaskan keunikan dari generasi milenial dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya, bahwa hal yang mencolok dari generasi milenial adalah soal penggunaan teknologi dan budaya pop/musik. Kehidupan generasi milenial tidak bisa dilepaskan dari teknologi terutama internet, entertainment/hiburan sudah menjadi kebutuhan pokok bagi generasi ini. Hal ini selaras dengan hasil riset yang dilakukan Alvara Research Center pada survey penggunaan Internet di Indonesia tahun 2015 yang menunjukkan bahwa konsumsi internet generasi Milenial jauh lebih tinggi dibanding dengan genXer (generasi X), terutama

di *younger millennial generation* (15-24 tahun). Komposisi *addicted user* pada generasi milenial lebih besar jika dibanding dengan gen-Xer. Jika kita lihat trend penggunaan internet menurut usia, maka terlihat makin muda usia makin tinggi konsumsi internetnya. Artinya bahwa internet sudah menjadi kebutuhan pokok bagi Generasi Milenial untuk komunikasi dan aktualisasi diri.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa teknologi informasi sudah sangat erat hubungannya dengan generasi milenial dan menjadi bagian dari kebutuhan sehari-hari sebagai kebutuhan primer mereka. Hal inilah yang menyebabkan generasi milenial sangat rentan terhadap pengaruh globalisasi, oleh karena itu dibutuhkan filter bagi generasi milenial dalam memilah dan memilih informasi sehingga tidak terpengaruh dan merusak karakter kepribadian yang belandaskan nilai-nilai sosial budaya bangsa. Perlunya pendidikan, pengawasan dan bimbingan bersama dari berbagai kalangan, baik keluarga sebagai pendidikan pertama dan utama, sekolah dan masyarakat dalam mendidik generasi milenial untuk membangun benteng pertahanan dalam melawan ancaman dan tantangan globalisasi dengan menanamkan nilai-nilai karakter Pancasila sebagai filter terhadap nilai-nilai negatif yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa, dan dapat secara bijak menyikapi, memilah dan memilah nilai-nilai yang dapat diambil.

Menurut Panjaitan dan Prasetya (2017, hlm. 175) ciri dari generasi milenial ini adalah tingkat pendidikan dan pengetahuan yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Terdapat keberagaman dari segi etnik yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Generasi milenial sering dinamai *echo-boomers* atau *millennium generation*. Nama *echo boomers* hadir karena mereka yang termasuk dalam generasi ini adalah generasi yang lahir pada masa perang dunia II. Sedangkan dinamai *millennium generation* karena mereka merasakan perkembangan teknologi dan pergantian tahun millennium.

Ali dan Purwandi (2016) menjelaskan bahwa setelah perang dunia ke 2, kelompok demografis (cohort) dibedakan menjadi 4 generasi yaitu generasi *baby boomer*, generasi X (*Gen-Xer*), generasi milenial dan generasi Z. Generasi baby boomer adalah generasi yang lahir setelah perang dunia kedua (saat ini berusia 51 hingga 70 tahun). Disebut *generasi baby boomer* karena di era tersebut kelahiran bayi sangat tinggi. Generasi X adalah generasi yang lahir pada tahun 1965 hingga 1980 (saat ini berusia 35 hingga 50 tahun). Generasi milenial adalah generasi yang lahir antara tahun 1981-2000, atau yang saat ini berusia 15 tahun hingga 34 tahun. Generasi Milenial (juga dikenal Generasi Y) adalah kelompok demografis setelah Generasi X, sedangkan generasi Z merupakan generasi yang lahir setelah tahun 2000 hingga saat ini. Generasi Milenial merupakan generasi yang unik, dan berbeda dengan dengan generasi lain. Hal ini

banyak dipengaruhi oleh munculnya *smartphone*, meluasnya internet dan munculnya jejaring sosial media (*social media*). Ketiga hal tersebut banyak mempengaruhi pola pikir, nilai-nilai dan perilaku yang dianut. Generasi Milenial adalah generasi yang melek teknologi. Wajah Indonesia tahun 2020 akan sangat ditentukan pertemuan tiga entitas di atas yakni kombinasi antara masyarakat urban, kelas menengah, dan milenial. Merekalah yang akan menjadi pelaku utama sejarah Indonesia di masa mendatang.

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi informasi, budaya lokal semakin terkikis yang diakibatkan oleh globalisasi. Akibat globalisasi tersebut juga memberi pengaruh yang nyata dalam bidang pendidikan sampai masuk ke dalam kebijakan pendidikan yang mempengaruhi praktik pembelajaran (Wang et al, 2011). Latar belakang tersebut menjadi alasan perlunya generasi milenial memiliki filter dari pengaruh negatif globalisasi. Filter tersebut dapat berfungsi sebagai pengendali dalam memilih dan memilih informasi dan nilai-nilai, mana nilai yang bersifat positif dan mana yang bersifat negatif dan tidak memiliki kesesuaian dengan jati diri bangsa Indonesia.

Upaya untuk membangun filtrasi pada generasi milenial tersebut dapat dilakukan melalui penguatan pendidikan karakter yang berlandaskan nilai Pancasila agar generasi milenial memiliki karakter yang kokoh dan kuat. Pendidikan merupakan cara terbaik dalam

pengembangan sumber daya manusia, karena pendidikan merupakan proses humanisasi. Wahana (2015, hlm. 16) menjelaskan pendidikan berfokus pada tiga aspek yaitu pengetahuan, keterampilan, dan pembangunan karakter. Ketiga elemen tersebut pada dasarnya memiliki basis utama yaitu karakter, dan karakter adalah buah dari kebudayaan. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dimaknai bahwa karakter merupakan aspek dasar dalam proses humanisasi yang didukung dengan pengetahuan dan keterampilan. Namun karakter generasi milenial saat ini telah mengalami dekadensi dalam aspek moralitas karena pengaruh dari kemajuan teknologi dan informasi, serta telah membentuk karakteristik yang mencirikan kekhasan karakteristik dari generasi milenial. Panjaitan dan Prasetya (2017, hlm. 175) Karakteristik yang terbentuk pada generasi milenial adalah kecanduan internet, percaya diri dan harga diri tinggi dan lebih terbuka dan bertoleransi terhadap perubahan.

Karakteristik generasi milenial tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh Ali dan Purwandi (2016) dalam tiga aspek yaitu meliputi:

1. Kehidupan Sosial Budaya

Karakteristik generasi milenial dalam kehidupan sosial budayanya telah mengalami pergeseran dikarenakan kemajuan teknologi seperti internet dan *gadget*. Generasi milenial memiliki perilaku dan nilai-nilai unik dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya generasi

milenial muda (*Urban middle-class millennials*), mereka merupakan generasi yang terbuka (*open minded*), individualis dan multikultural sehingga memunculkan budaya-budaya baru seperti budaya selfi, dan menjadikan liburan sebagai suatu kebutuhan dari padatnya pekerjaan, untuk rehat sejenak dari rutinitas pekerjaan, selain itu *gadget* tidak dapat dilepaskan dari tangan dan penglihatan mereka, bahkan ketika mereka berkumpul dengan teman, komunitas dan keluarganya. Hal ini menjadi salah satu penyebab sifat individualis generasi milenial. Implikasi sosial lain adalah makin pudarnya identitas budaya tradisional. Kelompok *urban middle-class millennials* akan mempercepat proses pergeseran ini, apalagi ditambah karakter mereka yang *open minded*, dengan cepat budaya lokal akan tergerus oleh budaya modern.

2. Pekerjaan dan Entrepreneurship

Karakteristik Generasi Milenial terkait ukuran sukses di dunia kerja adalah ketika mereka bisa pindah-pindah kerja dari satu perusahaan ke perusahaan lain, bagi mereka semakin sering pindah berarti mereka termasuk orang yang "laku" di perusahaan. Kelebihan Generasi Milenial di tempat kerja dibanding generasi sebelumnya adalah terkait kemampuan menggunakan teknologi dan adaptasinya, namun Generasi Milenial juga memiliki kelemahan terkait kemampuan pemecahan masalah dan mereka cenderung boros di tempat kerja. Disadari atau tidak

kecenderungan lain dari generasi milenial ini adalah mereka lebih nyaman jika bekerja pada lingkungan yang mampu mengakomodasi kebebasan berekspresi dan berkarya.

3. Kehidupan Keagamaan

Generasi milenial yang merupakan bagian dari masyarakat urban pada dasarnya cenderung pada pendidikan umum dan mengenyampingkan pendidikan agama, walaupun ada sebagian kecil yang telah memadukan antara pendidikan umum dan pendidikan agama namun jumlahnya masih kalah jauh dengan jumlah sekolah umum. Karakteristik generasi milenial atau yang disebut masyarakat *urban middle-class millennials* cenderung memiliki sifat individualis dan menempatkan materi di atas segalanya. Hal ini memungkinkan terjadinya umat beragama seperti umat Islam beralih dari produk Islam kultural menjadi produk islam puritan yang lebih mengusung keberagaman yang cenderung individualis atau bahkan menjadi sekuler dan acuh dengan kehidupan keagamaanya sendiri, karena cenderung lebih cocok dengan karakteristik sifat individualis generasi milenial.

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang memiliki fungsi dan kedudukan lainnya sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara, ideologi bangsa, dan ideologi terbuka menjadi pondasi utama masyarakat Indonesia dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai bagian dari masyarakat dunia. Secara kausalitas

pada dasarnya nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai sosial budaya dan nilai-nilai religious bangsa Indonesia yang telah ada dan berasal dari bangsa Indonesia sendiri, bahkan sebelum disahkannya Pancasila menjadi dasar negara (Maryanto, 2011, hlm. 423). Pancasila sebagai dasar filsafat serta ideologi negara bermakna bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang merupakan sumber nilai dalam realisasi normatif dan praksis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Kaelan, 2007, hlm. 10).

Pancasila sebagai dasar filsafat atau *core philosophy* mengandung *local genius* sekaligus *local wisdom* bangsa Indonesia merupakan buah hasil pemikiran para pendiri negara yang kemudian disepakati sebagai suatu konsensus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Kaelan, 2007; Zabda, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila adalah sekumpulan nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai sosial budaya dan nilai-nilai religius bangsa Indonesia yang terkristalisasi dalam Pancasila yang mencerminkan karakteristik bangsa Indonesia.

Pancasila sering dianggap sebagai penjaga nasional untuk memastikan bahwa setiap warga negara di Indonesia tanpa memandang latar belakang mereka akan diperlakukan sama. Nilai-nilai Pancasila kemudian diterjemahkan ke dalam semboyan resmi nasional, Bhineka Tunggal Ika, secara harfiah berarti Kesatuan dalam Keragaman (Amirrachman, 2012). Pancasila yang mencakup kebudayaan

nasional memiliki nilai-nilai negara kesatuan seperti 'dasar moral negara dan bangsa Indonesia' (Holtzappel, 1997, hlm. 65). Banyak yang melihat bahwa terlepas dari semua nilai yang melekat pada Pancasila, Pancasila dapat menjadi bentuk kontrol (Bubandt, 2014). Hal ini sejalan dengan lima pilar filosofi Pancasila, yang dirancang untuk menyatukan 300 kelompok etnis di negara kepulauan yang sangat luas ini. Mereka termasuk kepercayaan pada satu Tuhan, kemanusiaan, kesatuan Indonesia, demokrasi konsultatif, dan keadilan sosial (Frederick dan Worden, 1993).

Hakikatnya Pancasila adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan saling memiliki keterhubungan antar sila satu dengan sila yang lainnya dalam Pancasila, karena dalam konteks dasar filsafat negara Pancasila adalah suatu sistem nilai yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu (Ngadino, Syahrial, Rahman: 2015). Sistem nilai dalam Pancasila tersebut secara umum terbagi menjadi dua aspek, yaitu 1) nilai dasar adalah nilai yang bersifat abstrak dan normatif, maksudnya isi dari muatan nilai Pancasila belum dapat dioperasionalkan. 2) Nilai instrumental yaitu nilai yang bersifat sebagai penjabaran dari konteks nilai dasar yang bergerak secara operasional dan eksplisit seperti UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan dengan berlandaskan kepada lima nilai dasar Pancasila yang meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan terakhir nilai keadilan.

Melalui penjabaran tersebut maka dapat dibuat dan dijabarkan nilai instrumental tersebut (Budiyono dan Wawan, 2013).

Sehubungan dengan kedua nilai tersebut, Moerdiono (1995) menambahkan bahwa terdapat nilai ketiga yaitu nilai praksis yang merupakan nilai implementatif dari pelaksanaan nilai Pancasila dalam konteks realitas bagaimana melaksanakan ataupun mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Dalam nilai praksis dapat terlihat bagaimana idealisme dan realitas pelaksanaannya di kehidupan sehari-hari (Mulyono dalam Saputra, 2017). Dalam konteks aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal, artinya mengaplikasikan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran di lingkungan pendidikan formal melalui pendidikan karakter sebagai sarana aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam penanaman nilai-nilai karakter yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila pada proses pembentukan kepribadian peserta didik, khususnya generasi milenial dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh peserta didik.

Merujuk kepada makna aktualisasi yaitu pelaksanaan hingga benar-benar ada (terwujud), perwujudannya dan pengejawantahan (Kamarulzaman, Dahlan, 2005, hlm. 23). Dalam konteks aktualisasi nilai-nilai Pancasila berarti merujuk kepada suatu proses

perwujudan secara konkrit tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat tercermin dalam tindakan, sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Darmadi, 2013). Hal ini tentu membutuhkan suatu situasi dan kondisi agar proses penanaman nilai-nilai Pancasila dapat terwujud secara optimal. Salah satu situasi dan kondisi yang strategis adalah dalam lingkungan pendidikan dan mengintegrasikan dengan lingkungan keluarga dan masyarakat dalam realitas konkrit pengaplikasian nilai-nilai Pancasila. Pendidikan karakter tentu menjadi wahana potensial dalam proses penanaman nilai karakter yang berlandaskan Pancasila.

Selama berabad-abad, pendidikan karakter memainkan peran sentral dalam kurikulum (Krisjansson, 2015; Ryan & Bohlin, 1999). Lickona (1991, hlm. 228) menyatakan bahwa "Pendidikan karakter adalah upaya yang disengaja untuk mengembangkan kebajikan yang memungkinkan kita untuk menjalani kehidupan yang memuaskan dan membangun dunia yang lebih baik". Melalui pendidikan karakter tersebut diharapkan nilai-nilai Pancasila yang terkikis dapat teraktualisasikan kembali. Oleh karena itu pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan implementasi pendidikan karakter di persekolahan. Tahun 2010 Mendiknas Mohammad Nuh menyampaikan arahan dalam rapat pimpinan yang menegaskan bahwa pendidikan budaya dan karakter bangsa perlu dimasukkan dalam

kebijakan pembangunan pendidikan nasional. Sebagai tindak lanjut dari arahan tersebut, tahun 2010 lahir kebijakan pendidikan karakter yang dituangkan dalam buku Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025.

Menurut desain induk pembangunan karakter bangsa (2010: 22), karakter individu dijiwai oleh sila-sila Pancasila yang bersumber dari: a) olah hati, antara lain beriman dan bertaqwa, jujur, amanah, adil, tertib, taat aturan, bertanggung jawab, berempati, berani, mengambil resiko, pantang menyerah, rela berkorban, dan berjiwa patriotik; b) olah pikir antara lain cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, produktif, berorientasi ipteks dan reflektif; c) olah raga antara lain: bersih, sehat, sportif, tangguh, andal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, determinatif, kompetitif, ceria, dan gigih; dan d) olah rasa dan karsa antara lain, kemanusiaan, saling menghargai, gotong royong, kebersamaan, ramah, hormat, toleran, nasionalis, peduli, kosmopolit, mengutamakan kepentingan umum, cinta tanah air, bangga menggunakan bahasa dan produk Indonesia, dinamis, kerja keras, dan beretos kerja.

Kebijakan berikutnya program Nawacita sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 pada Buku I halaman 67- 68 yaitu melakukan revolusi karakter bangsa. Sebagai turunan dari kebijakan revolusi mental tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan

Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Dalam Pasal 1 Permendikbud tersebut ditegaskan bahwa penumbuhan budi pekerti (PBP) merupakan kegiatan pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah yang dimulai sejak dari hari pertama sekolah, masa orientasi peserta didik baru untuk jenjang sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan, sampai dengan kelulusan sekolah.

GPBP dimaksudkan untuk menumbuhkan tujuh nilai positif melalui pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan sepanjang waktu, di rumah, sekolah, dan lingkungan. Tujuh pembiasaan tersebut yaitu 1) Internalisasi sikap moral dan spiritual, 2) Semangat kebangsaan dan kebhinnekaan; 3) Interaksi sosial positif antara siswa dengan figur orang dewasa; 4) Interaksi sosial positif antarsiswa; 5) Memelihara lingkungan sekolah; 6) Penghargaan terhadap keunikan potensi siswa untuk dikembangkan.

Pelaksanaan kebijakan GPBP baru dalam tahap sosialisasi dan pelatihan guru dan stake holders sekolah, namun pada tahun 2017 muncul kebijakan pendidikan karakter dengan nama **Penguatan Pendidikan Karakter** (PPK) yang diatur dalam Perpres nomor 87 tahun 2017. Untuk merealisasikan Perpres nomor 87 tahun 2017 tersebut, Kemendikbud mengeluarkan Permendikbud nomor 20 tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal.

Jika mengacu kepada sistem nilai Pancasila, dengan adanya peraturan-peraturan tersebut merupakan bentuk dari nilai instrumental Pancasila yang bersifat sebagai penjabaran dari konteks nilai dasar yang bergerak secara operasional dan eksplisit. Nilai dasar Pancasila tersebut dioperasionalkan ke dalam nilai-nilai karakter yang secara eksplisit tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 yang meliputi nilai-nilai karakter religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab.

Nilai-nilai dasar Pancasila yang meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial tersebut diidentifikasi dan diklasifikasikan ke dalam muatan nilai-nilai Pancasila yang diaktualisasikan dalam pendidikan karakter meliputi 1) nilai-nilai religius, jujur, toleran sebagai aktualisasi sila pertama; 2) disiplin, bekerja keras, kreatif mandiri, demokratis, rasa ingin tahu sebagai aktualisasi sila kedua; 3) semangat kebangsaan, cinta tanah air sebagai aktualisasi sila ke tiga; 4) menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai sebagai aktualisasi sila ke empat; 5) gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungjawab sebagai aktualisasi sila ke lima.

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa nilai-nilai karakter tersebut merupakan perwujudan dari 5 (lima) nilai utama yang saling berkaitan yaitu religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas yang terintegrasi dalam kurikulum. Hal ini berorientasi kepada penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter dalam ruang lingkup satuan pendidikan formal dan dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 bahwa Muatan karakter dalam penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter diimplementasikan melalui kurikulum dan pembiasaan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar atau satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah.

Internalisasi dan penanaman nilai-nilai karakter tersebut yang merupakan pengejawantahan dari nilai dasar Pancasila dilaksanakan melalui pendidikan karakter dalam prosesnya. Hasil atau output dari proses internalisasi dan penanaman nilai-nilai tersebut yang dilakukan di lingkungan satuan pendidikan formal menjadi realitas yang diturunkan dari nilai instrumental ke dalam nilai praksis Pancasila dalam tataran implementasinya dan bagaimana proses pendidikan karakter tersebut diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh peserta didik atau tidak. Ketika nilai dasar diturunkan menjadi nilai instrumental dan sampai pada nilai praksis maka dapat dilihat

aktualisasi nilai-nilai ideal yang ada dengan realitas yang terjadi.

Beberapa studi yang menunjukkan bahwa program pendidikan karakter dapat meningkatkan perilaku siswa, seperti mengurangi intimidasi, konflik dan kekerasan, yang seharusnya memunculkan siswa yang akan lebih simpatik, toleran, baik hati, penyayang, dan pemaaf (Bulach, 2002). Terbukti dengan hasil studi Berkowitz dan Bier (2004, hlm. 79) yang menyatakan pendidikan karakter adalah bentuk pencegahan primer yang efektif. Program pendidikan karakter seperti Proyek Pengembangan Anak telah melaporkan pengurangan signifikan dalam kekerasan dan penggunaan narkoba (Battistich et al. 2000). Studi penelitian White dan Warfa (2011) menemukan bahwa melalui pembelajaran dan penguatan yang tepat, anak-anak secara intrinsik dapat menghargai manajemen diri dan kerja sama sosial.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Jeynes (2019, hlm. 44) menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan secara statistik antara pengajaran pendidikan karakter dan hasil siswa secara keseluruhan. Hasil penelitian menunjukkan keseluruhan variabel pendidikan karakter menghasilkan hasil yang signifikan secara statistik. Sangat menarik juga untuk dicatat bahwa meskipun ada sejumlah studi individu dalam meta-analisis yang tidak menghasilkan hasil yang signifikan secara statistik, semua hubungan secara keseluruhan berada di arah positif.

Mengacu keberhasilan pendidikan di negara lain seperti dinyatakan Lee (2016, hlm. 341) di Taiwan, pendidikan karakter telah berhasil meningkatkan dan mempertahankan berbagai tingkat kinerja akademik/non-akademik untuk anak-anak di semua pengaturan seperti prasekolah, rumah, dan masyarakat umum. Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan karakter sangat penting untuk dilaksanakan, selain itu menjadi sarana paling strategis dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila dilihat dari berbagai hasil penelitian yang telah ada.

Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 menjelaskan terkait dari tujuan penguatan pendidikan karakter yaitu meliputi: "a). membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan; b). mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi Peserta Didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia; dan c). merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK".

Dalam upaya untuk memenuhi tujuan tersebut dalam penyelenggaraan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 dilakukan melalui kegiatan terintegrasi antara kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler, dan dilaksanakan baik di dalam ataupun di luar lingkungan satuan pendidikan formal. Dalam satuan pendidikan formal dilakukan berdasarkan prinsip manajemen yang berbasis sekolah/madrasah dan menjadi tanggung jawab kepala satuan pendidikan formal dan guru.

Sementara itu dalam Permen-dikbud nomor 20 tahun 2018 ditegaskan bahwa PPK dalam pelaksanaannya berorientasi kepada prinsip berikut: 1) berorientasi pada berkembangnya potensi peserta didik secara menyeluruh dan terpadu; 2) keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada masing-masing lingkungan pendidikan; dan 3) berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penyelenggaraan penguatan pendidikan karakternya dioptimalkan dengan fungsi tripusat pendidikan yaitu sekolah, keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka muatan karakter dalam penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter diimplementasikan melalui kurikulum dan pembiasaan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar atau satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah. Hal ini sama

halnya seperti dilakukan di Taiwan, Lee (2016, hlm. 341) menjelaskan pendidikan karakter diintegrasikan ke dalam kurikulum dan kegiatan ekstra kurikuler di sekolah dasar dan menengah untuk memberikan tugas kewarganegaraan dan melahirkan nilai-nilai moral intrinsik. Pendidikan karakter bertujuan untuk memberikan siswa dengan kompas moral internal untuk mengenali yang baik, menginginkan yang baik dan untuk melakukan yang baik

Pelaksanaan penguatan pendidikan karakter telah diatur sedemikian rupa dalam upaya membangun karakter peserta didik yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sehingga menjadi manusia Indonesia yang Pancasila. Penyelenggaraan pendidikan karakter tersebut merupakan bentuk upaya dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila dengan salah satu orientasinya dapat memberikan karakter kepribadian manusia Indonesia, khususnya bagi generasi milenial agar dapat memiliki filtrasi terhadap pengaruh-pengaruh negatif globalisasi. Namun dalam tataran implementatif penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter dalam konteks realitas di lapangan memiliki berbagai hambatan dan tantangan.

Dalam realitas pengajaran pendidikan karakter, merujuk beberapa studi ditemukan beberapa hambatan. Secara teknis, banyak guru idealnya ingin memasukkan pengajaran karakter ke dalam kelas mereka, tetapi secara umum, tidak melakukannya karena dua alasan.

Pertama, mereka merasakan bahwa karena penekanan bahwa sekolah kontemporer menempatkan pada ujian berisiko tinggi, ada kelangkaan waktu yang tersedia untuk mengajar karakter (Jeynes, 2006; Siegal, 2009). Kedua, sebagian besar instruktur sekolah negeri belum cukup terlatih untuk mengajarkan karakter dan, oleh karena itu, guru tidak merasa cukup siap untuk terlibat dalam praktik ini (Brunn, 2014; Ryan & Bohlin, 1999; Siegal, 2009).

Permasalahan lain yang sering kali terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan karakter khususnya di Indonesia, yaitu Pancasila dalam proses pembelajaran seringkali luput dari pembelajaran dan hanya menitikberatkan dalam pendidikan kewarganegaraan, khususnya dalam konteks penanaman nilai-nilai Pancasila. Seharusnya penanaman nilai-nilai Pancasila tersebut dapat dilakukan juga dalam mata pelajaran lainnya (Saiin, 2017, hlm. 189). Hal ini tentu harus menjadi perhatian bersama, bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan karakter tentu harus melibatkan berbagai pihak dan diterapkan dalam setiap mata pelajaran di jenjang persekolahan dalam penanaman nilai-nilai luhur pancasila dalam proses pembelajarannya sebagaimana telah diatur dalam kurikulum terkait pengembangan sikap afektif peserta didik. Tentu harus dilaksanakan tidak hanya di lingkungan sekolah, melainkan juga harus melibatkan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Permasalahan, hambatan dan tantangan penyelenggaraan pendidikan karakter tersebut tentu harus disikapi dan ditangani secara serius dengan membangun kesadaran dan gotong royong dari berbagai kalangan, baik warga sekolah, keluarga maupun masyarakat sekitar karena pendidikan karakter dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila harus dilaksanakan secara kolektif dan bersama-sama. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia yang berkarakter Pancasila sesuai jati diri bangsa dan negara.

David Carlin (2000, hlm. 147) menjelaskan bahwa "Sekolah dapat menjadi guru moral yang efektif ketika mereka mewakili komunitas yang secara moral homogen". Pernyataan tersebut bermakna bahwa sekolah sebagai bagian dari lingkup satuan pendidikan formal menjadi tempat yang tepat dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik secara efektif, tentunya dengan integrasi lingkup lingkungan lainnya seperti keluarga dan masyarakat sebagai tempat aplikatif dalam mengaplikasikan nilai-nilai karakter yang telah dipelajari di sekolah dalam kehidupan sehari-hari dan membangunnya menjadi suatu pembiasaan yang akhirnya menjadi suatu karakter yang mempribadi.

PENUTUP

Pancasila sebagai dasar negara, dan berkedudukan sebagai pandangan hidup serta ideologi negara memiliki

muatan nilai-nilai luhur adat istiadat, dan nilai sosial budaya bangsa Indonesia yang meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan dan keadilan. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dimaksudkan untuk mewujudkan pengamalan nilai-nilai Pancasila yang dapat tercermin dari tindakan, sikap dan tingkah laku warga negara khususnya generasi milenial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar dapat menangkal dan menghadapi pengaruh negatif globalisasi. Hal ini dilakukan melalui penguatan pendidikan karakter dengan mengidentifikasi dan

menklasifikasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam nilai-nilai karakter yang dikembangkan dalam penguatan pendidikan karakter sebagai penjabaran dari nilai dasar menjadi nilai instrumental dan sampai pada tataran nilai praksis. Muatan karakter dalam penyelenggaraan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal diimplementasikan melalui kurikulum dan pembiasaan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar atau satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Ali, H. & Purwandi, L. (2016). *Indonesia 2020: The Urban Middle-Class Millennials*. Jakarta: PT Alvara Strategi Indonesia

Amirrachman, R. A. (2012). Peace Education in the Moluccas, Indonesia: Between Global Models and Local Interests. *Doctoral Dissertation*. Netherlands: University of Amsterdam.

Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum (2010). *Disain Induk Pendidikan Karakter*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional

Battistich, V., E. Schaps, M. Watson, D. Solomon, and C. Lewis. (2000). Effects of the Child Development Project on students' drug use and other problem behaviors. *The Journal of Primary Prevention*, 21, 75-99.

Berkowitz, W., & Bier, M. (2004). Research-based Character Education. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 591, 72-85.

Bubandt, N. (2014). *Democracy, Corruption, and The Politics of Spirit in Contemporary Indonesia*. Oxon, UK: Routledge.

Budiyono & Wawan, K. (2013). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Mencari Model Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. *Jurnal Prodi PPKN* (Online).

Bulach, C. R. (2002). Implementing a Character Education Curriculum and Assessing its Impact on Student Behavior. *The Clearing House*, 76 (2), 79-83.

Branson, M.S. (1998). *The Role of Civic Education*. Calabasas: CCE.

Brunn, P. (2014). Pedagogy for the whole Child. In L. P. Nucci, T. Krettenauer & D. Narvaez (Eds.), *Handbook of Moral and Character Education* (hlm. 263-271). New York, NY: Routledge.

Carlin, D. R. (2000). *Schools cannot Teach Moral Values*. In Mary E. Willims (Ed.), *Education: Opposing viewpoints* (hlm. 144-147). San Diego, CA: Greenhaven Press.

Daradjat, Z. (1982). *Pendidikan Agama dalam Pendidikan Mental*, Cet. ke-4. Jakarta: CV. Bulan Bintang.

Darmadi, H. (2013). *Urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Bandung: Alfabeta.

Darmodiharjo, D. dkk. (1991). *Santiaji Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional.

Dumont, L. (1986). *Essays on Individualism*. Chicago: University of Chicago Press.

Frederick, W. H., and Robert L. W. (1993). "Indonesia: A Country Study." *In Area Handbook Series, 5th Edition*. Washington, D.C.: Federal Research Division for Sale by the Supt. of Docs., U.S. G.P.O.

Holtzappel, C. (1997). 'Nationalism and Cultural Identity', in M. Hitchcock and V.T. King (eds) *Images of Malay Indonesian Identity*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Jeynes, W. (2006). Standardized tests and Froebel's Original Kindergarten Model. *Teachers College Record*, 108 (1), 1937-1959.

Jeynes, W.H. (2019). A Meta-Analysis on the Relationship Between Character Education and Student Achievement and Behavioral Outcomes. *Education and Urban Society*, 51(1) 33 -71.

Kaelan. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma.

Kamarulzaman, AKA & Dahlan Y. (2005). *Kamus Ilmiah Serapan*. Yogyakarta: Absolut.

Krisjansson, K. (2015). *Aristolelian Character Education*. New York, NY: Abington.

Lee, A. (2016). Implementing character education program through music and integrated activities in early childhood settings in Taiwan. *International Journal of Music Education*, 34 (3), 340-351.

Lickona, T. (1991). *Educating for Character: How our Schools can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Book.

Lickona, T., Schaps, E., & Lewis, C. (2011). Eleven Principles of Effective Character Education. In J. L. De Vitis & T. Yu (Eds.), *Character and Moral Education* (hlm. 30-35). New York: Peter Lang.

Maksudin. (2013). *Pendidikan Karakter Non Dikotomik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Malihah, E. (2015). An ideal Indonesian in an increasingly competitive world: Personal character and values required to realise a projected 2045 'Golden Indonesia'. *Citizenship, Social and Economic Education*, 14 (2), 148-156.

Maryanto. (2011). Urgensi Pembaharuan Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Hukum*, 25 (1), 420-438.

Miles, M.B. and Huberman, A.M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.

Naisbitt, John. Et. All. (2002). *High Tech High Touch*. Jakarta: Pustaka Mizan.

Ngadino, Syahrial dan Rahman. (2015). *Pancasila Dalam Makna dan Aktualisasi*. Penerbit Andi: Yogyakarta.

Panjaitan, P. & Prasetya, A. (2017). Pengaruh Social Media terhadap Produktivitas Kerja Generasi Milenial . *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 48 (1), 173-180.

Ryan, K., & Bohlin, K. E. (1999). *Building character in schools: Practical ways to bring moral instruction to life*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Saiin, A. (2017). Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Justitia et Pax Jurnal Hukum*, 33 (2), 179-196.

Santosa, K. O. 2005. *Paradigma Baru Memahami Pancasila dan UUD 1945*. Bandung: Sega Arsi.

Saputra, I. (2017). Aktualisasi Nilai Pancasila sebagai Kunci Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2 (2), 25-35.

Siegel, H. (2009). *The Oxford Handbook of the Philosophy of Education*. New York, NY: Oxford University Press.

Wang, J. Lin, E. Spalding, E. Odell, S. J. & Klecka, C. L. (2011). Understanding Teacher Education in an Era of Globalization. *Journal of Teacher Education*, 62 (2), 115-120.

Wahana, H.D. (2015). Pengaruh Nilai-Nilai Budaya Generasi Milenial dan Budaya Sekolah terhadap Ketahanan Individu. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 21 (1), 14-22.

White, R., & Warfa, N. (2011). Building schools of character: A case-study investigation of character education's impact on school climate, pupil behavior, and curriculum delivery. *Journal of Applied Social Psychology*, 41(1), 45-60.

Zabda, S.S. (2016). Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara dan Implementasinya Dalam Pembangunan Karakter Bangsa. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 26 (2), 106-114.

Zuhul. (2000). *Visi Iptek Memasuki Milenium III*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal.

AKTUALISASI PANCASILA BAGI GENERASI MILENIAL MELALUI REVITALISASI PKn SEBAGAI PENDIDIKAN KARAKTER PANCASILA

Suwarma Al Muchtar

Abstrak

Perubahan sosial budaya dalam era global yang dipicu dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan generasi milenial, fenomena demografik ini membawa dampak terhadap perubahan nilai sosial budaya. Perubahan ini menumbuhkan tantangan terhadap tatanan sistem sosial termasuk dalam bidang pendidikan. Dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan kualitas aktualisasi Pancasila bagi generasi milenial perlu diawali dengan memperkuat pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter Pancasila" supaya warganegara milenial menjadi warga negara Pancasila memiliki kecerdasan berideologi Pancasila sebagai dasar dalam menjalani kehidupan milenial. Tulisan ini melakukan kajian mengapa aktualisasi Pancasila bagi generasi milenial perlu melalui revitalisasi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter Pancasila dengan pendekatan pengintegrasian konsep, Nilai Pancasila, kenegaraan, kewarganegaraan, teknologi dan pembelajaran, bagi generasi milenial.

Kata Kunci: Karakter Pancasila, generasi milenial, Pendidikan Kewarganegaraan

A. PENDAHULUAN

Para peneliti sosial mengelompokkan generasi, berdasarkan ciri-ciri sosial budaya pengelompokan generasi milenial dilakukan oleh peneliti sosial, merujuk kepada generasi yang lahir diantara tahun 1980 an sampai 2000 an. Generasi millennial adalah generasi muda masa kini yang saat ini berusia dikisaran 15 - 34 tahun. Munculnya generasi milenial merupakan gejala demografi yang memunculkan keunikan dalam latar era teknologi informasi modern. PEW Research Center menyatakan mereka

lahir di atas tahun 1980. Sementara itu, Majalah *TIME* menilai milenial lahir pada tahun 1980 - 2000. Di Indonesia sendiri dari jumlah 255 juta penduduk yang telah tercatat, terdapat 81 juta merupakan *generasi millennials* atau berusia 7 - 37 tahun. melahirkan fenomena sosial kultural keunikan karakteristik sebagai dampak revolusi dalam bidang teknologi Informasi. Melahirkan tata nilai budaya yang dikenal dengan budaya milenials. Sementara itu kita memahami bahwa sebutan itu. Milenials atau kadang juga disebut dengan generasi Y adalah sekelompok orang yang lahir setelah

Generasi X, yaitu orang yang lahir pada kisaran tahun 1980- 2000an. Maka ini berarti millenials adalah generasi muda yang berumur 17- 37 pada tahun ini. Generasi Milenial memiliki ciri-ciri sosial budaya yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Merupakan ciri khusus sehingga merupakan keunikan karena memiliki karakter berbeda-beda dengan generasi sebelumnya, terutama dalam akses dan penggunaan teknologi. Lebih lanjut bahwa Lyons (dalam Putra, 2016) menjelaskan tentang generasi milenial. Juga dinamai sebagai generasi Y. Sebutan ini awal digunakan pada editorial koran besar Amerika Serikat pada Agustus 1993. Generasi ini banyak menggunakan teknologi komunikasi instan seperti email, SMS, *instant messaging* dan media sosial seperti *facebook* dan *twitter*. Dapat dimaknai bahwa generasi milenial generasi Y adalah generasi yang memiliki karakteristik berkait erat dengan perubahan sosial budaya atas pengaruh kemajuan teknologi informasi seperti internet dan teknologi turunan dan aplikasi terkait terkait.

Dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan Perubahan sosial budaya itu sebagai lingkungan Pendidikan Kewarganegaraan. Perubahan berlangsung secara cepat terlebih dengan sentuhan perkembangan IPTEK khususnya IT berupa komputer dan internet. Demikian pula penambahan penduduk dunia yang tidak terkendali, dibarengi dengan tatanan kehidupan global yang membawa

dampak terhadap perubahan dan kerumitan masalah kewarganegaraan. Budaya hidonisme, materialistik pragmatis yang menguat, kondisi ini memunculkan kompleksitas masalah kewarganegaraan.

Sejumlah kalangan "*generasi millennials*" sangat mendominasi jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dengan kemampuannya di dunia teknologi dan sarana yang ada, generasi milenial belum banyak yang sadar akan kesempatan dan peluang di depan mereka. Generasi milenial cenderung lebih tidak peduli terhadap keadaan sosial di sekitar mereka seperti dunia politik ataupun perkembangan ekonomi Indonesia. Kebanyakan dari generasi milenial hanya peduli untuk membanggakan pola hidup kebebasan dan hedonisme. Memiliki visi yang tidak realistis dan terlalu idealistis, yang penting bisa gaya. Sementara itu perkembangan sistem nilai milenial menjadi pusat perhatian berbagai pakar, pengaruhnya sangat kuat hingga mempengaruhi bidang industrialisasi, dimaknai bahwa proses dan produk industri harus berorientasi dalam pemenuhan gaya hidup milenial. Permasalahannya bagaimana pengaruhnya terhadap pembangunan karakter dalam Pendidikan Kewarganegaraan, yang bertujuan untuk membangun warga negara yang beriman dan bertakwa dan akhlak warga negara yang mulia, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Namun demikian bagaimana arah revitalisasi PKn untuk memberikan layanan terhadap generasi milenial.

Sebagai subyek pembelajaran dan generasi milenial, sehingga terjadi proses aktualisasi Pancasila pada diri mereka.

B. SIGNIFIKANSI AKTUALISASI PANCASILA BAGI GENERASI MILENIAL

Epistemologi ilmu ilmu sosial termasuk dalam bidang ilmu kewarganegaraan yang merupakan landasan keilmuan, dihadapkan kepada masalah Pendidikan Kewarganegaraan. *Adalah semakin langka teori teori ilmu ilmu sosial yang secara kontekstual berbasis masalah kewarganegaraan aktual yang dihasilkan dari penelitian selama ini, termasuk kelangkaan kepakarannya.* Dihadapkan kepada masalah bagaimana aktualisasi Pancasila bagi generasi milenial, diperlukan kajian yang mendalam melalui Penelitian dapat membangun teori baru. Aktualisasi Pancasila bagi generasi milenial perlu kajian tentang masalah kewarganegaraan milenial, yaitu melalui analisis kritis karakteristik warga negara milenial dengan menggunakan landasan nilai nilai Pancasila sebagai dsar dan ideologi negara. Kajian ini diperlukan untuk memahami dan memecahkan masalah kewarganegaraan milenial yang semakin kompleks. Diperlukan berbasis teori kontekstual, seperti halnya dihadapkan kepada perubahan sistem nilai pada generasi melinial, Pengalaman menunjukkan bahwa masalah tersebut, sulit untuk dipahami dan dijelaskan dengan teori yang selama ini dikenal dalam bidang

ilmu ilmu sosial. Terlebih dalam pula dalam bidang ilmu kewarganegaraan.

Sementara itu pendekatan disipliner yang selama ini masih terpelihara dalam kemasam disiplin keilmuan menjadi tidak memiliki kemampuan untuk memperkuat peran ilmu sosial dalam mencari pemecahan masalah sosial yang semakin rumit dan memiliki karakter kompleksitas yang tinggi. Dalam memperkuat aktualisasi Pancasila bagi generasi Milenial, bagaimana memahami dan meyakini kebenaran dan kekuatan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara untuk itu dalam aktualisasi Pancasila bagi generasi milenial bagaimana revitalisasi Pkn dalam membangun kecerdasan berideologi Pancasila. *Pancasila sebagai ideologi terbuka memberikan kesempatan kepada warga negara untuk melakukan proses aktualisasi dalam berbagai segi kehidupan, sehingga nilai nilai Pancasila hidup dalam masyarakat berbangsa dan bernegara.*

C. PARADIGMA AKTUALISASI PANCASILA BAGI GENERASI MILENIAL

Pesatnya perkembangan teknologi informasi selama ini merupakan suatu keniscayaan, dan menjadikan tantangan untuk memperkokoh eksistensi dan konstirbusinya dalam aktualisasi Pancasila bagi generasi milenial. Merupakan bagian penting daari pengembangan warganegara yang baik. Dengan demikian dalam konteks ini memiliki keyakinan akademik bahwa kompleksitas

milenial menjadi karakteristik dari latar sosial budaya PKn. Sedangkan generasi milenial sebagai subyek didik PKn di mana menuntut kemampuan berfikir tingkat tinggi dari setiap warga masyarakat untuk dapat menjalani kehidupan yang memiliki kompleksitas tersebut. Pengamalan Pancasila bagi generasi milenial dapat dilakukan aktualisasi melalui proses penghayatan dengan pendekatan filosofik akan kebenaran Pancasila dengan semangat cinta tanah air. Proses aktualisasi Pancasila bagi generasi milenial tidak dilakukan melalui indoktrinasi sebab proses ini tidak melahirkan proses membangun karakter Pancasila dan *kecerdasan ideologi Pancasila warga negara milenial*.

Diyakini pula bahwa proses aktualisasi memerlukan dukungan teori Ilmu Kewarga negaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan. Oleh karena itu tidak mungkin PKn dapat mengambil peran optimal dalam membentuk karakter Pancasila warga negara Indonesia, tanpa dilakukan upaya revitalisasi epistemologinya, terlebih dalam kompleksitas latar sosial budayanya seperti selama ini. Diyakini pula bahwa kompleksitas menjadi karakteristik dari latar sosial budaya PKn, era milenial menjadi warganegara bercirikan milenial yaitu sosial teknologis dimana intervensi teknologi dalam sistem sosial budaya. Menuntut kemampuan berpikir tingkat tinggi dari setiap warga masyarakat untuk dapat menjalani kehidupan yang memiliki kompleksitas tersebut. Oleh karena itu tidak mungkin PKN

dapat mengambil peran optimal dalam mengaktualkan Pancasila bagi generasi milenial tanpa dilakukan upaya revitalisasi epistemologinya, terlebih dalam kompleksitas latar sosial budayanya. Untuk itu perlu dibangun paradigma Pendidikan PKn sebagai Pendidikan Karakter Pancasila. Dalam kaitan ini kajian epistemologi dan etnopedagogi perlu disinergikan untuk dapat merumuskan paradigma baru tersebut, yang merupakan tantangan sekaligus arah bagi revitalisasi PKn. Untuk itu diperlukan paradigma baru Pendidikan untuk merevitalisasi PKN berdaya guna kuat "*powerfull*" sebagai modal sosial (*social capital*) dalam mengaktualkan Pancasila bagi generasi milenial agar memiliki kecerdasan berideologi dan mencerdaskan kehidupan bernegara dan berbangsa. Sekarang ini diperlukan upaya memperkuat posisi dan peran PKN sebagai sarana utama dalam mencerdaskan kehidupan sosial bangsa. Antara lain dengan memperkaya dan memperkuat pengembangan dalam membangun Karakter Pancasila peserta didik.. Untuk itu diperlukan kajian epistemologis Ilmu Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarga Negaraan untuk membangun "paradigma baru keilmuan sebagai Pendidikan Karakter Pancasila bagi peningkatan mutu dan peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun watak, pengetahuan dan keterampilan berbangsa dan bernegara pesertadidik sebagai makhluk sosial yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

Kajian selama ini menunjukkan bahwa kelemahan PKn terjadi lebih serius pada tataran orientasi pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran, antara lain secara faktual budaya belajar belum diperkokoh dengan pengembangan kemampuan berpikir kewarganegaraan yang produktif dan berbasis nilai nilai sosial politik dan budaya bernegara Hal ini disebabkan PKN selama ini belum banyak mengakses nilai nilai Pancasila baru terbatas pada pengetahuan tentang Pancasila. Aktualisasi Pancasila pada generasi milenial, tidak cukup dengan dukungan pengetahuan, akan tetapi generasi ini memerlukan sesuatu yang menantang untuk memenuhi daya kritis dalam berpikir. Oleh karena diperlukan pendekatan filosofik untuk memperkuat daya aktualisasinya. Sementara itu bangsa ini dibangun atas modal sosial budaya dan etika politik yang bersumber dari Pancasila., Etika politik Pancasila memiliki kekokohan karena sarat dengan muatan nilai spiritual yang bersumber keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, melembaga tumbuh dan berkembang dipatuhi dengan penuh kesadaran warganegara. Dengan demikian Karakter Pancasila merupakan nilai- nilai yang kokoh ajeg karena memuat nilai spiritual yang tinggi diyakini kebenarannya dipatuhi dan dihormati dipelihara oleh masyarakatnya. Dengan demikian nilai nilai Pancasila sebagai aset modal sosial politik yang kokoh untuk dijadikan sumber bagi revitalisasi pengembangan kurikulum dan

pembelajaran untuk memperkokoh daya aktualisasi Pancasila bagi warganegara milenial di Indonesia. Proses Aktualisasi termasuk dalam membangun kecerdasan berideologi Pancasila warganegara dalam menghadapi kehidupan generasi milenial di Indonesia. *Pemasalahannya antara lain mengapa PKn perlu merespon dengan melakukan revitalisasi dalam menghadapi masalah kewarganegaraan milenial. Mengapa diperlukan pendekatan pengintegrasian konsep Ketuhanan, keilmuan, nilai Pancasila, masalah kewarganegaraan aktual dan teknologi dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran?*

D. KARAKTERISTIK WARGANEGARA MILENIAL

Bagaimana karakteristik dan keunikan warganegara milenial dalam perspektif pendidikan Keewarganegaraan? Seperti telah difahami secara umum bahwa, Generasi milenial adalah mereka yang lahir pada tahun 1980-an hingga tahun 2000 yang dinamakan juga dengan generasi Y. Lebih khusus *Echo Boomers*. Nama milenial untuk generasi ini dicetuskan oleh penulis bernama *William Strauss* dan *Neil Howe*. Kehadiran generasi milenial sangat mempengaruhi media komunikasi dan penggunaan teknologi digital dunia. Mereka juga tumbuh dengan karakteristik yang berbeda dari generasi sebelumnya, Gen-X. Berikut adalah ciri-ciri generasi milenial pada nilai Pancasila.

Generasi milenial memiliki keunikan kedekatan dan melekat dengan teknologi informasi dengan kemajuan media dan teknologi digital. Orientasi sistem nilainya banyak dipengaruhi oleh akses teknologi. Dapat dipahami kalau Gadget menjadi benda paling penting. Dampaknya bahwa Gadget tidak bisa dipisahkan dari diri mereka. Seakan menjadi energi bagi kehidupannya, tidak ada waktu tanpa gadget akan membuat mereka kurang percaya diri. Bagaimana implikasinya terhadap revitalisasi PKn? PKn memiliki tanggung jawab kedekatan dengan teknologi tidak boleh mengurangi kedekatannya dengan nilai-nilai ketuhanan sebagai nilai utama Pancasila. Semestinya makin dekat dengan teknologi akan semakin dekat dengan Tuhannya kedekatan dengan teknologi memperkuat terhadap pemahaman dan pengamalan nilai tersebut sebagai kekuatan aktualisasi Pancasila. Memperkokoh warganegara berkarakter Pancasila yang memiliki *kecerdasan berideologi Pancasila*. Kondisi ini merupakan tantangan bagi pengembangan kurikulum dan pembelajaran generasi milenial memiliki kemampuan untuk melakukan aktualisasi Pancasila. Perlu dipahami ciri-ciri ini muncul berkenaan dengan mereka hidup pada jaman kemajuan teknologi yang amat pesat. Dampak positifnya memiliki kemampuan untuk mengikuti perkembangan zaman dan akses teknologi dengan baik. Mereka bisa mengenal dunia dengan gadget yang ada di tangan

mereka. Mereka mengetahui dengan cepat berbagai informasi dari berbagai sumber informasi, Memiliki ketergantungan terhadap teknologi informasi sangat tinggi. Dalam perspektif PKn masalahnya kedekatan dengan teknologi jangan sampai menjadi ketergantungan terhadap teknologi dan terhindar menjadi obyek teknologi? Selanjutnya kondisi ini dijadikan kajian mendalam tentang bagaimana mengembangkan kurikulum dan pembelajaran PKn berbasis teknologi informasi, Dengan demikian PKn memiliki daya tarik karena memenuhi kebutuhan berpikir mereka generasi milenial. Bagaimana mereka tetap memiliki kekuatan sebagai subyek warga negara yang dapat menggunakan teknologi untuk memperkuat kemampuan untuk memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Bagaimana revitalisasi pengembangan kurikulum dan pembelajaran PKn untuk mengatasi masalah kewarganegaraan milenial ini. Teknologi sebagai bagian tidak terpisahkan dari masyarakat milenial, tidak mungkin dapat menjauhkan generasi milenial dari teknologi. Dalam perspektif PKn bagaimana dampak kedekatan dengan teknologi, agar tidak berdampak negatif terhadap upaya pembinaan nilai-nilai Pancasila. PKn memiliki tanggung jawab bagaimana agar mereka menjadi warga negara Indonesia yang dekat dengan nilai sosial budaya Indonesia yang beriman dan bertakwa berakhlak mulia memiliki cinta tanah air, nilai sosial dan budayanya.

Keunikan warganegara milenial adalah *mengusung gaya hidup serba instan*, kita fahami bahwa gaya hidup ini sebagai dampak kemajuan teknologi dengan aplikasi yang mempercepat transaksi dan kehidupan sosial. Gaya hidup yang serba mudah dan instan sudah menjadi ciri-ciri generasi milenial paling umum. Berkat teknologi yang ada mereka bisa memenuhi kebutuhan dengan sekali akses. Segala kebutuhan seperti daftar belanjaan, makanan, transportasi, pembayaran tagihan, obat-obatan dan hampir seluruh kebutuhan generasi ini bisa dipenuhi dengan sekali akses, yakni melalui gadget yang dimilikinya. Semua serba instan dan mereka tidak perlu menghabiskan waktu dan tenaga untuk mendapatkan semua keperluannya. Permasalahannya kewarganegaraannya bagaimana gaya hidup ini tumbuh menjadi menjadi gaya hidup konsumtif, yang dapat berdampak negatif pada nilai nilai ekonomik dan daya tahan ekonomi masyarakat dan bangsa Indonesia. Bagaimana agar gaya hidup instan tidak menjadi gaya hidup dalam mengakses sumber sumber ekonomik dimana sistem ekonomik belum dapat memeuhi kebutuhan ekonomik "*secara instan*". Bagaimana agar gaya hidup ini tidak menjadi sistem nilai menghalalkan berbagai cara dalam mengakses sumber keuangan sehingga melanggar hukum? Implikasinya terhadap Pkn adalah bagaimana pengembangan Kurikulum dan pembelajaran? Pembelajaran tidak cukup dengan membangun pengetahuan, sikap dan keterampilan

warga negara, akan tetapi memperkuat daya pikir dan sistem nilai yang tinggi dan mendalam bagi subyek didik warganegara milenial. *Pendekatan subyek keilmuan ditransformasikan dengan pendekatan pendidikan dan keguruan menjadi memperkuat daya pikir dan penghayatan nilai dengan dukungan teknologi IT yang tepat guna bagi kualitas pembelajaran.* Warganegara Milenial ***Lebih kritis dalam menyikapi informasi baru***, menerima suatu informasi dengan menerimanya mentah-mentah. Bersikap lebih kritis terhadap segala informasi yang dapat di akses. Ingin mencari lebih banyak tentang suatu berita dan mengecek kebenarannya. Dalam perpektif Pkn ciri ini positif dalam pembentukan warga negara perlu ditransformasikan dalam proses *kemampuan menerima informasi memilah informasi dan menggunkan informasi atas dasar nilai nilai Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.* Jika demikian, maka daya kritis ini memperkokoh kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warganegara. Dalam perspektif pembelajaran Pkn adalah *bagaimana bahan pelajaran ditransformasikan dari informasi pengetahuan menjadi bahan pembelajaran berbasis masalah kewarga negaraan aktual.* Kemudian diperkuat transformasi dari "*teaching*" menjadi "*learning*". Implikasinya bagaimana Pkn pembelajaran dikembangkan dengan menggunakan dukungan IT. Dengan demikian potensi warga negara milenial yang kritis perlu dalayani dengan program Pkn untuk membangun pendekatan berpikir tingkat tinggi

dan penghayatan yang mendalam dalam proses pembelajaran nilai-nilai Pancasila. Daya kritis sebagai potensi warganegara untuk membangun kecerdasan berideologi Pancasila bagi warga negara milenial sehingga mereka mampu menumbuhkan ciri warganegara yang memiliki melek dan kecerdasan berideologi Pancasila secara kritis dan penghayatan yang mendalam bukan produk informasi. Jika generasi menyukai hal-hal baru dan pengalaman baru, generasi dan tergolong menyukai tantangan dan hal-hal baru. Mereka akan sangat antusias dengan berbagai perubahan. Traveling ke tempat dan hunting makanan dan resto dengan menu baru dan unik merupakan hobi generasi milenial. Menciptakan suatu ide menarik dan peluang baru juga merupakan bakat dari mereka yang masuk dalam golongan generasi milenial. Namun demikian mereka ini pun memiliki sifat konsumtif dan juga produktif. Sifat konsumtif terhadap barang baru yang paling menonjol dengan dukungan IT. Cara berbelanja online gaya konsumtif membeli barang bukan lagi karna kebutuhan, tapi karena keinginan memiliki produk trendi dikalangan generasi ini. Padahal mereka sangat menyadari bahaya hidup boros namun mengabaikan tips mengatur keuangan rumah tangga. Sementara itu generasi ini juga tergolong produktif. Mereka mampu menghasilkan inovasi baru dan lahir menjadi pebisnis dan pengusaha sukses dengan ide kreatif yang dimilikinya. Mereka mampu menciptakan sesuatu yang

unik bernilai tinggi. Dari sisi teori ekonomi warga negara PKn memiliki misi untuk membangun kekuatan ekonomi warga negara, warga negara yang baik adalah warga negara yang memiliki kemampuan berekonomi yang bercirikan efisien dan produktif bukan warganegara yang konsumtif.

Generasi milenial Lebih ekspresif dan berani mereka lebih bisa mengekspresikan diri. Ia bebas dalam mengeluarkan pendapat dan opini dan juga bebas dalam mengeksplor bakat yang mereka miliki. Mereka juga lebih berani dalam unjuk diri untuk mendapatkan hak dan menyalurkan keinginan mereka. Selalu update. Generasi ini juga selalu update dan mendapatkan berbagai informasi dari kejadian terkini dengan cepat. Hal ini karena mereka selalu membagikan segala informasi dan berita yang di dapat dengan cepat melalui akun media. Ciri ini memberikan tuntutan bahwa PKn perlu memperkuat pendekatan aktualisasi masalah kewarganegaraan dijadikan sumber pembelajaran dan senantiasa dilakukan pembaharuan sesuai dengan masalah yang dihadapi warganegara. Demikian pula model pembelajaran yang menggunakan gadget sebagai media pembelajaran. Aktualisasi sumber dan bahan pembelajaran sangat diperlukan, implikasinya guru perlu terus memahami dan perlu melek teknologi.

Dalam perspektif PKn salah satu kelemahan dari generasi ini adalah *bersifat individual*, sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Lebih

mementingkan gadget yang mereka genggam. Mereka menjadi kurang peduli dengan lingkungan sekitar mereka berada. Mereka juga tidak peduli dengan orang tua yang berada disebelah mereka. Bagaiman peran Pkn untuk merespon tersebut, warganegara Indonesia secara kultural lebih sosial dari pada individualis, warganegara yang mementingkan kepentingan umum dari pribadi sebagai wujud nilai persatuan Indonesia. Analisis ciri-ciri generasi milenial diatas dari perspektif PKN bagaimana membangun teori Aktualisasi Pancasila bagi generasi milenial Pkn berbasis Pancasila, *mengintegrasikan konsep Ketuhanan, Teknologi. Kewarganegaraan kemasyarakatan dan kenegaraan.* Bagaimana menjadi warga negara melek teknologi di atas dasar kekuatan keimanan ketaqwaan dan dan akhlak warganegara yang mulia. Dengan demikian eksistensi PKN diperlakukan dan peran guru PKN tidak diganti dengan teknologi, PKN tidak dapat menolak teknologi, karena teknologi merupakan keniscayaan sebagai *latar dan karakter subyek didik milenial.* Persoalannya bagaimana PKN membangun revitalisasi epistemologi dan membangun pendekatan baru dalam pengembangan kurikulum dan pembelajarannya agar generasi milenial generasi yang memiliki kemampuan mengatualisasikan Pancasila, didasarkan atas kemampuan penguasaan teknologi Informasi, kemampuan berfikir kritis, kecepatan akses informasi dari berbagai sumber.

E. PENTINGNYA REVITALISASI PKN DALAM KONTEKS AKTUALISASI PANCASILA BAGI GENERASI MILENIAL.

Bagaimana paradigma aktualisasi Pancasila bagi generasi milenial, pertama generasi milenial memiliki potensi dengan dukungan IT dapat secara kreatif dalam berbagai aktivitas kehidupan sebagai warganegara. Kedua aktualisasi Pancasila bagi generasi milenial perlu dukungan pendidikan kewarganegaraan yang dapat memenuhi karakteristik milenial ketiga PKN sebagai Pendidikan karakter Pancasila merupakan tuntutan dan konsekwensi atas terjadinya perubahan melinial. yang sangat cepat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai latar sosial budaya PKN. Sementara itu pendekatan disiplin, multidisiplin ke arah pendekatan krosdisiplin, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang hakiki tentang fenomena sosial dan masalah kewarganegaraan milenial. Selama ini ilmu ilmu sosial sedang bergerak kepada perubahan orientasi dan tengah berusaha keluar dari tradisi positivisme, dan tengah memperkuat diri dalam neopositivisme dan neostrukturalisme dengan bergerak ke arah naturalistik inkuiri sebagai pendekatan unggulan dalam memperkuat epistemologinya dan membangun jatidiri. Di lain pihak tumbuh pula perkembangan ilmu sosial profetik sebagai pandangan ilmu sosial tidak bebas nilai. Demikian pula dalam bidang Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan PKN

semestinya bergerak lebih cepat ke arah membangun PKN profetik bersumber dari nilai-nilai ketuhanan dan nilai Pancasila yang tumbuh berkembang dalam latar kehidupan masyarakat sebagai generasi milenial sumber PKN. Inilah yang menjadi latar paradigma Pendidikan PKn sebagai pendidikan karakter Pancasila untuk memperkuat aktualisasi Pancasila dalam generasi milenial. Masalah Aktualisasi Pancasila dan Masalah Kewarganegaraan Milenial dan Arah Revitalisasi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia. Seperti telah dikemukakan bahwa perubahan sosial budaya sangat dipengaruhi oleh terdapatnya Pertumbuhan penduduk, Globalisasi dan Perubahan sosial budaya. Perkembangan IPTEK Komunikasi. Mempengaruhi terhadap kompleksitas masalah kehidupan bernegara termasuk masalah kewarganegaraan. Sementara itu perubahan paradigma dalam Ilmu Ilmu sosial positivisme ke konstruktivisme Manusia diposisikan sebagai subjek dalam latar alamiah sejajar dengan subjek Orientasi prinsip kajian yang lebih emik. Menuntut revitalisasi dan orientasi PKn sebagai program pendidikan multi sumber dan kontekstual ilmu Pendidikan ilmu keguruan ilmu ilmu Sosial, dan humaniora, sains teknologi dan agama dan masalah sosial *dengan mengarah pada pendekatan krosdisiplin untuk kepentingan pencapaian tujuan Pendidikan nasional*. Perlunya transformasi paradigma ke arah *Paradigma alamiah* yang berasumsi bahwa fenomena bercirikan

interaktivitas, intersubjektivitas. Transformasi ini diperlukan sehubungan muncul kritik terhadap praktek dan hasil pembelajaran, Kritik tajam bahwa pembelajaran PKn lebih menekankan kepada pengembangan kognitif dan mengabaikan aspek afektif dan psikomotorik dan terlepas dari nilai-nilai karakter Pancasila. Hal ini ditunjukkan dengan melemahnya nilai kebangsaan, oleh karena itu memunculkan untuk memperkuat pembelajaran karakter Pancasila. Oleh karena itu perlu dilakukan percepatan membangun paradigma revitalisasi PKN sebagai Pendidikan Karakter Pancasila.

Masalah Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran PKn perlu Kita pelajari sehingga memiliki wawasan bagaimana mengembangkannya terutama dalam pembelajaran nilai karakter bangsa. Terutama kaitannya melaksanakan tugas pendidik dalam pengembangan kurikulum, antara lain merencanakan program pembelajaran dalam bentuk silabus maupun rencana program perencanaan pembelajaran (RPP). Dengan memperhatikan dasar-dasar keilmuan juga memperhatikan kondisi dan tantangan masa depan, khususnya dalam pengembangan materi dan arah pengembangan metodologi pembelajaran. Pengembangan nilai dan karakter bangsa yang tidak lain adalah karakter Pancasila dalam pembelajaran pembelajaran PKn, seperti dilaporkan dari hasil penelitian yang antara lain menyimpulkan bahwa Proses pembelajaran PKn kurang menyentuh pengembangan

berpikir dan nilai dan membentuk. Akibatnya tidak membantu dalam mengembangkan kemampuan dan sikap rasional dalam menentukan pilihan nilai kewarganegaraan untuk memperkuat kualitas warganegara Indonesia dalam merespon tantangan perubahan kehidupan bernegara dan berbangsa.

Masalah pengembangan nilai dan karakter dalam pembelajaran PKn, memerlukan karakteristik pembelajaran yang memungkinkan nilai karakter bangsa itu tumbuh dan berkembang termasuk tumbuhnya warganegara generasi milenial. Perlu diketahui bahwa dalam pembelajaran yang berorientasi pada penyampaian materi tidak akan memberikan ruang dan suasana untuk tumbuh dan berkembang pembelajaran nilai, watak dan karakter kecuali pada pembelajaran yang menekankan kepada keterlibatan peserta didik dan proses pembelajaran, Tantangan bagi Inovasi dalam Proses Pembelajaran Pendidikan antara lain analisis kelemahan menunjukkan bahwa Rendahnya kadar pembelajaran PKn selama ini diantisipasi cenderung menurun, bila dihadapkan perubahan yang sangat cepat dalam masyarakat. Secara kontras apabila dihadapkan perubahan yang membangun ciri ciri milesial. Hal ini berkenaan dengan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai aspek yang sangat pesat. Sementara itu, pembelajaran PKn terjebak dan terstruktur oleh gejala rutinitas. Psertadidik milenial yang sangat dekat dengan teknologi bahwa

nyaris menjadi obyek teknologi akan mempengaruhi perannya sebagai subyek didik. Pembelajaran selama ini terlepas dari nilai nilai sosial budaya, Keadaan inilah yang meyebabkan semakin kuatnya kesenjangan antara mutu pembelajaran PKn dengan kemajuan teknologi dan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Tuntutan terhadap kualitas pembelajaran dalam revitalisasi pengembangan kurikulum dan pembelajaran sementara itu pembelajaran PKn dihadapkan pada dua dimensi yang sekaligus menuntut untuk ditumbuh kembangkan dalam mempersiapkan SDM, yang memiliki kekuatan untuk memberdayakan potensinya seoptimal mungkin, untuk penguasaan IPTEKS dalam orientasi mencerdaskan kehidupan sosial bangsa atas landasan nilai- nilai sosial budaya yang teruji dalam tatanan Karakter Pancasila yang memuat nilai-nilai iman dan taqwa.

Analisis situasi dan kondisi sosial sebagai latar PKn dan lingkungan kehidupan sosial budaya dan perubahan pada generasi milenial. Dapat disimpulkan bahwa memasuki era globalisasi dan milenial hendaknya disadari bahwa bangsa Indonesia, era kompetitif secara global masuk dalam percaturan antar bangsa. Kondisi ini ditandai dengan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Jenis dan persyaratan pekerjaan bertambah semakin tinggi dan peluang memasuki pekerjaan semakin kompetitif. Hal ini sangat memungkinkan pula pembelajaran PKn formal persekolahan akan

semakin ketinggalan. Ketidakpastian perkembangan masyarakat yang dipacu oleh IPTEK mempengaruhi terhadap tuntutan kualitas SDM. Inilah yang menjadi tantangan serius bagi perlunya inovasi dalam proses pembelajaran. Berbicara konseptual tentang SDM, IMTAQ, dan IPTEK, pembelajaran PKn merupakan inti persoalan. Dengan demikian, lemahnya kualitas pembelajaran PKn akan secara langsung memperlemah kondisi SDM, baik dalam pemikiran IMTAQ maupun dalam penguasaan IPTEK. Pkn memiliki tanggung jawab bagaimana generasi milenial dengan segala keunikannya terlepas dari landasan filsafat Pancasila.

Berkembangnya apresiasi masyarakat terhadap pendidikan, melahirkan tantangan baru bagi dunia pendidikan. Di samping itu, berkembangnya teknologi informasi mempengaruhi terhadap perolehan peserta didik tentang informasi, tidak terbatas pada pendidik dan buku sebagai sumber informasi yang tersedia. Akan tetapi, sudah meluas dengan mengakses pada media masa seperti jaringan internet sebagai sumber informasi modern. Di sisi lain media masa informasi seperti TV, demikian pula IT seperti internet sangat besar pengaruhnya terhadap pendidikan, namun demikian belum terakses oleh para pendidik, baik dalam proses pengembangan program maupun proses pembelajarannya. Kondisi ini merupakan tantangan inovasi proses pembelajaran untuk meningkatkan mutu supaya dapat mengimbangi tuntutan aktual

futuristik PKn.

Secara umum, pengembangan metodologi proses pembelajaran belum terakses pada sumber informasi tersebut, namun untuk masa mendatang kiranya tidak dapat dihindari untuk dijadikan isu sentral dan arah pengembangan model pembelajaran, terutama dalam menyongsong kehidupan sosial global dan tuntutan generasi milenial. Kondisi ini mengisyaratkan sebagai tantangan bagi inovasi dalam pengembangan kurikulum dan pembelajarannya. Salah satu prinsip antara lain *kurikulum PKn sebagai Pendidikan Karakter Pancasila. PKn sebagai Pendidikan nilai nilai sosial budaya Pancasila*. Dalam pembelajaran perlu dilakukan transformasi pembelajaran nilai-nilai sosial budaya Pancasila yang merupakan aktualisasi nilai nilai Pancasila tersebut. Termasuk perubahan nilai yang cepat karena pengaruh IT yang memunculnya generasi milenial dengan ciri ciri nilai dan orientasi yang beda dengan generasi sebelumnya. Sistem nilai, orientasi berpikir, gaya hidup, yang perlu diperlu dipelajari agar tidak tumbuh bertentangan dengan nilai dan ideologi Pancasila.

Dalam pembelajaran mempercepat bergeseran dari peran guru ke arah sebagai fasilitator dan patner belajar peserta didik, dengan memerankan peserta didik sebagai yang paling utama dalam proses pembelajarannya. Selama ini terjadi kesenjangan antara kualitas pembelajaran PKn dalam kenyataan empirik, melemahnya kontekstual dengan lingkungan

dan masalah sosial budaya dengan tuntutan ideal kurikulum kehidupan praktis dan perkembangan masyarakat, menuntut untuk dilakukan terus menerus inovasi pendidikan. Inovasi merupakan kebutuhan dan keharusan yang dilakukan, agar kesenjangan tadi dapat dikendalikan. Dengan munculnya generasi milenial, juga akan melahirkan warga negara milenial yang ujungnya di kelas akan memunculkan peserta didik yang bercirikan milenial.

Disamping itu, perlu disadari bahwa sistem pembelajaran PKN cenderung akan selalu ketinggalan oleh perkembangan masyarakat. Di satu pihak masyarakat bersifat dinamis, sedangkan di lain pihak pembelajaran PKN cenderung bersifat konservatif, terutama pada masyarakat yang sedang berkembang. Kajian dalam perspektif membangun paradigma PKN berbasis nilai-nilai Karakter Pancasila menunjukkan gejala PKN sebagai berikut;

1. Pengembangan Kurikulum dan pembelajaran PKN yang berorientasi pada pengembangan nilai-nilai Karakter Pancasila untuk kepentingan pembelajaran warga negara milenial, pada hakikatnya, adalah upaya untuk memenuhi peningkatan mutu proses pembelajaran PKN yang dilakukan terus menerus, untuk memenuhi perkembangan tuntutan warga negara milenial. Perubahan sosial budaya yang terjadi dan melembaganya yang melembaga menjadi tatanan nilai-nilai karakter milenial.

Karakteristik nilai sosial budaya milenial yang mempengaruhi sikap pandangan dan perbuatan generasi milenial dalam perspektif PKN, perlu dijadikan kajian filsafat dan tujuan PKN. Hingga teridentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam perspektif dalam memperkuat eksistensi. Epistemologi teori dan strategi pengembangan kurikulum dan pembelajaran nilai-nilai Pancasila dengan menggunakan teknologi IT tepat guna. Hal ini didasarkan bahwa budaya milenial tidak lepas dari aplikasi teknologi tersebut adalah merupakan latar dan sumber bagi PKN. Diyakini bahwa untuk memperkokoh dan meningkatkan mutu pembelajaran Pendidikan akan efektif bila berhasil membangun kurikulum dan pembelajaran sebagai Pendidikan Karakter Pancasila bagi warga negara milenial hingga menjadi warga negara yang baik beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta membangun akhlak mulia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Implikasinya inovasi bermakna bagi peningkatan penyempurnaan dan pembaharuan inovasi dalam proses pembelajaran. Perlu menjadikan nilai-nilai sosial budaya yang tumbuh dan berkembang pada generasi warga negara milenial tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai filsafat dan ideologi bangsa. PKN demikian pengembangan kurikulum PKN hendaknya menggunakan

pendekatan kontekstual kultural dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber nilai dan ideologi sebagai landasan untuk kepentingan tersebut. Apabila paradigma ini diabaikan kurikulum dan model pembelajarannya justru akan cepat ketinggalan dan bahkan akan menjadi penghambat perubahan atau lambatnya proses inovasi pembelajaran tersebut. Lebih dari itu akan bertentangan dengan semangat PKn untuk menjadikan warga negara yang memiliki kecerdasan ideologis dalam memilih dan menggunakan teknologi. Dengan demikian inovasi dalam pembelajaran akan efektif dilakukan, manakala ditunjuk oleh hasil evaluasi dan penelitian dalam bidang pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Lemahnya dan langkanya penelitian dalam bidang ini menyebabkan akan sulit inovasi dilakukan. Jika demikian, akan mengakibatkan rendahnya mutu, relevansi, dengan tujuan pendidikan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia warga negara milenial.

2. Pentingnya PKn diperkuat dengan nilai-nilai Dasar negara dan ideologi Pancasila dengan memperkuat pendekatan dan model kurikulum kontekstual. Adalah pemikiran reflektif logis atas sejumlah fenomena yang muncul dalam masyarakat kita sekarang, yang sangat memprihatinkan berbagai

kalangan. Antara lain melemahnya moral, orientasi sosial, penyalahgunaan obat terlarang, dan kenakalan remaja, sadisme dan perlakuan penyimpangan seksual, penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan. Menguatnya individualisme dan liberalisme, melemahnya aktualisasi ideologi Pancasila, Kondisi ini seperti ini tumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuh berkembangnya nilai-nilai sosial yang tumbuh mewarnai sistem nilai budaya milenial. Di samping itu pula, muncul gejala melemahnya solidaritas sosial dan meningkatnya sikap individualistik, sebagai gejala yang dapat menimbulkan masalah sosial, tawuran dan masalah besar lainnya seperti masalah korupsi kemiskinan dan berbagai bentuk penyimpangan sosial lainnya yang tumbuh dan berkembang menjadi masalah kewarganegaraan, melemahnya kejujuran seperti menyontek dan penegakkan keadilan. Dinilai akan semakin menguat seiring dengan melemahnya komitmen dan kepercayaan terhadap nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu PKn sebagai Pendidikan Karakter Pancasila akan berhasil dan penuh makna manakala pembelajarannya berorientasi pada membangun karakter Pancasila.

3. Krisis Pendidikan nilai dalam pembelajaran PKn harus segera diatasi, dengan meyakini dan merevitalisasi pendidikan PKn sebagai Pendidikan dan

pembelajaran yang bersumber pada nilai-nilai filsafat dan ideologi Pancasila. Hal ini dipandang strategis untuk membangun watak dan karakter Pancasila sehingga akan mengatasi masalah sosial budaya. Kenakalan remaja yang mengarah pada tindakan kriminal dalam usia sekolah kerap terjadi, perkelahian antara pelajar bahkan di kalangan mahasiswa. Budaya hedonisme konsumerisme, jalan pintas, korupsi berpangkal karena melemahnya nilai kejujuran Kondisi ini merupakan tantangan bagi dunia PKN dan perlu dijadikan dasar pikiran bagi perlunya inovasi dalam pembelajaran. Kondisi sosiologis ini menuntut inovasi pembelajaran tidak didasarkan hanya pada dimensi psikologis semata, akan tetapi harus mengakses pada dimensi sosial budaya. Demikian pula untuk mengatasi Kualitas pembelajaran pada umumnya sangat rendah seperti terungkap dalam beberapa penelitian selama kurun waktu sepuluh tahun belakangan ini.

4. Analisis mengenai kelemahan pembelajaran yang secara umum dilaksanakan di lapangan teridentifikasi antara lain. Proses pembelajaran kurang ditunjang dengan pengembangan dan penggunaan IT sebagai media pembelajaran yang berupa berbagai kasus aktual kewarganegaraan yang tumbuh di lingkungan peserta didik seperti yang melembaga dalam

kehidupan bernegara. Selama ini proses pembelajaran lebih menekankan pada pengembangan aspek kognitif dari pada afektif dan psikomotor. Proses pembelajaran kurang menyentuh aspek kemampuan berfikir tingkat tinggi dan penghayatan mendalam nilai karakter Pancasila dan keterampilan warga negara secara utuh. Proses pembelajaran lebih menekankan pada pencurahan isi buku dari pada proses penguasaan isi buku. Proses pembelajaran terlepas dari akar nilai-nilai Karakter Pancasila, justru lebih menempatkan peserta didik sebagai penerima informasi dalam suasana belajar satu arah, dari pada melibatkan peserta didik dalam proses berpikir nilai-nilai karakter Pancasila. Proses pembelajaran lebih menempatkan pendidik sebagai sumber informasi yang dominan penerima informasi atau pengetahuan kewarganegaraan, Di samping terbatasnya penggunaan sumber daya belajar lainnya. Proses pembelajaran lebih menempatkan pendidik sebagai sumber informasi, seperti yang terdapat di dalam buku, konsep keilmuan dari pada kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan nyata seperti masalah dan nilai-nilai karakter Pancasila. Proses pembelajaran belum banyak mengakses pada penguatan sistem nilai-nilai sosial budaya atas dasar keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian pula Proses pembelajaran belum

secara tegas mengakses pada penguasaan IPTEK yang tepat guna sarat dengan nilai-nilai sosial budaya.

5. Dari hasil studi PKN selama ini, secara hipotesis rendahnya kadar kualitas pembelajaran dilihat dari dimensi peran dan kemampuan pendidik antara lain sebagai berikut: Lebih banyak bertindak dan berperan sebagai pelaksana kurikulum dari pada sebagai pengembang kurikulum Memiliki orientasi yang lebih kuat pada tercapainya target kurikulum, implikasinya lebih menguasai materi pelajaran yang terdapat dalam buku, dari pada pemahaman terhadap karakteristik peserta didik. Memiliki kemampuan dan keterampilan tentang berbagai pendekatan dan metode pembelajaran, namun kurang memiliki motivasi yang kuat untuk berani menggunakan metode yang bervariasi. Kurang menguasai teori belajar dan model-model belajar, sehingga kurang memiliki kekuatan untuk melakukan inovasi pembelajaran. Tidak berperan sebagai sumber-sumber informasi penelitian, sehingga pengalaman mengajar belum secara efektif dijadikan bahan masukan, bagi perbaikan dan rekonstruksi program pengembangan kurikulum. Belum dapat bertindak sebagai peneliti dalam pembelajaran bidang pembelajaran, implikasinya terdapat kelangkaan teori-teori dan model pembelajaran. Kondisi

ini akan berakibat tidak banyak dilakukannya inovasi dalam bidang proses pembelajaran. Cenderung lebih disebut sebagai aspek administratif bersifat formalistik, dari pada pemikiran dalam memperkuat proses pembelajaran Kreativitas dalam proses pembelajaran terstruktur oleh terbatasnya dukungan sumber daya Pendidikan Budaya pembelajaran lebih dipengaruhi oleh rutinitas dan formalistik, dari pada akademik dan inovasi pembelajaran Hasil pembelajaran PKn tambahan penataran tidak dapat sepenuhnya dikembangkan dalam praktek pembelajaran, karena rutinitas lebih mempengaruhi budaya belajar.

PENUTUP

Dari kajian bagaimana aktualisasi Pancasila bagi generasi milenial, akan efektif melalui dukungan teori ilmu kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk itu perlu dilakukan dilakukan revitalisasi sesuai dengan tuntutan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi, yang sangat kuat pengaruhnya terhadap perubahan nilai nilai sosial budaya. Aktualisasi Pancasila bagi generasi milenial, dapat lebih bermakna apanila mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif dan nilai karakter Pancasila dapat dikembangkan, jika pembelajaran PKn berhasil menciptakan iklim belajar yang terbuka, demokratis,

kompetitif berorientasi kepada proses belajar peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi kapasitas dan kapabilitas dirinya sendiri. Lebih berorientasi pada pengembangan proses pembelajaran dan kemampuan berfikir dan penghayatan nilai dari pada orientasi dari pada penguasaan konten berbasis pada *"subject based curriculum models"* yang selama ini mendominasi pemikiran dan model PKN dalam kurikulum sekolah sehingga sulit dibedakan dengan tradisi di Perguruan tinggi. Pembudayaan belajar berpikir dalam pembelajaran PKN akan berhasil,

apabila pendidik mengaplikasikan sikap dan cara berpikir kewarganegaraan kenegarawanan dalam proses membelajarkan peserta didiknya, yang ditandai dengan menumbuhkan rasa ingin tahu, mencintai kebenaran ilmiah, menghargai pendapat dan gagasan orang lain dan sebagai partner berpikir peserta didiknya.

DAFTAR PUSTAKA

Driyarkara *Karya Lengkap Driyarkara, Esai Esai Filsafat Pemikiran yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsaanya*, Penyunting Sudiarja Sj dkk.

Kaelan, 2002, *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa, Paradigma*, Yogyakarta.

Latif Yudi, (2011) *Negara Paripurna, Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, PT Gramedia Pustaka Utama,

2014, *Mata Air Keteladanan Pancasila dlam Perbuatan*, Mizan Jakarta,

Suwarma AL Muchtar(2000) *Pendidikan dan Masalah Sosial Budaya*. Bandung Gelar Pustaka Mandiri

2013 *Filsafat Ilmu Gelar Pusataka Mandiri*, Bandung

(2002) *Revitalisasi Etika Demokrasi dalam Mencerdaskan Kehidupan Bangsa*, FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia

2010 *Filsafat hukum*, Gelar Pusataka Mandiri, Bandung

2017 *Pendidikan Kewarganegaraan, Refleksi Inovasi dan Revitalisasi Pendidikan Kewarganegaraan*, Universitas pendidikan Indonesia, Bandung

2018, *Ilmu Kewarga Negaraan, Aksiologis dan Konstruksi Nilai Pancasila dalam Pendidikan Kewarganegaraan, Laboratorium Pendidikan Kewarganegaran*, Universitas Pendidikan Indonesia

2018. *Filsafat Politik*, Gelar Pustaka Mandiri, Bandung

Tessa Andini (2018) Permatasari, *Membangun Karakter Bangsa di Era milenial*, <http://www.tribunnews.com/tribunners/2018/05/27/membangun-karakter-bangsa-di-era-milenial>.

MEMBENTUK GENERASI MUDA MILENIAL BERKARAKTER PANCASILA DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Cecep Darmawan

Abstrak

Artikel ini mendeskripsikan upaya pembentukan generasi muda milenial yang berkarakter Pancasila di era revolusi industri 4.0. Era revolusi industri keempat antara lain ditandai dengan adanya digitalisasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perkembangan ini mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu pesat. Generasi muda milenial dengan berbagai ikonnya memiliki potensi dan tantangan dalam menghadapi kemajuan iptek di era ini. Akan tetapi berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di era revolusi industri keempat ini, justru menimbulkan kekhawatiran pada sikap, mental, dan perilaku generasi muda milenial. Untuk itu perlu adanya upaya untuk membentuk generasi muda milenial yang berkarakter Pancasila di era revolusi industri 4.0. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui tiga jalur utama yakni, keluarga, peer group (komunitas) dan pendidikan sekolah formal (baik secara kurikuler, co-kurikuler, maupun ekstrakurikuler).

Kata kunci : generasi muda, milenial, revolusi industri, karakter pancasila, pendidikan.

A. Pendahuluan

Generasi muda milenial adalah generasi masa kini yang memiliki tantangan sendiri dalam menyambut era revolusi industri 4.0. Bagi Bangsa Indonesia sendiri, generasi milenial ini akan bersentuhan dengan prediksi bonus demografi pada tahun 2030. Lalu, apa yang disiapkan bangsa ini menghadapi masa depan bagi kehidupan generasi mudanya di masa mendatang? Bukankah era revolusi industri keempat sudah kita rasakan dan hadir dalam kehidupan kita saat ini. Perubahan dari perkembangan teknologi yang serba digital ini menerpa kehidupan kita. Generasi

muda milenial yang oleh para ahli dinyatakan memiliki karakteristik *digital native* sudah seyogianya menyiapkan diri untuk mampu memanfaatkan sekaligus merekayasa kondisi masa kini untuk kehidupan masa depan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini sebuah keniscayaan yang harus disikapi secara arif dan bijaksana guna mengantisipasi hadirnya era bonus demografi dikemudian hari. Sesuai dengan data BPS (dalam Lalo, 2018, hlm. 72) menjelaskan "saat ini terdapat 50% penduduk adalah usia produktif dan berasal dari generasi milenial dan akan mencapai angka 70 % dari

penduduk usia produktif pada tahun 2020 sampai 2030.”

Selain optimisme, kita juga mengalami kekhawatiran bahwa maju dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini yang tidak diimbangi dengan menguatnya karakter Pancasila. Eksistensi dan peran Pancasila justru menjadi penting dalam memfilter nilai-nilai negatif dari luar agar diri warga negara khususnya pada generasi muda milenial tetap berjiwa Pancasila. Sebagaimana Baureh (2018, hlm. 341) mengemukakan:

“Berbagai pelanggaran etika dan hukum yang terjadi akibat degradasi nilai-nilai Pancasila di era milenial menimbulkan keprihatinan tersendiri bagi kaum pendidik dan pemerhati nilai-nilai luhur bangsa. Pancasila merupakan pedoman pembentukan karakter bangsa yang bermoral dan beradab, berprikemanusiaan dan bernilai.”

Lebih lanjut Baureh (2018, hlm. 341) menjelaskan bahwa “pada perkembangannya di era milenial, perilaku manusia dalam kehidupan sosial seolah mulai menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, diantaranya memperlakukan manusia tidak pada hakikatnya sebagai manusia. Penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia seolah diabaikan dalam pergaulan hidup masyarakat.” Padahal menurut Hariyanto (2019) “tujuan awal pembentukan bangsa Indonesia adalah masyarakat Pancasila, dan bila ingin mencapai

‘Indonesia Emas 2045’, tujuan masyarakat itu harus diwujudkan.”

Untuk menyongsong Indonesia Emas, generasi milenial tidak boleh buta politik. Sebab, Tidaklah benar kalau ada orang yang mengatakan bahwa politik itu kotor, haram, penuh intrik, dan harus dihindari. Bukankah, manusia adalah makhluk politik. Politik itu hanya instrumen atau media semata, yang membuat politik itu baik dan buruk adalah orangnya atau aktornya. Oleh karenanya, setiap kita harus berupaya agar politik diisi oleh orang-orang baik, melalui berbagai bentuk partisipasi politik sesuai dengan profesi dan posisi kita masing-masing, sehingga politik menjadi sarana memaksimalkan kebaikan. Generasi milenial pun tidak boleh menjadi “golongan putih” atau golput dalam pemilu, sebab ketika kita golput, kita sedang memberi “cek kosong” kepada penguasa untuk membuat kebijakan politik. Kita tidak boleh menjadi orang-orang yang termarjinalkan secara politik apalagi “buta politik”. (Darmawan, 2017)

Selain itu, generasi Milenial harus melek politik dan paham terhadap kondisi kekinian. Menurut Thomas Lickona (dalam Megawangi, 2014, hlm. 8), terdapat sepuluh indikator suatu bangsa menuju ke jurang kehancuran, yaitu: (1) meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, (2) penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk, (3) pengaruh *peer group* yang kuat dalam tindak kekerasan, (4) meningkatnya perilaku merusak diri seperti penggunaan narkoba, alkohol dan seks bebas, (5) semakin kaburnya

pedoman moral baik dan buruk, (6) menurunnya etos kerja, (7) semakin rendahnya rasa hormat kepada orangtua dan guru, (8) rendahnya rasa tanggung jawab individu dan negara, (9) membudayannya ketidak jujuran, (10) adanya rasa saling curiga dan kebencian di antara sesama.

Bahkan generasi milenial harus menghindari "tujuh dosa" yang sangat berbahaya bagi kehidupan. Sudarsono (dalam Budimansyah,, 2012,) mengutip pandangan Ghandi bahwa ada 'tujuh dosa yang mematikan' (*the seven deadly sins*) yaitu (1) semakin merebaknya nilai-nilai dan perilaku memperoleh kekayaan tanpa bekerja (2) kesenangan tanpa hati nurani (3) pengetahuan tanpa karakter (4) bisnis tanpa moralitas (5) ilmu pengetahuan tanpa kemauan (6) agama tanpa pengorbanan (7) politik tanpa prinsip.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan pokok yang diangkat dalam penulisan makalah ini, yaitu bagaimana kondisi generasi muda milenial di era revolusi industri 4.0 sekaligus bagaimana upaya membentuk generasi muda milenial berkarakter Pancasila di era revolusi industri 4.0?

B. Definisi Generasi Muda Milenial

Generasi muda milenial merupakan generasi muda yang karakteristik khas kekinian yang membedakan dengan generasi sebelumnya. Selain usianya yang relatif amat muda, jiwa muda, ekspresif, energik, dan aktif di media sosial, generasi ini pun harus

mempersiapkan dirinya untuk kurun waktu belasan atau dua puluh tahun ke depan. Ada pandangan ahli yang cukup menarik, misalnya Absher dan Amidjaya (dalam Lalo, 2018, hlm. 72) menyatakan bahwa "generasi milenial berkisar antara 1982 sampai 2002 dan mengalami *google generation*, *net generation*, *generation Z*, *echo boomers*, dan *dumbest generation*." Lebih lengkap Baureh (2018, hlm. 342) mengemukakan bahwa:

"Milenial merupakan suatu istilah yang menunjuk pada suatu masa/periode. Istilah ini pertama kali dicetuskan oleh dua pakar sejarah dan juga penulis Amerika, William Strauss dan Neill Howe dalam beberapa bukunya. Milenial merupakan pelabelan bagi kelompok orang yang lahir, hidup, tumbuh dan berkembang pada masa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu mereka yang lahir antara tahun 1980 sampai dengan tahun 2000. Selain istilah/pelabelan milenial, juga dikenal beberapa istilah periode/masa kehidupan seseorang, yaitu *baby boomers*, generasi x, generasi z. generasi milenial (generasi y) berada antara generasi x dan generasi z."

Adapun ciri dan karakteristik khusus dari generasi muda milenial sebagaimana dikemukakan Tapscott (dalam Lalo, 2018, hlm. 72) bahwa "generasi milenial sering disebut generasi Z dengan ciri suka dengan kebebasan, senang melakukan personalisasi, mengandalkan

kecepatan informasi yang instan, suka belajar dan bekerja dengan lingkungan inovatif, aktif berkolaborasi dan *hypertechnology*.”

Sementara itu berdasarkan Studi Boston Consulting Group dan Universitas Berkley Amerika, (dalam Baureh, 2018, hlm. 342) “ciri-ciri generasi milenial adalah orang yang lahir pada tahun 1980-2000, mahir teknologi, lebih memilih ponsel daripada televisi, media social dijadikan sebagai sarana komunikasi/pusat informasi, minat membaca konvensional menurun, serta *google search* sebagai keluarga.”

Mereka inilah yang akan mengisi kehidupan bangsa ke depan sehingga perlu penyiapan diri yang mapan dengan penguatan jiwa dan karakter positif sehingga kuat dan mapan menghadapi era ke depan.

C. Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0

Zaman sudah berubah dan kita sedang memasuki era baru yakni revolusi industri 4.0 dengan ditandai digitalisasi di berbagai bidang kehidupan. Era revolusi Industri 4.0 tidak hanya telah mengakibatkan berubahnya cara manusia berpikir dan cara hidupnya melainkan juga dengan pola interaksi antar manusia.

Adanya revolusi industri keempat ini merupakan rangkain sejarah yang tak perah putus. Zaman terus bergulir dan tidak lepas dari masa lalu menuju masa depan. Hermann et al (2015) dan Irianto (2017)(dalam Yahya, 2018, hlm. 2) menjelaskan bahwa:

“Perkembangan revolusi industri sendiri sudah terjadi sejak abad ke-17. Sejarah revolusi industri dimulai dari industri 1.0, 2.0, 3.0, hingga industri 4.0. Fase industri merupakan *realchange* dari perubahan yang ada. Industri 1.0 ditandai dengan mekanisasi produksi untuk menunjang efektifitas dan efisiensi aktivitas manusia, industri 2.0 dicirikan oleh produksi massal dan standarisasi mutu, industri 3.0 ditandai dengan penyesuaian massal dan fleksibilitas manufaktur berbasis otomasi dan robot. Industri 4.0 selanjutnya hadir menggantikan industri 3.0 yang ditandai dengan cyber fisik dan kolaborasi manufaktur.”

Pandangan Hermann et al (2015) dan Irianto di atas, dipertegas oleh Lee et al (dalam Yahya, 2018, hlm. 2-3) bahwa, “industri 4.0 ditandai dengan peningkatan digitalisasi manufaktur yang didorong oleh empat faktor: 1) peningkatan volume data, kekuatan komputasi, dan konektivitas; 2) munculnya analisis, kemampuan, dan kecerdasan bisnis; 3) terjadinya bentuk interaksi baru antara manusia dengan mesin; dan 4) perbaikan instruksi transfer digital ke dunia fisik, seperti robotika dan *3D printing*.” Sementara itu, Lifter dan Tschienner (dalam Yahya, 2018, hlm. 3) menambahkan, “prinsip dasar industri 4.0 adalah penggabungan mesin, alur kerja, dan sistem, dengan menerapkan jaringan cerdas di sepanjang rantai dan proses produksi untuk mengendalikan satu

sama lain secara mandiri.”

Kini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah begitu pesat dan jika tidak diimbangi oleh kekuatan mental spiritual yang handal, kita khawatir akan melahirkan generasi yang lemah karakter dan kekuatan bangsapun akan ikut lemah. Oleh karenanya Jepang sudah memperkenalkan konsep istilah baru dalam memperkenalkan revolusi masyarakat yang baru yakni Society 5.0. Dalam Pertemuan Tahunan Forum Ekonomi Dunia 2019 di Davos, Swiss, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe (dalam Prima, 2019) menjelaskan “visi baru Jepang, yakni *Society 5.0*”, yang menurut Kantor Kabinet Jepang, (dalam Prima, 2019) didefinisikan sebagai:

“Sebuah masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang sangat mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik. Society 5.0 diusulkan dalam Rencana Dasar Sains dan Teknologi ke-5 sebagai masyarakat masa depan yang harus dicita-citakan oleh Jepang. Ini mengikuti tahapan masyarakat berburu (*Society 1.0*), masyarakat pertanian (*Society 2.0*), masyarakat industri (*Society 3.0*), dan masyarakat informasi (*Society 4.0*). Dalam masyarakat informasi (*Society 4.0*), berbagi pengetahuan dan informasi lintas bagian tidak cukup, dan kerja sama itu sulit. Adapun Society 5.0 mencapai tingkat konvergensi

yang tinggi antara ruang maya (ruang virtual) dan ruang fisik (ruang nyata). Dalam Society 4.0, orang akan mengakses layanan *cloud* (basis data) di dunia maya melalui internet. Di Society 5.0, sejumlah besar informasi dari sensor di ruang fisik terakumulasi di dunia maya. Di dunia maya, data besar ini dianalisis dengan kecerdasan buatan (AI), dan hasil analisis diumpungkan kembali ke manusia dalam ruang fisik dalam berbagai bentuk.”

Itulah pentingnya memadukan kekuatan teknologi dengan kemampuan karakter positif manusiannya untuk mengendalikan zaman. Kekuatan karakter pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsa akan menjadi modal sosial bagi kemajuan bangsa di era apapun.

D. Nilai-Nilai Pancasila

Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa, memiliki sejumlah nilai luhur didalamnya. Pancasila merupakan sistem dan sumber nilai bagi kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Pancasila memiliki tiga nilai pokok, yakni nilai dasar atau nilai ideal, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar atau nilai ideal bersifat relatif tetap, tidak berubah dan bersifat universal yakni nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan social. Sementara itu, nilai instrumental adalah nilai jabaran dari nilai dasar atau parameter yang

berupa norma hukum yang bersifat dinamis, fleksibel, dan kreatif. Karena dinamis, nilai ini kontekstual sehingga akan menyesuaikan dengan waktu dan tempat. Konstitusi dan peraturan perundang undangan termasuk dalam kategori ini. Sedangkan nilai praksis adalah implementasi dari nilai instrumental. Nilai ini ada dalam praktika kehidupan sehari-hari. Nilai ini pun dapat cepat berubah-ubah dalam konteks ruang dan waktu.

Nilai-nilai fundamental tercantum dalam kelima sila yang bersifat utuh. Nilai-nilai Pancasila tersebut adalah sebagaimana dijelaskan oleh Danniarti (2017, hlm. 193-194):

1. Nilai Ketuhanan

Nilai Ketuhanan mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Nilai ini menyatakan bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius bukan bangsa yang ateis.

2. Nilai Kemanusiaan

Nilai Kemanusiaan mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya, dan adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia.

3. Nilai Persatuan

Nilai Persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan atau kesadaran rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Kesadaran bersatu itu tercipta dengan baik jika sungguh-sungguh menghayati semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

4. Nilai Kerakyatan

Nilai Kerakyatan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga lembaga perwakilan. Nilai ini menganut paham demokrasi.

5. Nilai Keadilan

Nilai Keadilan mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah ataupun batiniah. Keadilan adalah nilai yang amat mendasar yang diharapkan oleh seluruh bangsa.

Selanjutnya, Danniarti (2017) menjelaskan bahwa:

Kelima nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam berbagai peraturan perundangan, ketetapan, keputusan, kebijakan pemerintah, program-program pembangunan dan peraturan-peraturan. Penjabaran nilai-nilai itu disebut nilai instrumental. Hal ini disebabkan nilai-nilai dasar dari Pancasila merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan menjiwai satu sama lain. Selain itu, semua nilai dasar dari sila-sila Pancasila tersebut harus menjadi acuan dalam penyelenggaraan bernegara

Kelima nilai dasar Pancasila merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat Pancasila khususnya di kalangan generasi muda milenial menuju Indonesia yang adil makmur. Terlebih di era revolusi industri 4.0 seperti saat ini, jika perkembangan teknologi tidak diimbangi dengan penanaman nilai-nilai Pancasila maka generasi muda milenial yang berkarakter sulit diwujudkan, bahkan, disrupsi teknologi akan mengancam masa depan generasi muda milenial.

Generasi millenial harus memahami bahwa seluruh produk peraturan perundang-undangan harus didasari oleh Pancasila dan seluruh pratika kehidupan penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu setiap membentuk dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika, mengandung arti bahwa Indonesia adalah mozaik kebhinnekaan yang penuh dengan warna warni multikultural, multi etnis, dan beragam agama, serta pluralitas dalam kehidupan sosial kulturalnya. Indonesia tidak mengenal warga negara kelas satu. Juga tidak mengenal warga negara kelas dua. Semua warga negara sama kedudukannya dan memiliki tanggung jawab yang sama untuk memperjuangkan, merawat, dan mempertahankan kedaulatan Indonesia sebagai bangsa yang tetap utuh, kokoh dan penuh toleransi yang

harmonis. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika mengandung arti persaudaraan bersama seluruh anak bangsa, memiliki kesetaraan, dan saling menghormati atas perbedaan dan kemajemukan. NKRI layaknya rumah besar bagi semua anak bangsa yang penuh dengan suasana persaudaraan kebangsaan (Darmawan, 2018).

Dalam hal pelebagaan dari kebebasan, demokrasi Pancasila menyaratkan pentingnya dua hal, pertama menyangkut prinsip bahwa kebebasan dibatasi oleh hak orang lain yang tidak boleh dilanggar atas dasar kebebasan, dan yang kedua, bahwa kebebasan haruslah memiliki dasar yuridis dan konsensus melalui peraturan atau konstitusi. Kedua hal inilah sesungguhnya melekat dalam prinsip demokrasi Pancasila secara yang terlembaga. Praktek demokrasi Pancasila dibatasi oleh konstitusi dan aturan sebagai wujud kesepakatan warga bangsa dan implementasi nilai-nilai demokrasi Pancasila yang termuat dalam konstitusi. (Darmawan, 2015).

E. Tiga Jalur Utama Membentuk Generasi Muda Milenial Berkarakter Pancasila

Sebelum membahas tiga jalur utama membentuk generasi muda milenial berkarakter Pancasila, kita pahami dulu pada itu karakter. Menurut Hidayah(2015, hlm. 193-194). istilah karakter berasal dari bahasa Yunani *charassei* yang berarti mengukir hingga terbentuk pola dan 'to mark' (menandai). Selanjutnya

Hidayah menjelaskan dalam istilah watak atau karakter itu terkandung adanya makna sifat-sifat yang ada dan melekat pada diri setiap individu, dan hal ini dapat dilihat dari pola tingkah laku dan cara berpikirnya.

Sementara, Lickona dalam Megawangi (2004: 113) mendefinisikan fungsi karakter sebagai berikut :

Orang yang berkarakter sebagai sifat alami seseorang dalam merespons situasi secara bermoral yang dimanifestasikan dalam tindakan nyata melalui tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati orang lain dan karakter mulia lainnya. Pengertian ini mirip dengan apa yang diungkapkan oleh Aristoteles, bahwa karakter itu erat kaitannya dengan "habit" atau kebiasaan yang terus menerus dilakukan.

Dalam konteks politik, generasi muda milenial tidak boleh buta politik. Berpolitik artinya keniscayaan, bahwa tidak ada orang yang tidak terlibat aktifitas politik sekecil apa pun, setidaknya membicarakan masalah politik dalam keseharian. Politik hadir di ruang publik manapun. Manusia adalah mahluk politik (*zoon politicon* menurut Aristoteles) dan memiliki hasrat atau motivasi ingin berkuasa (*need for power* menurut David McClelland) (Darmawan, 2017).

Harus dipahami bahwa berpolitik bagi generasi muda adalah aktifitas politik dalam penentuan sikap politik atau pilihan politik seseorang terhadap situasi yang sedang berkembang,

termasuk memilih untuk tidak memilih dalam politik merupakan sikap politik. Memilih untuk tidak memilih sekalipun, politik tetap hadir dan mempengaruhi kita (Darmawan, 2017).

Dengan kata lain, politik adalah aktifitas kemanusiaan untuk mencapai kebaikan bersama yang oleh Aristoteles disebut kebaikan bersama (*general will*) atau kepentingan publik. Menurut saya, kata *general will* dari Aristoteles itu bermakna sama dengan kata "*la volonté générale* " atau kehendak umum yang diungkapkan oleh Jaen Jacques Rousseau. Menurut Rousseau kebajikan bersama atau *civic virtue* disandingkan dengan kata "*la volonté générale*". Saking pentingnya "*la volonté générale*" itu, maka ia tidak bisa diwakilkan oleh lembaga perwakilan (Darmawan, 2017)

Tujuan utama berdirinya bangsa Indonesia adalah untuk menciptakan masyarakat Pancasila yang adil makmur lahir batin. Masyarakat Pancasila merupakan masyarakat Indonesia yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bernasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk itu perlu adanya upaya untuk membentuk generasi muda milenial yang berkarakter Pancasila, karena kedepannya merekalah yang akan memegang estafet kepemimpinan dalam membangun bangsa dan negara Indonesia.

Dalam membentuk generasi muda milenial yang berkarakter Pancasila setidaknya dapat ditempuh melalui tiga jalur utama. *Pertama*, melalui

keluarga. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang ada di masyarakat. Menurut Rasyidin, dkk, (2014, hlm. 113) "dalam menjalankan fungsinya, keluarga memiliki berbagai fungsi antara lain fungsi afeksi, fungsi biologis, fungsi ekonomi, fungsi pendidikan, fungsi religius dan fungsi rekreasi."

Untuk itu keluarga memiliki posisi yang strategis dalam membentuk generasi muda milenial yang berkarakter Pancasila. Hal tersebut dikarenakan keluarga merupakan tempat pendidikan pertama dan utama bagi seorang anak sebelum hidup di masyarakat yang lebih luas dan kompleks. Keluarga dapat menanamkan nilai-nilai karakter Pancasila secara efektif dalam kehidupan sehari-hari dirumah. Disinilah peran orang tua sebagai teladan bagi anaknya.

Kedua, melalui *peer group* (komunitas), biasanya menjadi wadah berinteraksi bagi generasi muda milenial untuk mengekspresikan potensi dan kehidupannya sekaligus. Menurut para ahli, karakteristik generasi muda milenial antara lain lebih sering berkumpul dan bergaul dengan teman-teman sebayanya. Apalagi di era perkembangan teknologi digital seperti saat ini, pergaulan bukan hanya di lingkungan tempat tinggalnya, akan tetapi sudah mencakup lintas batas lingkungan dan negara sekalipun. Teknologi informasi amat terbuka dan menjadi garda pergaulan lebih luas dan massif. Untuk itu agar generasi muda milenial tidak terjerumus dalam pergaulan

dan interaksi yang negatif baik dikehidupan sehari-hari maupun di media sosial, sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila pada diri mereka. Disinilah pentingnya dilakukan seperti melalui sosialisasi, penyuluhan, seminar, mengadakan pertemuan *peer group* yang positif agar mereka tidak lepas dari karakter bangsa Indonesia yang terdapat dalam nilai-nilai Pancasila.

Ketiga, melalui pendidikan formal sekolah baik secara kurikuler, co-kurikuler maupun ekstrakurikuler. Pendidikan khususnya sekolah formal merupakan sarana utama untuk membangun sumber daya generasi muda yang berkarakter Pancasila. Penanaman nilai-nilai serta pembentukan karakter Pancasila dalam pendidikan di sekolah dapat dilakukan baik secara kurikuler, co-kurikuler maupun ekstrakurikuler. Secara kurikuler, pembentukan generasi muda milenial yang berkarakter Pancasila dapat dilakukan diantaranya melalui mata pelajaran atau mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan juga mata pelajaran atau mata kuliah lainnya. Secara co-kurikuler, dapat dilakukan melalui tugas-tugas yang diberikan oleh guru/dosen untuk lebih mengerti, memahami, menghayati, dan mengamati serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan. Kemudian secara ekstrakurikuler dapat dilakukan melalui organisasi ekstrakurikuler yang ada di sekolah/kampus sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh setiap anak.

Ketiga jalur tersebut merupakan sarana penting dalam membentuk generasi muda milenial yang memiliki karakter Pancasila. Ketiga jalur tersebut baik melalui keluarga, *peer group* (komunitas), maupun sekolah harus saling terintegrasi dan terkoordinasi serta bersinergi positif, sehingga semuanya berjalan beriringan secara harmonis dan terintegrasi. Hal tersebut dikarenakan pembentukan karakter Pancasila pada diri generasi muda tidak dapat dilakukan oleh satu jalur saja atau parsial, maka perlu adanya sinergi dari semua pihak dalam pelaksanaannya.

Pembentukan masyarakat yang berkarakter Pancasila merupakan suatu kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia. Soedarsono menceritakan (dalam Lalo, 2018, hlm. 74) bahwa "Bung Karno yang menggelorakan tema besar "*nation and character building*" pernah berpesan kepada kita bangsa Indonesia, bahwa tugas berat untuk mengisi kemerdekaan adalah membangun karakter bangsa. Apabila pembangunan karakter bangsa ini tidak berhasil, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa kuli." Dengan demikian apabila ini tidak dilakukan, kita justru akan kehilangan kesempatan dan peluang untuk mengambil manfaat di era revolusi industri keempat dan bonus demografi.

F. Penutup

Pada saat ini Indonesia memasuki era revolusi industri keempat dan juga bonus demografi. Dalam menghadapi era tersebut, generasi muda milenial yang memiliki peranan penting dalam waktu mendatang. Generasi muda milenial saat ini perlu ditanamkan nilai-nilai luhur Pancasila seperti nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Hal tersebut dilakukan agar mereka memiliki karakter yang Pancasila.

Generasi muda milenial yang terbiasa dengan perkembangan teknologi (*digital native*) perlu didukung dengan upaya pembentukan karakter Pancasila melalui tiga jalur utama pembinaan. Upaya untuk membentuk generasi muda milenial yang berkarakter Pancasila dapat dilakukan melalui tiga pranata sosial yang ada di masyarakat yakni keluarga, *peergroup* (komunitas atau teman sebaya) serta melalui lembaga pendidikan formal persekolahan baik ditanamkan secara kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstrakurikuler.

DAFTAR PUSTAKA

Baureh, M.G. (2018). Dampak Yuridis Degradasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sosial Di Era Milenial. *Dalam Prosiding Sintesa*.(hlm. 339-346). Manado: LP2M-UNDHIRA BALI.

Danniarti, R. (2017). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Pendukung Tumbuh Kembang Wawasan Kebangsaan Pada Mata Pelajaran Ppkn Di Smp Negeri 7 Palembang. *Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan*. 2 (2), hlm.187-203.

Darmawan, C. (2015). *Demokrasi di Persimpangan Makna*. Makalah dalam Simposim Nasional PKN UPI di Bandung.

Darmawan, C. (2017). *Optimalisasi Fungsi-Peran DPR RI: Perspektif Ilmu Politik*. Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Politik di Universitas Pendidikan Indonesia.

Darmawan, C. (2018). *Demokrasi Pancasila Dalam Bidang Politik*, Makalah Simposium Nasional yang diadakan oleh Badan Keahlian DPR RI.

Hariyanto, I. (2019). *Try Sutrisno: 73 Tahun Merdeka tapi Masyarakat Pancasila Belum Terwujud*. [Online]. Diakses dari <https://m.detik.com/news/berita/d-4433790/try-sutrisno-73-tahun-merdeka-tapi-masyarakat-pancasila-belum-terwujud>.

Hidayah, N. (2015). Penanaman Nilai-Nilai Karakter Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*. 2 (2), hlm.190-204.

Lalo, K. (2018). Menciptakan Generasi Milenial Berkarakter dengan Pendidikan Karakter Guna Menyongsong Era Globalisasi. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 12 (2), hlm.68-75.

Megawangi, R. (2014). *Pendidikan Karakter : Solusi Yang Tepat Untuk Membangun Bangsa*. Jakarta: Star Energy (Kakap) Ltd.

Prima, E. (2019). *Mengenal Visi Jepang Society 5.0: Integrasi Ruang Maya dan Fisik*. [Online]. Diakses dari <https://tekno.tempo.co/read/1170120/mengenal-visi-jepang-society-5-0-integrasi-ruang-maya-dan-fisik>.

Rasyidin, W. dkk.(2014). *Landasan Pendidikan*. Bandung: Sub Koordinator MKDP Landasan Pendidikan Jurusan Pedagogik FIP UPI.

Yahya, M. (2018). Era Industri 4.0: Tantangan Dan Peluang Perkembangan Pendidikan Kejuruan Indonesia. Dalam Orasi Ilmiah Professor bidang Ilmu Pendidikan Kejuruan. Makasar: Universitas Negeri Makassar.

TRANSFORMASI NILAI-NILAI KEBANGSAAN KEPADA GENERASI MUDA INDONESIA PADA ERA DIGITAL

Dasim Budimansyah

Abstrak

Merefleksi tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia dapat diambil pelajaran bahwa konsepsi dan cita-cita ideal harus terus dipupuk dan dilestarikan sebagai landasan moralitas bagi kebesaran negara-bangsa. Tantangan terbesar pada era digital adalah bagaimana nilai dan sikap kebangsaan yang telah dicontohkan oleh para pejuang, senantiasa terpatri dalam sanubari setiap anak bangsa. Paling tidak ada dua instrumen yang perlu disiapkan untuk dapat menghadapi tantangan tersebut, yaitu nilai-nilai kebangsaan harus sudah mempribadi pada sanubari manusia Indonesia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan menjadikan Indonesia sebagai pemenang dalam kompetisi global. Strategi yang perlu dipertimbangkan untuk menguasai dua instrumen tersebut adalah: (1) Mewujudkan pelestarian (preservation) dan pemajuan (advancement) nilai-nilai kebangsaan Indonesia; (2) Mewujudkan proses internalisasi nilai-nilai kebangsaan Indonesia melalui program intervensi sosial politik; (3) Mewujudkan program sosialisasi nilai-nilai kebangsaan Indonesia melalui program kurikuler, gerakan sosial kultural, dan intervensi sosial politik untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkapasitas unggul; dan (4) Mewujudkan pembentukan lembaga nasional yang bertanggung jawab terhadap penyelarasan nilai-nilai kebangsaan Indonesia sebagai bagian dari sistem politik nasional.

Pendahuluan

Bung Karno pernah menyatakan bahwa arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. "Jika mereka tidak memilikinya atau jika konsepsi dan cita-cita menjadi kabur dan usang, bangsa itu berada dalam keadaan yang berbahaya" (Soekarno, 1989). Pentingnya cita-cita ideal sebagai landasan moralitas bagi kebesaran bangsa diperkuat oleh cendekiawan-politisi Amerika Serikat, John Gardner:

"No nation can achieve greatness unless it believes in something, and unless that something has moral dimensions to sustain a great civilization" (Madjid, 1992). Melalui transformasi nilai-nilai kebangsaan, akan tumbuh pemahaman cita-cita luhur para *founding father* tentang konsep pendirian negara Indonesia yang harus dilestarikan dengan nilai-nilai kebangsaan yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita (Latif, 2011).

Dari pandangan hidup ini dapat diketahui cita-cita yang ingin dicapai bangsa, gagasan-gagasan kejiwaan

apakah yang hendak diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketika para pendiri negara Indonesia menyiapkan negara Indonesia yang merdeka, mereka sadar sepenuhnya untuk menjawab suatu pertanyaan dasar, “ di atas dasar apakah negara Indonesia merdeka didirikan?”. Dengan jawaban yang mengandung makna hidup bagi bangsa Indonesia sendiri yang merupakan perwujudan dan pengejawantahan nilai-nilai yang dimiliki diyakini dan dihayati kebenarannya oleh masyarakat sepanjang masa dalam sejarah perkembangan dan pertumbuhan bangsa sejak lahir (Kaelan, 2013).

Salah satu tantangan pada era digital yang merupakan konsekuensi dari perkembangan dunia akibat revolusi industri 4.0 adalah bagaimana nilai dan sikap kebangsaan yang telah dicontohkan oleh para pejuang, harus senantiasa terpatri dan tertanam di dalam jiwa setiap anak bangsa. Pada era digital yang sering kali dimaknai sebagai era disrupsi yakni salah satu ciri yang dibawa oleh Revolusi Industri 4.0 adalah era potong kompas, tidak mengenal *in the box thinking* dan selalu *out of the box thinking* dengan kreativitas dan inovasi yang bergerak dengan cepat dan lintas batas bahkan lintas pagar. Untuk menghadapi kondisi ini, manusia dan kita semua harus menguasai instrumen tertentu untuk menghindarkan diri dari berbagai dampak negatif era disrupsi itu, sebab disrupsi yg bergerak dengan cepat dan lintas batas dan lintas pagar itu selain membawa peluang jika tidak

waspada akan melahirkan dampak negatif, diantaranya tergerusnya jati diri bangsa Indonesia (Sesko TNI, 2018). Instrumen dimaksud adalah nilai-nilai kebangsaan yang sudah mempribadi pada sanubari manusia Indonesia disamping instrumen lainnya, yakni penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan menjadikan Indonesia sebagai pemenang dalam kompetisi global. Implementasinya diharapkan tidak hanya sekedar melahirkan diskursus, tetapi harus nyata berupa kontribusi positif dalam pembangunan negara bangsa (*nation-state*).

Merefleksi Kembali Tonggak Sejarah Perjuangan Bangsa

1. Boedi Oetomo

Sejarah pergerakan nasional tumbuh di Indonesia dimulai setelah berdirinya Boedi Oetomo. Pada awalnya organisasi Boedi Oetomo yang sudah terbentuk pada tanggal 20 Mei tahun 1908 merupakan organisasi yang bersifat kedaerahan sehingga tidak optimal berkontribusi dalam menumbuhkan nasionalisme di seluruh kalangan masyarakat. Nasionalisme berarti jiwa dan semangat kehidupan berbangsa yang mengatasi berbagai golongan (Soekarno, 1960). Boedi Oetomo melakukan berbagai upaya dalam menumbuhkan nasionalisme di seluruh wilayah Hindia Belanda pada waktu itu. Boedi Oetomo mendorong pembentukan Volksraad (Dewan Rakyat) pada masa penjajahan Belanda. Karena adanya faktor

pendukung di atas maka di wilayah nusantara (Hindia Belanda) mulai muncul semangat nasionalisme. Semangat nasionalisme ini digunakan sebagai ideologi/paham bagi organisasi pergerakan nasional yang ada.

Selanjutnya ideologi nasional di Indonesia diperkenalkan oleh Partai Nasional Indonesia (PNI) yang diketuai oleh Ir. Soekarno. PNI bertujuan untuk memperjuangkan kehidupan bangsa Indonesia yang bebas dari penjajahan. Adapun cita-citanya adalah mencapai Indonesia merdeka dan berdaulat, serta mengusir penjajahan Belanda di Indonesia.

Dengan diadakannya nasionalisme sebagai ideologi, maka nasionalisme menunjukkan bahwa suatu bangsa memiliki kesamaan budaya, bahasa, wilayah serta tujuan dan cita-cita. Hal ini akan menumbuhkan rasa kesetiaan yang mendalam terhadap kelompok bangsa tersebut. Sebagai upaya menumbuhkan rasa nasionalisme di Indonesia diawali dengan pembentukan identitas nasional yaitu dengan adanya penggunaan istilah "Indonesia" untuk menyebut suatu bangsa di wilayah nusantara yang selanjutnya istilah Indonesia dipandang sebagai identitas nasional, lambang perjuangan bangsa dalam menentang penjajahan.

Indonesia merupakan kata yang mampu mempersatukan bangsa dalam melakukan perjuangan dan pergerakan melawan penjajahan, sehingga segala bentuk perjuangan dilakukan demi kepentingan Indonesia bukan atas nama daerah lagi. Melalui

Sumpah Pemuda kata Indonesia dijadikan sebagai identitas kebangsaan yang diakui oleh setiap suku bangsa, organisasi-organisasi pergerakan yang ada di wilayah nusantara maupun yang di luar Hindia Belanda. Kata Indonesia dikukuhkan kembali dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 (<https://id.wikipedia.org>).

2. Sumpah Pemuda

Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Yang dimaksud dengan "Sumpah Pemuda" adalah keputusan Kongres Pemuda Kedua yang diselenggarakan dua hari, 27-28 Oktober 1928 di Batavia (Jakarta). Keputusan ini menegaskan cita-cita akan ada "tanah air Indonesia", "bangsa Indonesia", dan "bahasa Indonesia". Keputusan ini juga diharapkan menjadi asas bagi setiap "perkumpulan kebangsaan Indonesia" dan agar "disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan". Istilah "Sumpah Pemuda" sendiri tidak muncul dalam putusan kongres tersebut, melainkan diberikan setelahnya. Berikut ini adalah bunyi tiga keputusan kongres tersebut yang menggunakan ejaan van Ophuysen yaitu :

- a. Pertama, kami poetra dan poetri Indonesia, mengakoe bertoeumpah darah jang satoe, tanah Indonesia.
- b. Kedoea, kami poetra dan poetri

Indonesia mengakoe berbangsa yang satoe, bangsa Indonesia.

- c. Ketiga, kami poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia.

Sumpah pemuda merupakan suatu peristiwa bersejarah yang sangat penting dalam mencapai kemerdekaan Indonesia.

Semangat sumpah pemuda telah mempersatukan langkah perjuangan yang dahulunya bersifat kedaerahan menjadi semangat nasionalisme Indonesia. Dahulu, organisasi pemuda memiliki perbedaan bahasa, agama, adat istiadat, budaya dan suku bangsa. Sumpah Pemuda telah memberikan semangat persatuan dan kesatuan yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan dan kedaerahan. Nilai-nilai luhur sumpah pemuda meliputi (<http://tehkopijahe.blogspot.co.id>):

- a. Mementingkan rasa persatuan. Pada peristiwa sumpah pemuda, para pemuda Indonesia bersatu padu demi terwujudnya satu bangsa.
- b. Mengutamakan kepentingan bersama. Pada waktu sumpah pemuda, para pemuda kita (pada masa itu) tidak mementingkan daerah dan golongannya. Akan tetapi, mereka hanya memikirkan bagaimana agar Indonesia bisa bersatu. Kepentingan bersama yang mereka utamakan.
- c. Cinta tanah air. Pada peristiwa Sumpah Pemuda ada ikrar satu tanah air, satu bangsa dan menjunjung bahasa persatuan

yaitu bahasa Indonesia. Itulah wujud dari rasa cinta bangsa dan tanah air para pemuda zaman dulu.

- d. Rela berkorban. Para pemuda Indonesia dalam peristiwa sumpah pemuda telah mengorbankan banyak tenaga, pikiran, dan kebutuhan pribadinya demi untuk kepentingan banyak orang, berkorban untuk persatuan dan kemerdekaan bangsa Indonesia.
- e. Keberanian para pemuda Indonesia telah menunjukkan rasa keberaniannya dengan mengikrarkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Mereka tidak takut pada polisi Belanda yang saat itu tengah menjaga jalannya kongres.
- f. Menerima dan menghargai adanya perbedaan. Dalam peristiwa sumpah pemuda, ada banyak golongan pemuda dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Namun, perbedaan itu tidak dipermasalahkan. Semua diterima dan bersatu untuk mewujudkan satu bangsa yaitu bangsa Indonesia.
- g. Kekeluargaan dan persaudaraan. Kekeluargaan adalah sikap dan perbuatan yang mengutamakan kebersamaan dalam bergaul. Persaudaraan juga mencerminkan kebersamaan tanpa memandang latar belakang perbedaan. Sesama anak bangsa harus menganggap semua warga Indonesia sebagai satu keluarga dan bersaudara. Kepedulian

sosial dalam menghadapi musibah memunculkan semangat persaudaraan dan rasa empati terhadap korban musibahserta berupaya segera membantu orang lain sebagai saudara dan keluarga. Asas kekeluargaan mengutamakan kesejahteraan sosial di atas kepentingan pribadi maupun golongan (Mohammad Hatta dalam Swasono [ed], 1985).

Dari berbagai nilai luhur tersebut, nilai-nilai itu pada dasarnya merupakan perwujudan dari nilai persatuan. Makna dari Sumpah Pemuda adalah mengingatkan kepada seluruh komponen bangsa akan pentingnya nilai persatuan. Persatuan Indonesia sebagai bangsa yang besar memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa.

3. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945

Pada hakikatnya proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah merupakan tujuan semata-mata, tetapi merupakan suatu sarana, isi, arti yang terdapat dalam proklamasi pada pokoknya memuat dua hal:

- a. Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, baik pada dirinya sendiri maupun terhadap dunia luar;
- b. Tindakan-tindakan yang segera harus diselenggarakan berhubung dengan pernyataan kemerdekaan itu (Kaelan, 1993).

Para *founding fathers* memproklamasikan kemerdekaan

Indonesia dengan tujuan umum adalah mengubah **sistem feodalistik dan sistem kolonialis** menjadi **sistem modern dan sistem demokrasi** (Gonggong, 2002). Proklamasi kemerdekaan adalah suatu proklamasi politik yang menegaskan bahwa "Merdeka" adalah "mandiri". Dengan kata lain Proklamasi Kemerdekaan adalah pola proklamasi kemandirian, yang ditegaskan sebagai *onafhankelijkheid proclamatie*. Artinya "pernyataan kemerdekaan" adalah suatu "pernyataan budaya", yaitu pernyataan untuk memangku nilai-nilai budaya berdaulat, melepaskan diri dari ketergantungan-kemampuan *onafhankelijk* untuk menolak ketergantungan, menolak perhambaan sebagai "Koelie di Negeri Sendiri", sekaligus yang berketeguhan untuk tidak ragu menjadi "Tuan di Negeri Sendiri". Kesemuanya merupakan pernyataan budaya untuk meninggalkan ketertundukan dan melepas *underdog mentality*-nya kaum Inlander (Swasono, 2016). Perjuangan bangsa Indonesia ini kemudian dijiwai, disemangati, didasari oleh nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai-nilai luhur dalam sila-sila Pancasila sebagai dasar perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan.

4. Pancasila sebagai Dasar Negara

Dasar negara merupakan landasan kehidupan berbangsa dan bernegara yang keberadaannya wajib dimiliki oleh setiap negara dalam setiap detail kehidupannya. Dasar

negara bagi suatu negara merupakan suatu dasar untuk mengatur semua penyelenggaraan yang terbentuk dalam sebuah negara. Negara tanpa dasar negara berarti negara tersebut tidak memiliki pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Akibatnya negara tersebut tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas, sehingga memudahkan munculnya kekacauan atau anarki. Dasar Negara sebagai pedoman hidup bernegara mencakup norma bernegara, cita-cita negara, dan tujuan negara. Pancasila dalam kedudukannya ini sering disebut sebagai Dasar Filsafat atau Dasar Falsafah Negara (*Philosophische Grondslag*) dari Negara, ideologi Negara atau (*Staatsidee*). Pancasila merupakan sumber kaidah hukum Negara yang secara konstitusional mengatur Negara Republik Indonesia (cita hukum) beserta seluruh unsur-unsurnya yaitu rakyat, wilayah, beserta pemerintah Negara.

Pancasila sebagai dasar negara sering juga disebut sebagai *Philosophische Grondslag* dari negara, ideologi negara, *staatsidee*. Dalam hal tersebut Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintah negara. Atau dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara (Darmodihardjo, dkk. 1991. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara merupakan kedudukan yuridis formal oleh karena tertuang dalam ketentuan hukum negara, dalam hal ini UUD 1945 pada bagian Pembukaan Alinea IV. Penegasan akan kedudukan Pancasila sebagai

dasar negara semakin kuat dengan keluarnya Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pencabutan Ketetapan MPR No.II. MPR.1978 tentang P4. Pasal I ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara (Winarno, 2006).

Penerimaan Pancasila Dasar Negara sebagai milik bersama membawa konsekuensi diterima dan berlakunya kaidah-kaidah penuntun dalam pembuatan kebijakan Negara terutama dalam politik hukum nasional. Dari Pancasila dasar negara itu lahir sekurang-kurangnya 4 kaidah penuntun dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan Negara lainnya, yaitu sebagai berikut:

- 1). Kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa baik secara ideologi maupun secara teritori.
- 2). Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (Negara hukum) sekaligus.
- 3). Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia bukanlah penganut liberalisme, tetapi secara ideologis menganut prisma antara individualisme dan kolektivisme

dengan titik berat pada kesejahteraan umum dan keadilan sosial.

- 4). Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Indonesia bukan Negara agama sehingga tidak boleh melahirkan kebijakan atau politik hukum yang berdasar atau didominasi oleh satu agama tertentu atas nama apapun, tetapi Indonesia juga bukan Negara sekuler yang hampa agama sehingga setiap kebijakan atau politik hukumnya haruslah dijiwai oleh ajaran agama yang bertujuan mulia bagi kemanusiaan (Mahfud MD, 2009).

Philosophische grondslag itulah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka. Soekarno juga menyebut dasar negara dengan istilah '*weltanschauung*' atau pandangan hidup (Bahar, Kusuma, dan Hudawati (peny.), 1995; Kusuma, 2004). Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia mengandung konsekuensi setiap aspek penyelenggaraan negara dan semua sikap dan tingkah laku bangsa Indonesia dalam bermasyarakat dan bernegara harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Sebagaimana telah dibahas di muka bahwa nilai-nilai Pancasila yang bersumber pada hakikat Pancasila adalah bersifat abstrak, umum, universal, tetap dan tidak berubah. Nilai-nilai tersebut

perlu dijabarkan lebih lanjut menjadi norma-norma kenegaraan maupun norma-norma moral yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia (Kaelan, 2002).

Cita hukum dipahami sebagai dasar sekaligus pengikat dalam pembentukan peraturan perundangan. Konsekuensinya, setiap proses pembentukan dan penegakan serta perubahan-perubahan yang hendak dilakukan terhadap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai cita hukum Indonesia (Warasih, 2005). Cita-hukum (*rechtsidee*) Pancasila berintikan: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Penghormatan atas martabat manusia; (3) Wawasan Kebangsaan dan Wawasan Nusantara; (4) Persamaan dan kelayakan; (5) Keadilan sosial; (6) Moral dan budi pekerti yang luhur; dan (7) Partisipasi dan transparansi dalam proses pengambilan putusan publik (Sidharta, 1999).

5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Perjalanan sejarah perjuangan pergerakan Indonesia Merdeka menunjukkan bahwa UUD NRI 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia selalu dalam kondisi yang dipersalahkan terhadap praktik-praktik yang tidak benar di dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila hal tersebut benar berarti perubahan yang dilakukan terhadap Batang Tubuhnya tidak boleh bertentangan dengan Pembukaan UUD NRI 1945.

Pada prinsipnya bahwa amandemen Konstitusi RI, UUD NRI 1945, tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip tujuan dan cita-cita nasional yang termaktub dalam Mukadimah (Pembukaan UUD NRI 1945). Amandemen yang telah dilakukan terhadap UUD NRI 1945 yang telah disahkan pada tahun 2002 berupa Amandemen I, II, III dan IV secara esensial terjadi pada Batang Tubuh UUD NRI 1945. Pemahaman terhadap Mukadimah (pembukaan) UUD NRI 1945 sebagai dasar pendirian negara dan bangsa, serta adanya rumusan Pancasila harus menjadi dasar pemikiran seluruh komponen bangsa. UUD NRI 1945 merupakan konstitusi bagi negara Indonesia. Sebagai dasar hukum, UUD NRI 1945 memegang peranan dalam mewujudkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan hukum di atas segala hukum (*staats fundamental norm*) (Riyanto, 2006). Artinya, UUD NRI 1945 sebagai dasar hukum, dalam pembuatannya tidak boleh bertentangan dan harus mematuhi nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila, sebab UUD NRI 1945 merupakan hukum yang setingkat di bawah Pancasila (walaupun tidak tertera secara langsung dalam UU). Hal tersebut sejalan dengan asas hukum, yang berbunyi *lex superior derogat legi inferior*. Artinya, hukum yang lebih tinggi menjadi acuan hukum yang lebih rendah.

Pembukaan UUD NRI 1945 merupakan kaidah fundamental Negara Republik Indonesia dan

mempunyai kedudukan tetap berlekat kepada kelangsungan Negara Republik Indonesia atas Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Karena itu tidak dapat diubah dengan jalan hukum, dalam pada itu cukup luas dan dinamis untuk memberi keleluasaan bagi bermacam bentuk penjelasannya dalam sebuah Undang-Undang Dasar dan Mukadimahnya, yang sesuai dengan kebutuhan, kesediaan dan zaman (Notonegoro, 1982).

Perihal norma hukum, Hans Nawiasky menggunakan hirarkisitas hukum dapat terbagi menjadi 4 (empat) tingkatan, yaitu: (1) *Staatsfundamentalnorm* yang berupa norma dasar bernegara atau sumber dari segala sumber hukum; (2) *Staatsgrundgesetz* yang berupa hukum dasar yang apabila dituangkan dalam dokumen negara menjadi konstitusi atau *vervassung*; (3) *Formele Gesetz* atau undang-undang formal yang pada peraturan tersebut dapat ditetapkan suatu ketentuan yang bersifat *imperative*, dalam pengertian pelaksanaan maupun sanksi hukum; (4) *Verordnung en* dan *autonome sätze* yakni aturan-aturan pelaksanaan dan peraturan yang otonom, baik yang lahir dari delegasi maupun atribusi (Darmodihardjo, 1999).

Kajian Konseptual

1. Transformasi Budaya

Istilah "transformasi" berasal dari bahasa Latin yaitu *transformare* yang dalam konteks struktur dan

institusionalisme dimaknakan *to describe comprehensive organizational change initiative*. Tidak semua perubahan adalah transformasi, tetapi setiap transformasi adalah perubahan. Transformasi dapat dipahami sebagai konsep ilmiah atau alat analisis untuk memahami dunia. Karena dengan memahami perubahan setidaknya dua kondisi/keadaan yang dapat diketahui yakni keadaan pra perubahan dan keadaan pasca perubahan (Kuntowijoyo, 2006). Transformasi melibatkan perubahan jaring-jaring hubungan sosial dan ekologis. Apabila struktur jaring-jaring tersebut diubah, maka akan terdapat didalamnya sebuah transformasi lembaga sosial, nilai-nilai dan pemikiran-pemikiran. Transformasi budaya berkaitan dengan evolusi budaya manusia. Transformasi ini secara tipikal didahului oleh bermacam-macam indikator sosial. Transformasi budaya semacam ini merupakan langkah-langkah esensial dalam perkembangan peradaban. Semua peradaban berjalan melalui kemiripan siklus proses-proses kejadian, pertumbuhan, keutuhan dan integritas (Capra dalam Pujileksono, 2009). Transformasi budaya yang terjadi di Indonesia merupakan tantangan yang berat, karena menarik budaya etnis ketataran kebudayaan kebangsaan dan menggeser budaya agraris tradisional ke tataran budaya industri (Pujileksono, 2009). Transformasi nilai-nilai kebangsaan Indonesia dalam hal ini tidak hanya mengarah kepada perubahan budaya itu sendiri, tetapi lebih kepada perubahan sosial seluruh masyarakat

yang dapat membawa kehidupan manusia Indonesia yang lebih baik dalam semua sektor kehidupan anggota masyarakat. Berubah dari sikap kedaerahan menjadi sikap kebangsaan dan berubah dari sikap keterbelakangan dan kebodohan menjadi sikap bangsa yang kompetitif, modern, dan berkeadilan sosial. Namun, perubahan juga tidak selalu mengarah kepada hal-hal yang baik, tetapi dapat juga mengarah kepada hal-hal yang buruk, dan hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh manusia itu sendiri. Maka dari itu perubahan tidak boleh dibiarkan bergerak secara liar. Dengan demikian, peran dan partisipasi seluruh komponen bangsa Indonesia sangat diperlukan untuk mengawal pembangunan karakter bangsa agar sesuai dengan harapan mencapai cita-cita nasional.

Berkenaan dengan strategi transformasi nilai-nilai kebangsaan Indonesia dapat menggunakan teori fungsionalisme struktural (Parsons, 1951). Berdasarkan teori fungsionalisme struktural dalam kehidupan masyarakat sebagai sistem terdapat empat fungsi untuk semua sistem tindakan. Suatu fungsi adalah kumpulan hal yang ditujukan pada pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem. Secara sederhana, teori ini mendasarkan pemahamannya tentang masyarakat sebagai model sistem organik. Artinya, melihat masyarakat sebagai sebuah sistem dari beberapa bagian yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Satu bagian tidak bisa dipahami terpisah dari keseluruhan.

Dengan demikian, dalam perspektif Fungsionalisme Struktural ada beberapa persyaratan atau kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi agar sebuah sistem sosial bisa bertahan. Parsons kemudian mengembangkan apa yang dikenal sebagai imperatif-imperatif fungsional agar sebuah sistem bisa bertahan. Imperatif-imperatif tersebut adalah Adaptasi, Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Latensi atau yang biasa disingkat AGIL (*Adaptation, Goal attainment, Integration, Latency*).

Adaptasi (*adaptation*) merupakan fungsi yang dimiliki oleh sebuah sistem untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan diri sistem tersebut. Fungsi adaptasi ini dilaksanakan oleh sub-sistem perilaku untuk memerankan fungsi pelestarian (*preservation*) dan pemajuan (*advancement*). **Pencapaian tujuan** (*Goal attainment*) merupakan fungsi yang dimiliki sebuah sistem untuk dapat mendefinisikan dan mencapai tujuannya. Fungsi pencapaian tujuan ini dilaksanakan oleh sub-sistem kepribadian untuk memerankan fungsi internalisasi. **Integrasi** (*integration*) merupakan fungsi yang dimiliki oleh sebuah sistem dalam rangka mengatur hubungan bagian-bagian dalam komponen sistem tersebut dengan aktor-aktor di dalamnya. Fungsi integrasi ini dilaksanakan oleh sub-sistem sosial untuk melaksanakan proses sosialisasi. **Latensi** (*latency*) merupakan fungsi yang dimiliki sebuah sistem untuk melengkapi, memelihara, dan memperbaiki keadaan. Fungsi latensi

ini dilaksanakan oleh sub-sistem budaya untuk melaksanakan proses pelembagaan (*institutionalization*).

2. Hakikat Bangsa (*nation*)

Ernest Renan, seorang ahli dari *Academmmie Francaise*, Perancis pada Tahun 1982 (<http://wmahendra.blogspot.sg>) menyatakan bahwa hakikat bangsa atau '*Nation*' ditinjau secara ilmiah mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut : (1) Suatu bangsa adalah satu jiwa, suatu asas kerokhaniaan, (2) Bahwa bangsa adalah suatu solidaritas yang besar, (3) Bangsa adalah suatu hasil sejarah, (4) Bangsa adalah bukan sesuatu yang abadi, 5) Wilayah dan ras bukanlah suatu penyebab timbulnya bangsa. Wilayah memberikan ruang dimana bangsa hidup, sedangkan manusia membentuk jiwanya. Berdasarkan pokok-pokok pikiran di atas bangsa merupakan jiwa, suatu asas kerokhaniaan yang ditimbulkan karena; kemuliaan bersama diwaktu lampau yang dari aspek ini bangsa dapat disebut sebagai suatu hasil *historis*; keinginan hidup bersama (*le desir de vivre ensemble*) diwaktu sekarang, jadi merupakan persetujuan atau solidaritas besar dalam bentuk tetap mempergunakan warisan dari masa lampau tersebut bagi waktu sekarang dan seterusnya (Renan, 1994). Lebih lanjut Ernest Renan menegaskan bahwa faktor-faktor yang membentuk jiwa adalah sebagai berikut : 1) Kejayaan dan kemuliaan dimasa lampau, 2) Suatu keinginan hidup bersama baik dimasa sekarang maupun di masa yang akan datang, 3) Penderitaan-penderitaan

bersama, 4) *Le capital social* (suatu modal sosial) bagi pembentukan dan pembinaan paham kebangsaan. Akan tetapi yang lebih penting lagi adalah bukan apa yang berakar dimasa silam melainkan apa yang harus dikembangkan dimasa yang akan datang, 5) Persetujuan bersama pada waktu sekarang, yaitu suatu musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan bersama, 6) Keinginan untuk hidup bersama, 7) Berani memberikan suatu pengorbanan. Oleh karena itu, bilamana suatu bangsa ingin hidup terus, maka kesediaannya untuk berkorban harus terus dikembangkan, 8) Pemungutan suara setiap hari, yang menjadi syarat mutlak bagi hidupnya suatu bangsa serta pembinaan bangsa (Ismaun, 1981).

Secara yuridis formal bangsa Indonesia dikukuhkan menjadi satu *nation* pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan disahkannya Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Negara Indonesia dengan dasar Pancasila yang digali oleh Soekarno, yang kemudian disampaikan dan disahkan oleh sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), dilengkapi dengan lambang Garuda Pancasila bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, adalah perwujudan formal dari integrasi nasional Indonesia (Raharjo, 2001). Dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular dijumpai kalimat yang kemudian dikenal "Bhinneka Tunggal Ika". Sebenarnya kalimat tersebut secara lengkap berbunyi "*Bhinneka Tunggal Ika Tan Hanna Dharma Mangrua*",

artinya, walaupun berbeda, satu jua adanya, sebab tidak ada agama yang mempunyai tujuan yang berbeda (Hartono, 1992).

Pancasila dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya berperan sebagai kultur normatif dan alat pemersatu bangsa. Nilai-nilai Pancasila akan menentukan orientasi tujuan serta sistem sosiopolitik pada tingkat makro dan menentukan kaidah-kaidah yang mendasari pola kehidupan individual (Suroyo, 2002). Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mempunyai tingkatan dan bobot yang berbeda. Meskipun demikian, nilai-nilai itu tidak saling bertentangan, bahkan saling melengkapi. Hal ini disebabkan sebagai suatu substansi, Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, atau kesatuan organik (*organic whole*). Dengan demikian berarti nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh pula. Nilai-nilai itu saling berhubungan secara erat dan nilai-nilai yang satu tidak dapat dipisahkan dari nilai yang lain. Atau nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia itu akan memberikan pola (*patroon*) bagi sikap, tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia (Kaelan, 2002).

3. Nasionalisme Indonesia dan cita-cita bangsa

Setiap bangsa memiliki konsepsi dan cita-citanya masing-masing sesuai dengan kondisi, tantangan, dan karakteristik bangsa yang bersangkutan. Dalam pandangan Soekarno, "*Tidak ada dua bangsa yang*

cara berjuangnya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjuang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena pada hakikatnya bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri. Kepribadian yang terwujud dalam pelbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya dan lain-lain sebagainya” (Soekarno dalam Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, 2013). Konsepsi pokok yang melandasi semua hal itu adalah semangat gotong royong. Bung Karno mengatakan, “Gotong royong adalah paham yang dinamis, lebih dinamis dari kekeluargaan. Saudara-saudara! Kekeluargaan adalah satu paham yang statis, tetapi gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan”.

4. Budaya Strategis

Budaya strategis dapat artikan sebagai segala sesuatu yang menentukan bagaimana cara perumusan kebijakan strategis terhadap isu tertentu. Adapun arti penting dari budaya strategis adalah sebagai parameter kebijakan suatu negara dan untuk menjaga supaya tetap pada arah yang menuju kebaikan bersama. Sementara untuk mendapatkan budaya strategis yang matang, diperlukanlah proses yang tidak mudah. Terdapat tiga aspek sumber dari budaya strategis, yaitu historis, geografis, dan politis. Aspek historis menentukan kecenderungan pola perilaku bangsa, disebabkan adanya pengalaman belajar atas masa lalu. Aspek geografis, Indonesia yang

berbentuk negara kepulauan dengan sumber daya alam yang melimpah dan potensi jumlah penduduk dapat menjadikan suatu ancaman tersendiri. Hal tersebut yang kemudian mempengaruhi budaya strategis Indonesia.

5. Nilai-nilai Indonesia

Negara Republik Indonesia didirikan berdasarkan doktrin kebangsaan dan doktrin kerakyatan. Doktrin kebangsaan Indonesia berkaitan dengan Ke-bhinneka tunggal ika-an yaitu pluralisme dan multikulturalisme yang harus disatukan oleh “rasa bersama” dalam idiom *nation-state* berikut semangat nasionalisme yang terkandung didalamnya.

Lahirnya sesanti *Bhinneka Tunggal Ika*, berangkat dari kesadaran adanya kemajemukan tersebut. Bahkan kesadaran perlu adanya persatuan dari keragaman itu terkristalisasi kedalam ‘Soempah Pemoeda’ tahun 1928 dengan ke Indonesiaannya yang sangat kokoh (Sujanto, 2009). Sesanti artinya kalimat bijak (*wise-word*) yang dipelihara dan digunakan sebagai pedoman atau sumber kajian di masyarakat. *Bhinneka Tunggal Ika* adalah kalimat (*sesanti*) yang tertulis dipita lambang negara Garuda Pancasila, yang berarti berbagai keragaman etnis, agama, adat istiadat, bahasa daerah, budaya dan lainnya yang mewujudkan menjadi satu kesatuan tanah air, satu bangsa dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia (Sujanto, 2009).

Doktrin kerakyatan berkaitan

dengan keutamaan “Daulat Rakyat”, bahwa kepentingan rakyat adalah *primus*, bahwa pemerintahan negara dijalankan atas kehendak dan kepentingan rakyat, bahwa “Tahta adalah untuk rakyat”. Dengan demikian, posisi *primus* rakyat adalah “sentral-substansial”. Cita-cita pemuliaan daulat rakyat oleh *founding father* merupakan penolakan penindasan yang ditimbulkan kolonialisme dan feodalisme, di mana penolakan tersebut menyatu dengan semangat egalitarisme atau kesetaraan (Latif, 2011). Demokrasi Indonesia (Kedaulatan Rakyat) adalah berdasarkan “kebersamaan” (kolektivisme) yang kita kenal sebagai “demokrasi Pancasila”. Terdapat 3 (tiga) sumber yang mendorong para *founding father* menetapkan demokrasi Pancasila, yakni: (1) Paham sosialis barat yang mendasarkan perikemanusiaan; (2) Ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan Ilahi; dan (3) Kultur kolektivisme bangsa Indonesia (Mohammad Hatta dalam Swasono dan Fauzie (ed), 1992). Kebebasan individu dalam Demokrasi Pancasila tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial (Latif, 2011). Keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas.

Demokrasi Pancasila berdasar pada “kebersamaan” berbeda dengan demokrasi barat yang dasarnya adalah “Liberalisme” dan “Individualisme”.

Di dalam demokrasi Pancasila keberadaan individu tidak diabaikan, tetapi individu adalah sosok “makhluk sosial” di dalam kolektifan. Gerakan kemerdekaan Indonesia memandang faham individualism dalam *free-fight liberalism* yang dianut oleh negara barat harus ditentang karena tidak sesuai dengan asas kekeluargaan dalam Pancasila (Effendi, 2008).

Menurut Sosialisme Indonesia, hak milik pribadi itu boleh, tetapi hak milik itu memiliki fungsi sosial yang harus digunakan sesuai dengan sifat-sifat sosial dari hak milik tersebut. Fungsi sosial dari hak milik itu adalah primer, dalam arti bahwa hak milik tidak boleh dipergunakan (atau dibiarkan) merugikan masyarakat. Tentang hal ini, Hatta mengatakan bahwa *eigendom* (hak milik) itu bukan suatu *macht* (kekuasaan) tetapi suatu *sociale plicht* (kewajiban sosial (Latif, 2016).

Prinsip demokrasi permusyawaratan dipandang sejalan dengan pokok pikiran ketiga Pembukaan UUD NRI 1945, “negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan”. Demokrasi Pancasila mengandung prinsip-prinsip fundamental yang tersusun dalam kerangka etis cita kerakyatan, cita permusyawaratan, dan cita hikmat-kebijaksanaan. Cita kerakyatan hendak menghormati suara rakyat dalam politik; dengan memberi jalan bagi peranan dan pengaruh besar yang dimainkan oleh rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah negara. Cita permusyawaratan hendak

menghadirkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan dan golongan, sebagai pantulan dari semangat kekeluargaan dari pluralitas kebangsaan Indonesia dengan mengakui adanya “kesederajatan/persamaan dalam perbedaan”. Cita hikmat-kebijaksanaan merefleksikan orientasi etis, berlandaskan nilai ketuhanan, perikemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Hal ini mengandung konsekuensi seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Hatta, bahwa “kerakyatan yang dianut oleh bangsa Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak saja, tetapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Selanjutnya dikatakan, karena itu demokrasi Indonesia bukan demokrasi liberal dan bukan demokrasi totaliter, karena berkaitan secara menyeluruh dengan sila-sila Pancasila lainnya” (Latif, 2016)

6. Wawasan Kebangsaan dan akar konflik sosial

Wawasan kebangsaan merupakan jiwa, cita-cita, atau falsafah hidup yang tidak lahir dengan sendirinya. Ia sesungguhnya merupakan hasil konstruksi dari realitas sosial dan politik (*socially and politically constructed*) (Anderson, 1999). Mengadopsi pemikiran Talcott Parsons mengenai teori sistem, wawasan kebangsaan dapat dipandang sebagai suatu falsafah hidup yang berada pada tataran sub-sistem budaya. Dalam tataran ini wawasan kebangsaan dipandang

sebagai ‘*way of life*’ atau merupakan kerangka/peta pengetahuan yang mendorong terwujudnya tingkah laku dan digunakan sebagai acuan bagi seseorang untuk menghadapi dan menginterpretasi lingkungannya. Jelaslah, bahwa wawasan kebangsaan tumbuh sesuai pengalaman yang dialami oleh seseorang, dan pengalaman merupakan akumulasi dari proses tataran sistem lainnya, yakni sub-sistem sosial, sub-sistem ekonomi, dan sub-sistem politik (Parsons, 1951).

Banyak kalangan mulai mempersoalkan mengapa sekarang ini paham kelompok atau golongan, sikap individualistik dan wawasan sempit lainnya semakin mengkristal dalam kehidupan masyarakat. Padahal untuk dapat bertahan dalam era yang semakin mengglobal dan kompetitif dewasa ini kita sebagai bangsa harus semakin bersatu tidak bercerai-berai. Seperti diketahui, dunia saat ini memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi industri dunia keempat ini ditandai masifnya perkembangan teknologi informasi. Aspek digital telah menjadi basis dalam kehidupan manusia. Revolusi industri 4.0 turut memberikan peluang dan tantangan baru bagi setiap negara agar bisa bertahan dalam persaingan global yang kompetitif. Kenyataan tersebut semestinya mendorong kita untuk lebih termotivasi untuk mereaktualisasi wawasan kebangsaan. Ironisnya adalah nilai-nilai moral banyak dilanggar, kerukunan dirusak, dan kedamaian dicabik-cabik. Demikian halnya perkelahian antaretnis makin

besar, pertarungan antargolongan makin keras, permusuhan antarumat beragama makin meletup, pertikaian antarelite makin mengembang, bahkan tawuran antarsiswa makin menjadi-jadi. Semua itu melambangkan makin lemahnya manusia Indonesia sekarang dalam mengaplikasikan nilai-nilai kebangsaan. Perbedaan antargolongan dalam sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia merupakan sesuatu yang wajar dan lazim adanya, tetapi menjadi tidak wajar apabila perbedaan dijadikan alasan untuk saling menyerang atau mengucilkan satu golongan sehingga konflik terus dipelihara dan dibiarkan terus berkembang menjadi sebuah tindak kekerasan. Kedewasaan dan kearifan kita tampaknya belum cukup matang untuk menyikapi berbagai konflik dan benturan kepentingan. Demikian halnya jika agenda reformasi politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan tidak lagi diletakkan dalam kerangka kebangsaan, maka mimpi buruk akan terjadinya disintegrasi bisa menjadi kenyataan. Dalam tatanan masyarakat maju dan mandiri, lintas batas negara tidak lagi jelas, karena itu wawasan kebangsaanlah yang memegang peranan sentral (Budimansyah, 2010; 2018).

Strategi Dan Upaya Yang Perlu Dilakukan

Transformasi adalah suatu proses perubahan untuk memberikan respon terhadap pengaruh unsur eksternal dan internal yang dilakukan secara

berangsur-angsur hingga sampai pada tahap akhir yang mengarahkan perubahan dari bentuknya yang lama pada wujud barunya yang lebih sempurna. Sesuatu yang ditransformasikan bukanlah nilai dasar, yakni sila-sila Pancasila melainkan nilai praksis yang dihasilkan dari proses interaksi dan implementasi nilai-nilai kebangsaan itu sendiri. Dengan demikian transformasi nilai-nilai kebangsaan Indonesia adalah proses adaptasi dan orientasi terhadap dinamika lingkungan strategis yang tetap berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara dan UUD NRI 1945 sebagai landasan konstitusional.

Strategi transformasi nilai-nilai kebangsaan pada era Revolusi Industri 4.0 yang dipandang amat potensial adalah sebagai berikut.

1. Strategi Pertama

Mewujudkan pelestarian (*preservation*) dan pemajuan (*advancement*) nilai-nilai kebangsaan Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara **melalui** reaktualisasi dengan menerapkan pola *law and order*, pembuatan regulasi yang memiliki kekuatan hukum/konsekuensi hukum atas pelanggaran **dengan** memanfaatkan lembaga yang bertanggungjawab mengurus nilai-nilai kebangsaan dalam rangka mencapai cita-cita nasional.

2. Strategi Kedua

Mewujudkan proses internalisasi nilai-nilai kebangsaan Indonesia melalui program intervensi sosial politik baik pada tingkat pusat maupun daerah dengan menggunakan program

literasi karya Sastra Adiluhung (*Great Books Model*), model pendekatan ilmiah (*Scholarly Discipline Model*), dan model keteladanan (*Effective Citizen Model*) pada program kurikuler, gerakan sosial kultural, dalam rangka mencapai cita-cita nasional.

3. Strategi Ketiga

Mewujudkan program sosialisasi nilai-nilai kebangsaan Indonesia melalui program kurikuler (*psycho-paedagogical development*), gerak sosial kultural (*socio-cultural development*), dan program intervensi sosial politikal (*socio-political intervention*) dengan memanfaatkan agen sosialisasi baik pada tingkat pusat maupun daerah untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkapasitas unggul.

4. Strategi Keempat

Mewujudkan pembentukan lembaga nasional yang bertanggung jawab terhadap penyalarsan nilai-nilai kebangsaan Indonesia sebagai bagian dari sistem politik nasional, **melalui** institusionalisasi, pemberdayaan institusi yang berwenang dalam mengkompilasi, menilai dan mengkaji serta melembagakan nilai-nilai kebangsaan Indonesia dengan memanfaatkan kementerian/lembaga dari pusat sampai ke daerah dalam rangka mencapai cita-cita nasional.

Upaya yang dapat dilakukan untuk melaksanakan keempat strategi tersebut di atas adalah sebagai berikut.

1. Upaya Berdasarkan Strategi Pertama.

Mewujudkan pelestarian (*preservation*) dan pemajuan (*advancement*) nilai-nilai kebangsaan

Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara **melalui** reaktualisasi dengan menerapkan pola *law and order*, pembuatan regulasi yang memiliki kekuatan hukum/konsekuensi hukum atas pelanggaran hukum **dengan** memanfaatkan lembaga yang bertanggung jawab mengurus nilai-nilai kebangsaan dalam rangka mencapai cita-cita nasional. Penjabaran strategi ini dilakukan melalui upaya-upaya para pimpinan mulai dari MPR, DPR, Pemerintah Pusat, Lembaga dan Badan Negara, Pemerintah Daerah, Ormas, Orpol, OKP dan lain sebagainya berkomitmen untuk melestarikan dan memajukan nilai-nilai kebangsaan Indonesia yang sudah terformulasikan dari nilai dasar dan instrumental, dengan langkah-langkah sebagai berikut.

- a. Melakukan strategi peran budaya dalam rangka melestarikan nilai-nilai kebangsaan Indonesia dengan proses internalisasi baik dalam tataran kebijakan maupun kehidupan sehari-hari.
- b. Memobilisasi baik sumber daya internal dan eksternal untuk melestarikan dan mempromosikan nilai-nilai kebangsaan yang sudah terformulasikan dalam m e n a n g g a p i / m e r e s p o n kebutuhan pembangunan masyarakat dan orang dalam proses percepatan industrialisasi, modernisasi dan integrasi (ekonomi internasional) dalam rangka mencapai cita-cita nasional.

Para penyelenggara negara dan masyarakat berpartisipasi

melestarikan, mengamankan dan memajukan nilai-nilai kebangsaan, dengan upaya sebagai berikut:

- a. Mempercepat propaganda dan mempromosikan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian budaya, khususnya gerakan seperti "gerakan masyarakat bersatu untuk membangun kehidupan budaya". dengan membangun pilot project pusat-pusat budaya nusantara dan kearifan lokal di kabupaten dan provinsi. Proyek semacam ini penting untuk pembangunan lembaga budaya, mengembangkan dan mempromosikannya agar tercipta keluarga budaya, desa/kelurahan, sehingga masyarakat memiliki inovasi sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia yang sudah terformulasikan.
- b. Memberikan perhatian pada pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kebangsaan Indonesia berupa budaya, karakter, kearifan lokal, dan tradisi nasional terutama pada eksploitasi nilai-nilai kebangsaan Indonesia yang bersifat immaterial (non fisik). Perhatian tersebut dapat dilakukan melalui diantaranya: memberikan kesempatan dan mengatur festival budaya nasional (Indonesia) yang memiliki etos budaya yang khas dalam rangka untuk mempromosikan kesadaran melestarikan dan menghormati nilai-nilai budaya tradisional sebagai kekayaan budaya Nusantara.
- c. Melindungi dan melestarikan nilai-nilai kejuangan, benda-benda bersejarah dan peninggalan khusus. Meningkatkan kualitas nilai-nilai kebangsaan Indonesia yang berasal dari nilai-nilai di daerah. Mempersiapkan rencana investasi pembangunan pilot project pelestarian nilai-nilai kebangsaan.
- d. Mengintegrasikan program Bela Negara dibawah koordinasi Menhan dan/atau Panglima TNI. Menginventarisasi untuk memilih bagian terbaik dari sejarah perjuangan dan nilai-nilai kebangsaan Indonesia yang mengandung unsur pendidikan yang tinggi. Mencegah fenomena negatif dalam kegiatan pelestarian nilai-nilai kebangsaan.
- e. Memperluas pertukaran/interaksi nilai-nilai global yang unggul. Selektif menerima nilai manusiawi, prestasi ilmiah dan teknologi dari negara-negara asing. Aktif memperkenalkan intisari nilai-nilai kebangsaan Indonesia yang unggul dalam dinamika keterkinian dalam rangka meningkatkan prestise dan posisi negara kita di kancah internasional.
- f. Memperkuat kewaspadaan nasional dan kontrol dan manajemen negara dalam kegiatan pengawasan budaya asing yang negatif dalam berbagai penerbitan, surat kabar dan pelestarian nilai-nilai budaya, pentas seni, hak cipta, iklan dan layanan budaya.

2. Upaya Strategi Kedua.

Mewujudkan proses internalisasi nilai-nilai kebangsaan Indonesia melalui program intervensi sosial politikal baik pada tingkat pusat maupun daerah dengan menggunakan program literasi karya Sastra Adiluhung (*Great Books Model*), model pendekatan ilmiah (*Scholarly Discipline Model*), dan model keteladanan (*Effective Citizen Model*) pada program kurikuler, gerakan sosial kultural, dalam rangka mencapai cita-cita nasional. Penjabaran strategi ini dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

a. Para menteri dan kepala lembaga pemerintahan daerah membuat pedoman, norma dan etika bekerja yang sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Nilai-nilai Kebangsaan Indonesia melalui model keteladanan (*Effective Citizen Model*), gerakan literasi (*Great Book Model*), dan model berpikir ilmiah dalam memecahkan masalah (*Scholarly Discipline Model*) (Newton,2000). Adapun pedoman yang dibuat yaitu:

- 1). Pada masing-masing kementerian, lembaga dan pemerintahan daerah pedoman dibuat dalam bentuk yang variatif bisa dalam bentuk pakta integritas, format pembinaan pegawai, materi diklat dan atau penyempurnaan kurikulum.
- 2). Untuk Kementerian Dalam Negeri disusun pedoman dan syarat dalam pembinaan

organisasi kemasyarakatan, sosial dan politik.

- 3). Untuk Kementerian Sosial disusun pedoman dan syarat dalam pembinaan organisasi karang taruna dan kurikulum panti rehabilitasi sosial.
- b. Para tokoh masyarakat, ketua Parpol dan Ketua Ormas/OKP melakukan internalisasi dengan mengevaluasi tujuan dan mekanisme organisasinya dan menyesuaikan dengan Nilai-nilai Kebangsaan Indonesia yang terbaru.
- c. Semua pimpinan di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, Ormas, Orpol dan OKP melaksanakan internalisasi melalui pendidikan non formal dan informal dapat disusun dalam upaya sebagai berikut:
 - 1). Pendidikan untuk kelompok anak usia dini sesuai dengan tingkat perkembangannya, Nilai-nilai Kebangsaan Indonesia diperkenalkan dengan contoh nyata mengenai perilaku yang mencerminkan akhlak mulia dalam kehidupan berbangsa (Model Keteladanan).
 - 2). Pendidikan untuk kelompok remaja dan pemuda dimana tugas perkembangan fase ini adalah pencarian identitas diri memerlukan pendekatan yang mampu menyalurkan, memfasilitasi, mengarahkan, untuk akhirnya menemukan identitas diri sebagai anak-

anak bangsa yang berkarakter. Program-program pertukaran pemuda tingkat nasional maupun internasional sangat bermanfaat untuk menumbuhkan kebanggaan dan kebersamaan.

- 3). Pendidikan keaksaraan dan kesetaraan. Dua program ini yang memang paling dekat dengan persekolahan sehingga terbuka peluang untuk bersinergi dalam pendidikan karakter kebangsaan. Pendidikan keaksaraan sambil menumbuhkan makna kompetensi keaksaraan bagi pembentukan konsep diri dan jatidiri sebagai individu di dalam kehidupan berbangsa. Misalnya, paling tidak menyadari betapa menyakitkan, pemeringkatan bangsa-bangsa berdasarkan angka literasi sehingga bangsa yang tinggi angka buta hurufnya, akan berada dalam posisi memalukan. Sementara itu, pendidikan kesetaraan yang dewasa ini semakin ditata agar terbukti kesetaraannya yang memang secara yuridis sudah mendapatkan pengakuan, mestinya juga memiliki komitmen terhadap pendidikan karakter kebangsaan.

- 4). Pendidikan untuk kelompok perempuan melalui pendidikan pemberdayaan perempuan perlu diselenggarakan secara

optimal untuk meningkatkan kualitas partisipasi perempuan dalam kehidupan berbangsa. Di samping itu, juga untuk membangun karakter, jati diri sebagai perempuan yang meskipun secara kodrati berbeda. Namun, tidak berarti harus dibedakan dalam peluang, kapasitas, dan kinerja di berbagai bidang.

- 5). Pendidikan untuk masyarakat sebagaimana diutarakan sebelumnya, masyarakat membutuhkan pengetahuan dan keterampilan mengenai berbagai hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan modern dewasa ini (Sumarno, 2007), termasuk bagaimana kehidupan berbangsa dalam konstelasi hubungan antarbangsa yang semakin kompleks, penuh dengan berbagai kepentingan tersurat maupun tersirat. Dalam hubungan antarbangsa, meskipun dengan prinsip kesamaan derajat, tidak dapat diingkari adanya sistem jejaring internasional yang menempatkan suatu bangsa dalam posisi kebergantungan atau menjadi terbatas kebebasannya dalam berinteraksi dengan bangsa lain, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral.

3. Upaya Berdasarkan Strategi Ketiga.

Mewujudkan program sosialisasi

nilai-nilai kebangsaan Indonesia melalui program kurikuler (*psycho-paedagogical development*), gerakan sosial kultural (*socio-cultural development*), dan program intervensi sosial politikal (*socio-political intervention*) dengan memanfaatkan agen sosialisasi baik pada tingkat pusat maupun daerah dalam rangka mencapai cita-cita nasional, penjabaran strategi tersebut dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Presiden menunjuk Menteri terkait, seperti Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) untuk menyosialisasikan secara berkelanjutan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Presiden tentang Pedoman Pelaksanaan Nilai-nilai Kebangsaan Indonesia melalui koordinasi dengan kementerian, lembaga negara dan perangkat daerah serta melakukan pembinaan perikehidupan berbangsa dan bernegara secara simultan dan holistik, dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1). Menkopolhukam mengadakan pertemuan secara rutin dan berkala dengan kementerian, lembaga serta perangkat daerah dan tokoh masyarakat secara berjenjang untuk mengevaluasi program-program sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Nilai-nilai Kebangsaan Indonesia.
 - 2). Menkopolhukam bersama lembaga serta perangkat daerah dan tokoh masyarakat

juga melaksanakan evaluasi terhadap produk-produk kebijakan yang dihasilkan oleh kementerian, lembaga serta pemerintah daerah.

- 3). Menkopolhukam bersama lembaga serta perangkat daerah dan tokoh masyarakat membentuk forum yang bersifat informal dan memanfaatkan organisasi politik serta kemasyarakatan dan kepemudaan sebagai pembina forum komunikasi pimpinan daerah dan komunitas intelegen dalam pelaksanaan sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Nilai-nilai Kebangsaan Indonesia yang bersifat praksis.
- b. Menteri terkait dan tokoh masyarakat serta unsur perangkat daerah melaksanakan:
 - 1). Pemantapan gerakan sosialisasi Nilai-nilai Kebangsaan Indonesia melalui program kurikuler diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi melalui pendekatan proses pendidikan dan pengajaran (*Psycho-paedagogical development*).
 - 2). Pemantapan gerakan sosialisasi Nilai-nilai Kebangsaan Indonesia melalui program sosial kultural (*Socio-cultural development*) diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Informasi dan Sosialisasi,

Kementerian Sosial, dan kementerian/lembaga lain yang relevan.

- 3). Pemantapan gerakan sosialisasi Nilai-nilai Kebangsaan Indonesia melalui program intervensi sosial politikal (*Socio-political intervention*) diselenggarakan kementerian/lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi menghasilkan kebijakan publik baik dari tingkat pusat maupun daerah.

4. Upaya Berdasarkan Strategi Keempat.

Mewujudkan pembentukan lembaga nasional yang bertanggung jawab terhadap penyesuaian nilai-nilai kebangsaan Indonesia sebagai bagian dari sistem politik nasional, melalui institusionalisasi, pemberdayaan institusi yang berwenang dalam mengkompilasi, menilai dan mengkaji serta melembagakan nilai-nilai kebangsaan Indonesia dengan melibatkan Presiden, kementerian/lembaga dari pusat sampai ke daerah dalam rangka mencapai cita-cita nasional, penjabaran strategi tersebut dilaksanakan dengan upaya sebagai berikut :

a. Presiden.

Melaksanakan evaluasi terhadap kementerian lembaga yang mengurus nilai-nilai kebangsaan agar dapat diambil langkah-langkah strategis untuk menentukan kebijakan selanjutnya dalam melembagakan nilai-nilai kebangsaan guna mendukung pembangunan karakter

bangsa.

b. Menkopolkukam.

Mengkoordinasikan kementerian terkait yang berada dibawah koordinasinya, meliputi Menhan, Mendagri, Menlu, Kapolri, Panglima TNI, Kejaksaan Agung, Kepala BIN, Menkumham, untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan sebagai bahan masukan kepada Presiden atas rencana Presiden untuk melakukan revitalisasi tugas peran, prosedur mekanisme kerja antar kementerian/lembaga terkait.

c. Menko PMK.

Mengkoordinasikan kementerian terkait yang berada dibawah koordinasinya, meliputi Menhan, Mendagri, Menlu, Kapolri, Panglima TNI, Kejaksaan Agung, Kepala BIN, Menkumham, untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan sebagai bahan masukan kepada Presiden atas rencana Presiden untuk melakukan revitalisasi tugas peran, prosedur mekanisme kerja antar kementerian/lembaga terkait.

d. Gubernur Lemhanas.

melaksanakan kajian tentang sistim dan metode pelaksanaan sosialisasi, internalisasi dan preservasi nilai-nilai kebangsaan yang telah dilaksanakan selama ini sebagai saran dan masukan kepada Presiden tentang perlu tidaknya dilaksanakan revitalisasi tentang peran, fungsi serta mekanisme hubungan kerja antar kementerian/lembaga yang mengurus

nilai-nilai kebangsaan agar mencapai *out-put* kinerja optimal.

e. Gubernur/Bupati/Walikota.

Memberikan masukan kepada Presiden, melalui Menteri Dalam Negeri tentang pelaksanaan implementasi nilai-nilai kebangsaan dalam aspek preservasi, internalisasi dan sosialisasi maupun kelembagaan yang bertanggung jawab di daerah masing-masing dalam upaya memberikan saran yang terbaik guna pembangunan karakter bangsa di daerah masing-masing.

Penutup

Transformasi nilai-nilai kebangsaan Indonesia merupakan sebuah upaya strategis untuk menghadirkan nilai-nilai kebangsaan Indonesia yang mampu beradaptasi dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menghadapi perkembangan era globalisasi pada masa kini dan di masa depan (Budimansyah, 2018). Langkah strategis transformasi nilai-nilai tersebut dilakukan melalui mekanisme yang inkrementalis sehingga pada akhirnya ada benang merah yang selaras antara nilai dasar, instrumental dan nilai praksis. Transformasi nilai-nilai kebangsaan Indonesia diperlukan dalam membangun karakter bangsa untuk memperkokoh NKRI guna mencapai cita-cita nasional. Hal tersebut dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Preservasi nilai-nilai kebangsaan Indonesia.

Prevervasi nilai-nilai kebangsaan

merupakan langkah menyelamatkan, melindungi dan memelihara nilai-nilai kebangsaan Indonesia yang sudah terformulasikan melalui elaborasi dari nilai dasar, intrumental dan praksis. Nilai kebangsaan terpancar dari Pancasila dan Mukadimah Pembukaan UUD NRI 1945 sebagai Dasar Negara dan Nilai intrumental yang lahir dari UUD NRI 1945 dengan segenap isinya serta nilai praksis berupa dinamika dan perkembangan adaptasi dan orientasi nilai-nilai kebangsaan Indonesia yang dihadapkan kepada lingkungan strategis akan sangat bervariasi karena nilai praksis dipastikan akan mengalami proses adaptasi secara inkremental tergantung kebutuhan dan kepentingannya. Pelestarian yang dimaksud ini adalah kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luwes, dan selektif. Pelestarian tidak mungkin berdiri sendiri, oleh karena senantiasa berpasangan dengan perkembangan, dalam hal ini kelangsungan hidup. Aksi nyata dari preservasi ini dibutuhkan bangsa dan negara Indonesia saat ini. Bukan hanya opini dan wacana saja yang terus dikumandangkan, dibutuhkan implementasi atau penerapan dari sikap memaknai nilai-nilai kebangsaan Indonesia sehingga dalam pengambilan kebijakan-kebijakan dapat berdasar nilai-nilai kebangsaan Indonesia terutama Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945. Inilah yang dibutuhkan masyarakat

Indonesia, dimana generasi muda berperan sebagai 'tokoh utama' dalam memaknai nilai-nilai kebangsaan.

2 Internalisasi nilai-nilai kebangsaan.

Internalisasi adalah istilah lain yang dipakai untuk menggantikan istilah sosialisasi dan penanaman nilai-nilai kebangsaan, internalisasi pada tataran praksis hampir sama dengan institusionalisasi karena itu Internalisasi nilai-nilai kebangsaan Indonesia diharapkan dapat sejalan dengan proses institusionalisasi mengingat kedua proses ini bersifat interdependensi. Internalisasi nilai-nilai kebangsaan Indonesia di Indonesia bukan merupakan hal yang baru, kenyataan ini pernah dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno di Tahun 1960-an. Langkah menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila secara meluas kepada semua lapisan masyarakat, birokrasi, dan persekolahan dilakukan oleh penguasa orde baru dengan ditetapkannya Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). P4 pada awalnya dilandasi oleh upaya dari pemerintah yang menginginkan agar nilai-nilai Pancasila dapat dengan mudah dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh warga negara. P4 juga berpengaruh pada kurikulum persekolahan dan perguruan tinggi. Kurikulum PMP Tahun 1984 dan terutama kurikulum PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) 1994 secara jelas menjabarkan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme yang telah diuraikan

di dalam P4. Kurikulum Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, juga tidak lepas dari pengaruh P4. Dimasa kini tatkala masyarakat sudah maju dan arus informasi semakin kuat proses internalisasi Nilai-nilai kebangsaan Indonesia dapat dilakukan oleh negara secara formal dalam format regulasi atau kebijakan-kebijakan yang rumuskan oleh pemerintah pada semua sektor pembangunan terutama pembangunan sumber daya manusia formal maupun informal sebagai human capital dalam pencapaian cita-cita nasional.

3. Sosialisasi nilai-nilai kebangsaan Indonesia.

Bahwa secara faktual nilai-nilai kebangsaan Indonesia dewasa ini telah tergeser oleh nilai-nilai baru akibat derasnya globalisasi, intervensi budaya asing dan dinamika lingkungan strategis yang dapat menimbulkan implikasi negatif terutama dalam memprorakporandakan karakter bangsa yang merupakan konstruksi spirit untuk mencapai cita-cita nasional. Karena itu Nilai-nilai kebangsaan Indonesia bersifat spesifik dan berlaku dalam suatu negara seperti halnya NKRI harus mampu menjadi pijakan dan bagian dari kapabilitas nilai yang senantiasa dapat dipertahankan sebagai pijakan segenap bangsa dan negara dalam proses pencapaian cita-cita nasionalnya. Namun di lain pihak nilai-nilai tersebut harus mampu beradaptasi dengan perkembangan lingkungan global yang semakin kohesif. Nilai dasar (Pancasila)

harus tetap abadi dan lestari karena merupakan nilai inti yang menjadi dasar negara dan ideologi negara dalam penyelenggaraan perikehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Nilai dasar ini bersifat tetap atau tidak berubah. Nilai instrumental, merupakan nilai yang dapat saja berubah, tetapi harus tetap berpedoman pada nilai-nilai dasar yaitu nilai Pancasila. Perumusan kembali atau amandemen UUD NRI 1945 adalah salah satu bukti dari dinamika nilai instrumental dalam nilai-nilai kebangsaan dan harus tegas menjaga kemurnian mukadimah (pembukaan) UUD NRI 1945; nilai praksis merupakan nilai yang dapat ditransformasikan dari nilai-nilai kebangsaan Indonesia yang pernah dirumuskan menjadi nilai-nilai praksis baru yang dapat lebih diterapkan dalam perjalanan kehidupan bangsa Indonesia dan kehidupan kemasyarakatan untuk menghadapi perkembangan zaman dimasa yang akan datang. Sumber dari nilai operasional dan praksis yang telah ditransformasikan adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nilai-nilai baru yang bersifat elaboratif dan harus memiliki kontribusi yang positif bagi pencapaian cita-cita nasional.

4. **Institusionalisasi nilai-nilai kebangsaan Indonesia.**

Institusionalisasi nilai-nilai kebangsaan Indonesia sejak zaman orde lama sudah dilaksanakan, begitu pula zaman orde baru dengan lahirnya P-4 dan BP7 kemudian pada reformasi

dengan di publikasikannya empat pilar nilai kebangsaan melalui MPR RI, namun semuanya bertendensi indoktrinasi yang berlebihan. Yang lebih penting dari institusionalisasi ini adalah adanya komitmen dan konsensus dengan menempatkan Pancasila sebagai Dasar Negara dan UUD NRI 1945 sebagai konstitusi penyelenggaraan negara. Pada dasarnya institusionalisasi untuk nilai kebangsaan ini sudah terwujud, namun semuanya diperlukan kebijakan dan perangkat sistem yang bersifat fungsional yang dapat mengartikulasikan penyesuaian nilai-nilai baik berupa pengembangan maupun penambahan dengan tidak menyimpang dari nilai dasar walaupun tidak dalam bentuk kristalisasi yang melahirkan gugus kendali yang bersifat fungsional, mulai tingkat pemerintahan tertinggi sampai terendah secara vertikal dan secara horizontal, dalam membudidayakan kaidah keselarasan transformasi nilai-nilai kebangsaan Indonesia pada tingkat infrastruktur politik. Pemutakhiran kurikulum pada semua jenis dan jenjang pendidikan yang bermuatan karakter Pancasila merupakan langkah institusionalisasi Nilai-nilai kebangsaan Indonesia yang kongkret dan terukur. Semoga Allah Yang Maha Kuasa meridloi upaya bangsa Indonesia para era Revolusi Industri 4.0 ini menyongsong takdir menjadi negara yang *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafûr. Aamiin yaa Rabb.*

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, B. 1999. *Imagined Community: reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso.
- Bahar, S., Kusuma, A.B. dan Hudawati, N (peny). 1995. *Pancasila Dalam Makna Dan Aktualisas: Modul Perkuliahan*, Universitas Mercu Buana.
- Budimansyah, D. 2010. *Tantangan Globalisasi Terhadap Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air di Sekolah*. Bandung: Jurnal Penelitian Pendidikan Vol. 11, No. 1, April 2010.
- Budimansyah, D. 2018. *Promoting Global Citizenship Education, Multicultural Education, And Civic Education To A Peaceful Asian Community*, Book Chapter in *Establishment of Asian Community Through Education--One Asia Convention Nagoya 2017*, One Asia Foundation Japan.
- Darmodiharjo, D. 1999. *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Darmodiharjo, D. dkk. 1991. *Santiaji Pancasila (Suatu Tinjauan Filosofis, Historis dan Yuridis Konstitusional)*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Effendi, S. 2008. "Sistem Pemerintahan Negara Kekeluargaan", *Nasionalisme, Pancasila, dan Globalisasi*, Forum Nusantara Institute, 5 Maret 2008,
- Gonggong, A. 2002. dalam "Diskusi Terbatas," "Perspektif Sejarah atas Demokrasi Indonesia," 11 September 2002, di Bappenas, oleh Direktorat Politik, Komunikasi dan Informasi.
- Hartono. 1992. *Pancasila Ditinjau dari Segi Historis*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ismaun. 1981. *Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia*. Bandung: Carya Remadja. Hlm. 38-39
- Kaelan. 1993. *Pancasila Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan. 2002. *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan. 2013. *Negara Kebangsaan Pancasila Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kuntowijoyo. 2006. *Budaya dan Masyarakat (Edisi Paripurna)*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kusuma, A.B., 2004, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Latif, Y. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

Latif, Y. 2016. Pancasila sebagai Norma Dasar Negara. Disajikan pada Seminar Pasis Dikreg XLIII Sesko TNI TA 2016 pada tanggal 17 November 2016.

Madjid, N. 1992. *ISLAM: Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Penerbit Yayasan Paramadina

Mahfud, MD. 2009. Pancasila Hasil Karya dan Milik Bersama, Makalah pada Kongres Pancasila di UGM tanggal 30 Mei 2009.

Newton, R.R. 2000. Tension and Models of General Education Planing. *The Journal of General Education*. Volume 49, Number 3, pp. 165-181.

Notonegoro. 1982. Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila. Jakarta: CV. Rajawali.

Parsons, T. 1951. *Toward a General Theory of Action*. New York : Harper & Row.

Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014. 2013. Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI. P: 94-95

Pujileksono, S. 2009. *Antropologi (Edisi Revisi)*. Malang: UMM Press.

Rahardjo, I.T.K (Ed). 2001. Lahirnya Pancasila dalam Bung KARNO dan Tata Dunia Baru. Kenangan 100 Tahun Bung Karno. Jakarta: Grasindo

Renan, E. 1994. *Apakah bangsa Itu? (Diterjemahkan oleh Prof MR Sunario dari "Qu'est ce Qu'une Nation" (1882)*. Bandung: Penerbit Alumni.

Riyanto, A. 2006. dalam Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014. 2013. Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

Sesko TNI. 2018. *Optimalisasi Kewaspadaan Nasional Guna Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa dalam Rangka Mempertahankan Keutuhan NKRI*, Seminar Pasis Dikreg 45.

Sidharta, B.A. 1999. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Soekarno. 1960. *Pantjasila: Dasar Filsafat Negara*. Djakarta: Jajasan Empu Tantular. Hlm. 63.

- Soekarno. 1989. *Pancasila dan Perdamaian Dunia*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Sujanto, B. 2009. *Pemahaman Kembali Makna Bhinneka Tunggal Ika (Persaudaraan dalam kemajemukan)*. Jakarta: SagungSeto.
- Sumarno, P.J. 2007. *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Suroyo, A.M.D. 2002. Integrasi Nasional dalam Perspektif Sejarah Indonesia: Sebuah Proses yang Belum Selesai. Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Sejarah pada Fakultas Sastra Universitas Diponegoro-Semarang, 9 Februari 2002.
- Swasono, S.E (ed), 1985, *Membangun Sistem Ekonomi Nasional: Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: UI Press,
- Swasono, S.E. 2016. Kebangsaan Persatuan dan Stabilitas Nasional. Disajikan pada Seminar Pasis Dikreg XLIII Sesko TNI TA 2016 pada tanggal 17 November 2016.
- Swasono, S.E. dan Fauzie Ridjal (penyunting), 1992, *Mohammad Hatta: Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan*, Jakarta: UI Press,
- Warassih, E. 2005. *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama,
- Winarno.2006. *Paradigma Baru Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Internet:**
- https://id.wikipedia.org/wiki/Nasionalisme_Indonesia tanggal 16 Juli 2016 pk. 17.52
- <http://tehkopijahe.blogspot.co.id/2012/04/nilai-nilai-sumpah-pemuda.html>
- <http://wmahendra.blogspot.sg/2011/04/pembinaan-kebangsaan-indonesia.html>

AKTUALISASI PANCASILA BAGI GENERASI MILENIAL

Endang Danial. Ar

Abstrak

Dunia yang telah memasuki era revolusi industri 4.0 nampaknya bukan lagi isapan jempol belaka. Berbagai teknologi yang menjadi tanda dimulainya revolusi industri 4.0, sudah mulai diterapkan di berbagai lini. Salah satunya artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan yang semakin berkembang saat ini. Bukan hanya untuk industri tetapi AI juga dikembangkan untuk memfasilitasi berbagai aspek kehidupan manusia. Ada lima teknologi yang menjadi penopang industri 4.0, yaitu AI, internet of things, human-machine interface, teknologi robotik dan sensor, serta teknologi percetakan tiga dimensi (3D). Kesemuanya sudah diaplikasikan dalam berbagai kepentingan dan secara konstruktif berpengaruh terhadap perilaku manusia di dunia ini (Gleason W Nancy; 2018,3). Perkembangan teknologi dalam kehidupan memunculkan perilaku yang khas seperti generasi milenial yang menurut para ahli lahir antara tahun 1980-2000 yang sekarang masa-masa produktif mereka. Karakteristik mereka ini unik seiring dengan masa pembelajaran mereka dipenuhi dengan media sosial berbasis web R.I 4.0. Termasuk karakteristik kebangsaan remaja milenial yang sekarang duduk dibangku SMA. Aktualisasi nilai-nilai kebangsaan berbasis Pancasila dan UUD 1945 dalam keseharian mereka bersama teman, keluarga, sekolah, dan kehidupan kenegaraan mereka seringkali memberikan kesan yang aneh, sehingga dianggap nilai kebangsaan mereka menurun atau erosi nilai. Padahal menurut para ahli perwujudan mereka tentang nilai kebangsaan sesuai dengan zamannya, berbeda dengan pandangan nilai-nilai kebangsaan orang tua pada zamannya. Terjadi pergeseran paradigma antara nilai-nilai kebangsaan remaja yang dianggap oleh kalangan orang tua sudah tergerus nilai-nilai hedonisme/ vandalisme. Padahal gaya mereka dengan gaya orang tua dalam mengaktualisasikan dalam kehidupan mereka berbeda.

Key words : nilai AI, internet of things, nilai kebangsaan

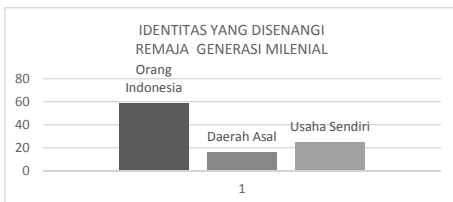
A. Pendahuluan

Tantangan generasi muda sekarang mengalami konteks sosial yang jauh berbeda dengan para pendahulu bangsa. Pada masa kebebasan informasi dan perkembangan teknologi mengubah pola interaksi

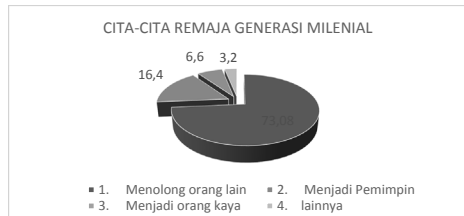
sosial dan perilaku kenegaraan mereka. Dalam benak publik perilaku nilai-nilai kebangsaan terwujud dalam keseharian kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak kesan bahwa remaja sekarang kurang peduli terhadap lingkungannya, mereka lebih asyik sendiri, egois, ada kesan menjaga jarak, antara

remaja dengan orang tua, atau guru. Kurang bisa bekerja sama dengan yang lain, partisipasi mereka dalam kehidupan kenegaraan dianggap rendah. Padahal menurut pandangan mereka jika diajak berdialog, berdiskusi tentang nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kesatuan bangsa serta nilai-nilai keadilan justru para remaja antusias. Pandangan lain mengatakan bahwa nilai-nilai kebangsaan generasi muda sekarang lebih asik dengan gadget masing-masing, dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Masing-masing remaja asik dengan HP dan internet, karena memang sekarang komunikasi mereka seperti itu, bukan hanya dengan kontak dengan tetangga, tetapi teman mereka sekarang tidak dibatasi dengan ruang dan waktu versi dulu/tradisi/orang tua. Sehingga perwujudan kepedulian mereka tentang nilai-nilai kebangsaannya tidak dibatasi hanya di Indonesia.

Coba kita lihat pandangan generasi menurut hasil survey Kompas tahun 2017 tentang wajah kebangsaan pemuda milenial (Litbang Kompas 25-27 Oktober 2017, terhadap 498 responden berusia 17 tahun di 14 kota di Indonesia)

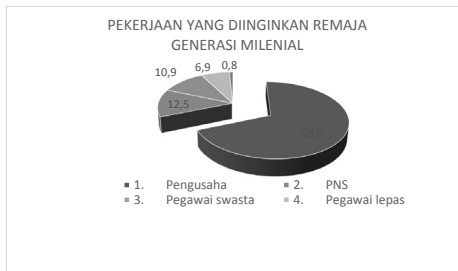


Format dimodifikasi penulis



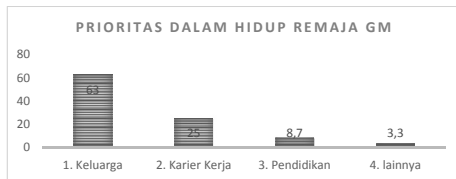
Jika diperhatikan antara identitas remaja generasi milenial (GM) dan cita-cita mereka nampak nilai identitas diri lebih senang disebut sebagai orang Indonesia (59,%) ketimbang sebagai orang daerah asal (16,4) dan atas nama usaha sendiri (24,6%). Demikian juga remaja GM lebih bercita-cita menolong orang lain lebih diutamakan (73,08%) ketimbang bercita-cita menjadi orang kaya (6,6%) menjadi pemimpin (16,4%) dan cita-cita lainnya (3,2%).

Pekerjaan masa depan mereka yang diinginkan nampak lebih moderat dan terbuka seperti mereka ingin menjadi pengusaha (68,9%) menjadi pegawai negeri sipil (PNS) 12,5%) menjadi pegawai swasta (10,9%) pegawai lepas (6,9%) dan lainnya (0,8%), seperti nampak gambar di bawah ini :

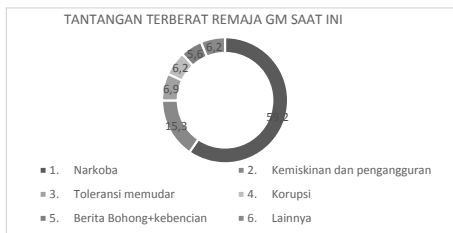


Cita-cita pekerjaan remaja milenial sudah sangat berbeda dibandingkan dengan remaja tahun 1980 sampai

2000, yang ketika itu pada kebanyakan ingin menjadi PNS. Jadi pengusaha, dan pegawai swasta menurut mereka lebih terbuka dan bebas, bahkan berani menjadi pegawai lepas, artinya mereka lebih senang mandiri.



Sedangkan prioritas dalam hidup remaja GM menurut hasil survey ini adalah orang tua menjadi pilihan utama (63%) kedua adalah karier kerja (25%) ketiga adalah pendidikan mereka (8,7%) dan pilihan lainnya (3,3%). Ini menunjukkan bahwa remaja milenial amat peduli terhadap keluarganya dibandingkan dengan yang lainnya.



Tantangan terberat saat ini menurut remaja GM, adalah masalah narkoba (59,2%) amat besar dibandingkan dengan tantangan lainnya seperti kemiskinan dan pengangguran (15,3%) toleransi yang memudar (6,9%) korupsi (6,2%) berita bohong dan ujaran kebencian (5,6%) dan lainnya (6,2%). Hal ini masalah yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini juga dirasakan amat kuat oleh mereka.

Hal yang menarik lainnya adalah bagaimanakah gambaran remaja GM dalam kolaborasi; semangat persatuan dan kesatuan yang ditunjang dengan teknologi digital, dalam bidang politik sebagai salah satu elemen penting seperti gerakan remaja sekolah dan mahasiswa tentang Bye-Bye Plastik Bag yang menggerakkan puluhan organisasi, sekolah, toko, kampanye kebersihan pantai seperti di Bali, sungai. Dari data Kompas yang dikumpulkan memperlihatkan kepedulian remaja GM pada organisasi sosial politik terlihat sebagai berikut:

Kesediaan Beroragisasi GM

Organisasi Sosial	Bersedia	Tdk bersedia	Tdk tahu
Partai Politik	11,8	86,3	1,9
Organisasi Massa	43,9	54,5	1,6
Organisasi Pemuda	50,8	47,4	1,8
LSM	53,0	46,4	0,6

Tabel dimodifikasi penulis.

Dari tabel itu nampak terlihat remaja GM sekarang tidak bersedia terlibat langsung dengan Partai Politik (86,3%) yang bersedia masih kecil (11,8%), mereka lebih tertarik pada LSM (53%) organisasi pemuda (50,8) dan organisasi massa (43,9%). Hal ini sesuai dengan pemunculan gerakan mereka disekitar kepedulian mereka terhadap gerakan kebersihan, gerakan sosial kemasyarakatan, dibandingkan dengan ikut berkampanye atau terlibat langsung dengan organisasi partai politik.

Pemahaman tentang nilai kebangsaan yang mungkin menurut mereka sekarang sudah banyak berubah. Semakin banyaknya komunikasi teknologi berbasis digital semakin mudanya tentang ruang dan waktu dalam mengartikan negara, pengabdian, dan nasionalisme seseorang. Mesin pintar AI, I.oT, seperti di sebuah hotel, CCTV di berbagai sudut jalan, speaker pintar, e-commerce, e-tax, layanan perbankan, kesehatan dan pendidikan, mendorong perilaku warga negara untuk lebih lincah, gesit, dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sikap produktivitas, kelincahan, kegesitan, kecepatan layanan dengan fasilitas mesin-mesin kecerdasan yang canggih jangan sampai menggerus nilai-nilai keyakinan, kebersamaan, persatuan, dan nilai-nilai keadilan.

Nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dari zaman ke zaman di Indonesia tetap eksis seiring dengan perkembangan masyarakat, sains dan teknologi, karena

nilai ideologi Pancasila memiliki fleksibilitas dan adaptabilitas yang tinggi. Hanya bagaimanakah wujud pendekatan dan pembelajaran nilai-nilai itu disesuaikan dengan tingkat perkembangan warga belajar setiap generasinya (M.Hatta,dkk.;1977). Mengingat ideologi politik di dunia dalam aktualisasinya di masyarakat pada umumnya mengalami masa kemunduran (decline) dan kebangkitan (resurgence)

B. Aktualisasi Nilai Kebangsaan Untuk Remaja Generasi Milenial

Generasi milenial digambarkan dengan beberapa ciri utama, seperti (1) *Gampang bosan pada barang yang dibeli* (2) *No gadget no life* (3). *Hobi melakukan pembayaran non-cash* (4). *Suka dengan yang serba cepat dan instan* (5) *Memilih pengalaman dari pada aset* (6) *Berbeda perilaku dalam grup satu dan yang lain* (7) *Jago multitasking* (8) *Kritis terhadap fenomena sosial* (9) *Dikit-dikit posting* (10) *tapi, bagi millennial 'sharing is cool'* (<https://www.identimes.com>. Life INSP). Artinya ketergantungan pada alat komunikasi digital amat kuat sehingga pendekatan pada mereka pun dipastikan dengan cara-cara digital based juga. Sebab jika tidak maka tidak akan berhasil pendekatannya. Seperti media sosial sebagai sarana penyebaran ide dan konsep-konsep dasar serta aplikasi kehidupan sebagai interaksi edukasi interaktif antara lembaga pemerintah dan warga masyarakat.

Aktualisasi adalah penjabaran nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945

menurut para ahli dapat dilihat (1) secara **objektif** dalam bentuk norma-norma, dijumpai dalam bentuk norma hukum, kenegaraan, dan norma-norma moral untuk setiap aspek penyelenggaraan negara : eksekutif, legeslatif, dan yudikatif maupun dalam bentuk kenegaraan lainnya. Aktualisasi objektif ini lebih konkrit dalam bentuk peraturan perundang-undangan Indonesia; seperti tertib hukum Indonesia, asas politik dan tujuan negara. Wujudnya seperti terlihat pada : GBHN, hukum dan perundang-undangan, peradilan, sistem dan struktur pemerintahan, politik dalam dan luar negeri, keamanan dan keselamatan negara, kesejahteraan, kebudayaan, pendidikan, keagamaan dsb. Pada jaman reformasi yang paling menumental adalah adanya perubahan sistem pemerintahan yang sentralistik Orde Baru versi Presiden Soeharto ke *desentralistik otonomi daerah* dalam berbagai aspek kehidupan berpolitik dan bernegara. Pancasila dijabarkan dengan; Pemahaman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) Eka Prasetya Pancakarsa untuk setiap warga negara 'Eka Prasetya Pancakarsa' secara keseharian dalam tatanan kenegaraan menjadi 36 butir yang harus dipahami, dihayati, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada era reformasi Perubahan *pundamental terjadinya penyempurnaan UUD 1945*, dalam beberapa batang tubuhnya, pasal-pasal yang dianggap perlu penyempurnaan. Sehingga terjadinya keramaian pendapat tentang sistem pemerintahan dan

tatanan sistem politik sejak awal pemerintahan Presiden BJ Habibie, masa Presiden Abdurahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri, aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pemerintahan mengalami decline. *Aktualisasi Pancasila dengan semangat reformasi digencarkan lagi ketika Presiden Susilo Bambang Yudoyono, dengan otonomi daerah dalam segala bidang kehidupan.* Aktualisasi dalam kenegaraan tekanan itu pada *pembinaan karakter aparat sipil negara*, anti korupsi, sehingga dianggap strategis untuk mengingatkan kembali nilai-nilai karakter Pancasila dalam pembinaan warga negara. Pada masa Presiden Joko Widodo sebagai masa resurgensi adanya kebangkitan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial politik, dengan membentuk Unit Kerja Presiden Bidang Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP PIP).

(2) Secara **subjektif** realisasi penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma ke dalam diri setiap pribadi, warga negara, setiap penduduk, penguasa, setiap bangsa Indonesia. Meliputi kesadaran ketaatan, pemahaman serta kesiapan individu untuk dapat mengamalkan Pancasila, sehingga nilai-nilai ini dapat melekat dalam hati sanubari bangsa Indonesia. Dengan demikian disebut dengan kepribadian bangsa Indonesia yakni kepribadian Pancasila. Sehingga dapat memberikan ciri karakteristik yang khas menunjukkan perbedaan dengan bangsa lain. Menurut para ahli aktualisasi subjektif dianggap lebih esensial dari aktualisasi objektif, karena aktualisasi subjektif dimaknakan

sebagai kunci keberhasilan aktualisasi Pancasila secara objektif. Salah satu sikap ketuhanan yang penuh welas asih dan toleran itu harus diletakkan dalam kerangka semangat gotong royong memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Dalam kurun yang panjang semangat nilai ketuhanan itu telah lama memberikan landasan motivasi yang kuat kepada warga negara untuk berani menegakkan kebenaran dan keadilan (Yudi Latif, 2014 ,78)

Dalam kerangka merespon aktualisasi ideologi Pancasila, sebagai jawaban terhadap berbagai tantangan terhadap globalisasi ekonomi, politik, keterbukaan demokrasi dalam semua aspek kehidupan, dinamika keragaman, munculnya kekerasan, radikalisme dan terorisme internasional di Indonesia. Seolah membangkitkan semangat terhadap pepatah orang tua pendiri bangsa bahwa Pancasila sebagai falsafah bangsa, cita-cita bangsa (*ideological system*) dan sistem keyakinan (*belief system*) yang berlandaskan pada spiritualitas teistik sebagai kausa prima dan berorientasi pada keadilan sosial sebagai tujuan ultima, mesti dapat diaplikasikan dalam semua aspek kehidupan berbangsa bernegara dan bermasyarakat.

Aktualisasi nilai Pancasila bagi generasi milenial memiliki kekhasan tersendiri, sesuai dengan karakteristik zamannya. Ada kurang lebih 5,1 juta milenial di Indonesia tahun 2013 dalam rentang usia antara 21 - 22 tahun. Bagaimanakah nilai-nilai itu menarik loyalitas warga negara, bukan

hanya sebagai pemahaman penalaran (*logos*), tetapi *ethos*, yang dicontohkan oleh para pejabat negara. Etos kerja para pemimpin, dalam mengatasi masalah, pemenuhan kebutuhan dasar seluruh warga. Prinsip-prinsip dasar kaum milenial secara objektif, transparan, dan partisipatif. Bahkan dibelajarkan berbasis teknologi digital yakni ; berfikir kritis (*critical thinking*), komunikasi (*communication*), kolaborasi (*collaboration*) dan kreativitas (*creativity*). Respon pemerintah sejak zaman reformasi sampai sekarang cukup positif, dengan layanan publik, dalam berbagai aspek kehidupan. Kelompok generasi milenial pada dasarnya ingin adanya pengakuan tentang eksistensi mereka, bahwa mereka bisa melakukan sesuatu, terhadap bangsa dan negaranya dengan gayanya sendiri. Nilai kebangsaan, kepahlawanan, partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak terikat dengan waktu dan tempat, teknologi digital dapat membantu mereka, komunikasi yang cepat, partisipasi dalam berbagai hal dapat dilakukan.

C. Tantangan remaja Generasi Milenial

Tantangan remaja GM yang dirasakan adalah ekonomi global yang berbasis kompetensi digital. Munculnya berbagai transaksi berbasis web memunculkan berbagai tantangan yang kuat bagi generasi muda. Mesin-mesin pintar ada kesan memindahkan kesempatan kerja manusia ke tenaga-tenaga robot pintar, dalam berbagai

aspek kehidupan. Padahal jika diamati robotisasi dapat menciptakan peluang kerja yang sama bahkan lebih banyak kepada tenaga manusia yang terampil, asal manusia itu sendiri bisa membaca berbagai kesempatan, peluang-peluang yang ada. Dengan serba digital secara ekonomis memang lebih ringkas, aman, efisien segala transaksi belanja maupun layanan publik. Membayar pajak, listrik, kesehatan, pendidikan dan kemanan dapat dilakukan kapan saja, dimana saja, sesuai dengan aturan yang ada. Namun kecenderungan lain adalah warga negara bisa menjadi boros jika tidak terkontrol dalam berbelanja. Sikap kosumerisme dan kosmopolitanisme selalu menghinggapi setiap warga jika tidak selalu diingatkan. Gaya hidup serba instan kadang menghinggapi setiap remaja termasuk dalam kehidupan berpolitik, sehingga tidak heran penyakit itu ada disetiap partai politik.

Kecepatan informasi yang begitu hebat dalam berbagai hal membutuhkan semua orang selalu siap, sehingga ketergantungan akan informasi amat terasa. Tetapi yang mereka merasa risihkan adalah berita bohong, dan ujaran kebencian, karena bisa merusak kredibilitas seseorang dan lembaga. Ujaran kebencian (*heat speech*) di media sosial bagaikan air dan ikan, maknanya ujaran kebencian identik dengan media sosial. Sebab media itu merupakan wahana yang dijadikan oknum-oknum untuk menyampaikan unek-unek, ancaman, hujatan, hinaan, teror dengan sasaran seseorang individu atau kelompok.

Tujuannya adalah menyebarkan ketidaksenangan, menyampakkan, menghinakan orang lain atau kelompok lain. Sehingga semua orang mengetahui eksistensi dan kondisi yang dibenci itu. Masifnya informasi itu dengan cepat menggurita sehingga dapat diakses oleh siapapun pengguna informasi itu. Dalam perkembangan *cyberspace* (dunia maya) laksana jalan tol bagi lancarnya penyebaran ujaran kebencian, lantaran di dunia nyata orang dibatasi dengan identitas diri kita yang sebenarnya. Di dunia maya kita bisa 'menjadi' siapa saja. Bisa menjadi pro atau kontra, penyembunyian identitas adalah salah satu aspek superior dari *cyberspace* (Brown, 2017;2). Pandangan Graham dalam Brown (2017;2) selanjutnya mengatakan bahwa anonimitas internet memberikan kesempatan orang-orang untuk berbicara secara bebas, tanpa takut orang lain akan memberikan respon yang tidak baik hanya karena warna kulit mereka, orientasi seksual mereka atau jenis kelamin, bahkan bisa jadi melampaui batas dibandingkan dengan dunia nyata. Menurut para netizen identitas seseorang bisa menjadi lebih dari satu bahkan amat bervariasi bentuk dan ragamnya. Apabila ujaran kebencian sudah mendominasi, merasuk pada karakter dan watak seseorang atau kelompok, maka akan menjadi liar, dan buas, bahkan merusak karakter bangsa. Secara hukum formal ujaran kebencian muncul di persidangan Julius Streicher dan Hans Fritzche di Pengadilan Militer Internasional yang dimulai pada 6 Oktober 1945 (Mawara;

2018; 40-41) tentang tuntutan ujaran kebencian, yang tidak terbukti dapat menyebabkan berbagai tindakan kekejaman oleh orang lain. Tetapi yang menjadi kesan dalam persidangan itu adalah bahwa unsur niat dan kausalitas perlu menjadi perhatian utama dalam kajian penanggulangan ujaran kebencian.

Tantangan lain untuk remaja GM saat ini adalah radikalisme, ekstrimis yang melanda para pemuda dengan latar kelompok sosial, agama dengan sebaran media sosial jaringan nasional, regional dan internasional. Hal ini diperlukan bimbingan para orang tua dan guru mengajak remaja untuk lebih belajar mendekatkan diri pada nilai-nilai agama yang dianutnya dengan seksama, tidak karena hasutan dan ajakan yang keliru. Disamping tantangan siber yang kuat juga yang kokoh dan menakutkan remaja GM adalah narkoba, bukan hanya alat itu lebih mudah diperoleh juga semakin banyak. Alternatif anak supaya tidak masuk jaringan itu lebih banyak anak diajak dialog, belajar terbuka, antara anak dan orang tua, sekalipun orang tua sibuk diupayakan adanya waktu untuk bersama. Makan bersama, rekreasi bersama, nonton bersama, untuk adanya kedekatan harmonis diantara mereka. Orang tua, atau guru lebih bisa menghargai untuk kesendirian remaja, ketika diperlukan untuk apresiasi, keyakinan, nangis sendiri, merenung sendiri, dan sekaligus memecahkan sendiri masalahnya.

D. Kesimpulan

RI 0.4t dapat menyebabkan terjadinya perubahan besar pada fitrah manusia dan berujung pada pertanyaan filosofis mengenai eksistensi dan nilai manusia secara hakiki - dan ini bahkan terjadi lebih cepat dari yang dapat dibayangkan sebelumnya. Tentunya, teknologi bukan merupakan kekuatan besar tersendiri yang tidak dapat kita kontrol. Kita tidak dibatasi oleh pilihan dasar antara menerima atau menolak. Sebaliknya, setiap keputusan yang kita ambil setiap hari sebagai orang tua, guru, remaja milenial sebagai penduduk, konsumen, maupun investor justru memajukan teknologi. Semakin kita berpikir tentang keputusan-keputusan itu, semakin kita mempertanyakan model sosial yang berlaku saat ini, semakin baik kesempatan kita untuk membentuk suatu transformasi yang memungkinkan tercapainya tujuan kita bersama serta menjunjung tinggi nilai-nilai dasar kemanusiaan.

Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila untuk generasi milenial dapat dikembangkan dengan tujuan mereka dapat memahami, menyadari, dan mengamalkan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini ditandai dengan adanya pandangan hidup, panduan, norma kehidupan antar individu dan lembaga negara visi-misi kebangsaan berbasis nilai kepribadian Pancasila dan UUD 1945. Sosialisasi nilai itu dengan berbagai cara yang fleksibel berbasis on-line atau of-line sesuai

dengan perkembangan psikologi remaja/pemuda yang fleksibel, demokratis, dinamik, simpel, efektif. Jika mereka diberikan kepercayaan dan tidak didominasi oleh orang tua/generasi elit yang merasa dituakan maka generasi ini memiliki potensi yang menggembirakan pada masa mendatang. Berilah kepercayaan yang kuat, binalah keyakinan dengan contoh ketauladanan, kerja keras, kerja cerdas masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Brown, Alexander (2017), What is so special about online (as compared to offline) hate speech? *Ethnicities Jurnal*, Vol.(1) , halaman 1-30

Gleason W Nancy (2018) *Higher Education in The Era Of The Fourth Industrial Revolution*, Singapore Yale-NUS College

Ketetapan -Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1978, Team Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia

Latif Yudi (2014) *Mata Air Keteladanan Pancasila dalam Perbuatan*, Jakarta, Penerbit Mizan

Mohammad Hatta, Ahmad Subardjo DJ, Maramis, Sunario, Pringgodigdo AG (1977) Panitia Lima, Uraian PANCASILA, Jakarta, Penerbit Mutiara.

Mawara Engel Ricky (2018) Peran Jurnalis Dalam Mencegah Ujaran Kebencian di Media Sosial Sebagai Usaha Untuk Meningkatkan Solidaritas Masyarakat Multietnik Melalui Literasi Media, Tesis, Departemen Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia

<https://www.identimes.com>.Life INSP. Karakteristik Millennial (27/2/2019)
..... Kompas.com.Revolusi Industri 4.0 diuduh tanggal 17 Ok 2018

**AKTUALISASI CINTA TANAH AIR:
Apa yang Membuat Kaum Milenial Bangga Berbangsa Indonesia ?**

Karim Suryadi

Abstrak

Dilihat dari tahun kelahiran, mereka yang disebut kaum milenial tidak menunjuk pada angka yang sama. Espinoza & Mick (2016) menyebut *the millennial or generation Y* sebagai mereka yang lahir antara 1980-2000, sedangkan McGlynn (2005) menyebut kaum milenial kepada mereka yang lahir pasca 1992. Meski batasan tahun kelahiran kaum milenial tidak sama, namun generasi ini dipandang memiliki karakteristik, tantangan, dan kompetensi yang khas (Davies, Fidler & Gorbis, 2011) dibanding generasi sebelumnya.

Kaum milenial bisa disebut anak peradaban serba internet (*internet of things*). Mereka tumbuh dan berkembang di kampung-kampung yang terkoneksi secara global, dikelilingi mesin pintar, dan dimanjakan oleh berbagai media baru. Mereka umumnya anak-anak muda kreatif, melek teknologi, dan memiliki rasa ingin tahu yang kuat. Sayangnya, mereka cenderung malas bergerak dan gemar menempuh jalan pintas (*short cut*), dan kurang menghargai proses.

Ketergantungan kaum milenial pada *smartphone* bukan hanya telah mengubah gaya hidup, namun juga diikuti penjadwalan ulang aktivitas mereka. Mereka tidak terbiasa membaca buku cetak yang tebal, juga tidak begitu menggilai media *mainstream*.

Dalam urusan mencari informasi dan hiburan, *google* dan *youtube* telah mendisrupsi buku, majalah, televisi, dan radio, sekaligus mengurangi ketergantungan mereka kepada orang

tua dan guru. Untuk urusan jalan-jalan, mereka lebih bersahabat dengan *grab* dibanding ojeg pangkalan. Hasrat berbelanja mereka pun kian mudah disalurkan semudah menekan *keyboard smartphone*.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi bukan hanya memudahkan mereka dalam mencari, memesan, dan membayar (*look, book, pay*) barang dan jasa, tetapi juga menafsir ulang tentang apa artinya berhemat. Lebih dari itu, derasnya terpaan informasi global mendorong kaum milenial untuk mempertanyakan kembali jati diri, makna relasi sosial, dan cara-cara hidup berbangsa. Pertanyaan tentang hal-hal tadi sulit dihindari karena tidak ada informasi yang bebas nilai.

Uraian berikut akan membahas pasang surut rasa cinta tanah air kaum milenial baik karena aktivitasnya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi maupun refleksinya tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk kepentingan ini, telah dilakukan jajak pendapat kepada 225 orang mahasiswa yang lahir antara 1996 dan 1999. Kepada mereka diajukan pertanyaan terbuka tentang contoh-contoh tindakan yang paling mencerminkan rasa cinta tanah air, paling bertentangan dengan rasa cinta tanah air, tindakan yang dapat memupuk rasa cinta tanah air, kelakuan yang dapat mengikis rasa cinta tanah air, serta hal-hal yang dapat membuat bangga dan hal-hal yang dinilai dapat merusak rasa bangga sebagai Bangsa Indonesia.

Contoh Buruk Korupsi

Dalam pandangan kaum milenial, korupsi bukan hanya tindakan melawan hukum dan ulah pemimpin tidak cerdas, tetapi dinilai sebagai virus yang dapat mengikis kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Merajalelanya korupsi disebut sebagai ancaman yang paling merusak rasa bangga sebagai Bangsa Indonesia. Mereka pun mengaku, rasa bangga mereka terusik ketika melihat penegakan hukum yang tidak adil, simbol-simbol negara tak berdaya menahan gempuran pengaruh asing, saat pemimpin nasional bertindak tidak cerdas, dan ketika warga masyarakat bertindak tidak tertib.

Apa makna semua ini? Selain mengindikasikan bergesernya spektrum ancaman terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa, kaum milenial menunjukkan permusuhan nyata terhadap tindakan pemimpin korup.

Ancaman terhadap keselamatan bangsa tidak lagi berupa pertempuran di medan perang, aneksasi wilayah, atau serangan fisik lainnya. Serangan dalam bentuk pengaburan nilai melalui simbol dan budaya asing, ancaman terhadap orientasi berpikir (*soft power*), atau berkembangnya pemikiran yang tidak berlandaskan fakta atau mengaburkan fakta dan opini (*post truth*) dipercaya sebagai bentuk ancaman baru.

Bila suatu negara terlibat perang, musuhnya tidak terang-terangan datang dari luar. Kelompok yang bertempur umumnya faksi-faksi

yang bertikai di dalam negeri yang disokong kekuatan asing. Inilah wujud mutakhir perang, yang berhadapan sesama warga, yang pikirannya sudah dirasuki nafsu bertempur.

Motifnya pun bisa ekonomi, atau pun alokasi jabatan yang tidak tuntas di bilik suara. Atau bisa pula tindakan rasial yang dibalas dengan pengusiran. Pendek kata, perang saudara lebih mungkin terjadi ketimbang pertempuran melawan kolonialis.

Sejurus dengan permusuhannya terhadap tindakan korup dan bodoh, generasi milenial mengaku kebanggaan mereka sebagai Bangsa Indonesia menguat bila melihat tindakan prestisius yang dilakukan sesama warga bangsa. Tindakan prestisius yang mereka apresiasi bisa berlaku dalam bidang apa saja, yang merupakan pencapaian tertinggi dalam rentang manusia normal. Jika korupsi dipandang sebagai gaya sentrifugal, maka tindakan prestisius memiliki gaya sentripetal.

Kaum milenial yang berpandangan jauh ke depan ibarat hawa murni yang dibutuhkan membangun sistem politik yang sehat (*robust democracy*). Berbeda dengan generasi sebelumnya yang suka membandingkan dengan rezim-rezim yang sudah lewat, orientasi kaum milenial lurus ke depan. Kalaupun membandingkan, mereka hanya mencocokkan realitas politik yang ada di hadapan mereka dengan teori yang mereka pelajari.

Apa rahasia kaum milenial begitu membenci korupsi? Korupsi dibenci karena merampas masa depan mereka. Jika dana yang dikorupsi adalah hasil

pinjaman dari luar negeri, dampaknya kian parah. Mereka akan mewarisi utang negara, namun tidak menikmati fasilitas yang dibangun secara asal-asalan, bahkan mangkrak karena ketiadaan dana.

Menghentikan tindakan korup, penegakan hukum secara adil dan menjamin kepastian hukum, memperkokoh identitas bangsa dan tidak mudah tunduk pada pengaruh luar adalah beberapa ikhtiar yang mesti dilakukan untuk menjaga kebanggaan kaum milenial tentang bangsanya. Aspek-aspek ini lebih mudah diucapkan ketimbang mewujudkannya dalam tindakan, namun bukan merupakan sesuatu yang mustahil jika ada komitmen kuat untuk menghadirkannya di tengah kehidupan warga.

Apa yang Bisa Dilakukan ?

Kaum milenial umumnya dibesarkan dalam keluarga yang demokratis, terbiasa dengan proyek akademik dalam sebuah tim, dan menjalani tumbuh kembang dalam lingkungan yang lebih ramah terhadap teknologi. Pola asuh seperti ini menuntut cara-cara baru dalam proses penanaman nilai cinta tanah air (dan nilai-nilai Pancasila lainnya).

Aktualisasi rasa cinta tanah air dan nilai-nilai Pancasila menuntut daya lenting yang kuat. Usaha ini tidak bisa lagi dilakukan secara indoktrinasi dan berbagai pola komunikasi satu arah, namun harus bergeser kepada cara-cara dialogis yang memberi kesempatan bagi peserta untuk

menangkap makna.

Mewaspadai ancaman berwajah lembut (*soft power*) dan membangun ketahanan informasional merupakan dua langkah strategis dalam menghadapi era kesejagatan saat ini. Sebagai konsekuensinya, deformalisasi pendidikan kebangsaan harus dilakukan, sehingga usaha memupuk komitmen berbangsa tidak hanya dilakukan lewat cara-cara formal seperti latihan militer, seminar kebangsaan, atau kursus bela negara.

Faktor-faktor yang memperkokoh dan memperlemah persatuan bangsa bertransformasi sesuai dengan perkembangan masyarakat. Ancaman paling potensial yang dihadapi Indonesia (dan juga negara lain) tidak dalam bentuk invasi militer, melainkan kekuatan berwajah lembut (*soft power*), yakni serangan terhadap pikiran warga sebagai instrumen yang merusak relasi kekuasaan dalam sebuah negara.

Ancaman yang mengikis rasa berbangsa merasuk seperti virus, merusak imunitas sebagai bangsa, rentan terhadap campur tangan dan rekayasa jahat kekuatan asing. Wujud konkretnya berupa penyangkalan terhadap simbol negara dan menggilai segala hal yang datang dari Barat (*westronomia*). Bila sudah terkena virus ini, elemen bangsa akan menjadi “inang” tempat hinggapnya pikiran jahat yang disuntikan kekuatan asing, atau kekuatan internal yang dikendalikan aktor luar.

Itulah sebabnya, kita bisa melihat pola perang yang hampir sama di negara-negara Timur Tengah. Perang

bukan melawan tentara asing secara langsung, melainkan perang saudara yang dibantu atau dikendalikan kekuatan asing. Sebenarnya yang bertempur kekuatan asing, namun melalui tangan-tangan kekuatan yang beroperasi di dalam negeri.

Kemajuan teknologi informasi memberi jalan bagi terjadinya saling tukar informasi, termasuk mengenai hal-hal paling tabu atau bahkan menyerempet rahasia negara. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadi jalan pintas transaksi antar pikiran. Transaksi antarpikiran adalah sesuatu yang laten, dan tidak mudah dipantau.

Orang tua, guru, bahkan polisi yang bersenjata pun, hanya bisa mengawasi pergerakan fisik orang, namun bukan jalan pikirannya. Kita tidak akan pernah tahu mana orang yang selektif dalam memilah berita bohong atau berita palsu dan mana yang menjadi penggemar setianya. Karena itu, yang harus dibangun adalah ketahanan informasional, berupa daya kritis dan disiplin konfirmasi dalam setiap usaha pemerolehan informasi. Bila menemukan berita aneh, konfirmasilah. Atau cari sumber berita lain yang bisa menjadi *clearing house*. Ragukan kebenaran berita anonim hingga ia terkonfirmasi kebenarannya.

Karena spektrum ancaman telah berubah maka deformalisasi pendidikan kebangsaan harus dilakukan. Usaha memupuk rasa berbangsa tidak boleh dimaknai secara sempit, namun bisa dilakukan dalam beragam bentuk dan konteks. Jangan pernah menganggap usaha memupuk

rasa berbangsa hanya bisa dilakukan lewat cara-cara formal seperti latihan militer, seminar kebangsaan, atau kursus bela negara. Bentuk-bentuk tadi tidak haram dilakukan, tetapi bukan satu-satunya.

Memupuk rasa berbangsa harus menjadi kegiatan yang serba hadir, melalui beragam bentuk aktivitas warga. Para sineas bisa menampilkan merah putih dalam setiap film yang diproduksinya, tidak melulu dalam film perang atau perjuangan yang biasa dilakukan beberapa dekade silam. Para guru bisa memupuk rasa berbangsa lewat aktivitas mengajarnya, baik seni, olah raga, atau lingkungan. Semua guru mata pelajaran bisa mengambil peran ini. Mahasiswa bisa menyebarkan semangat berbangsa dengan mengajak pengguna media sosial untuk kreatif mencipta pesan, bukan sekedar menjadi *follower* semata.

Semakin hanyut pada gagasan orang, semakin tenggelam jati diri seseorang. Dengan media sosial, semua orang berpotensi jadi Selebritis, tokoh yang pikiran dan gagasannya diikuti banyak orang. Kuncinya, keterlibatan dan tunjukan otentisitas pemikiran Anda.

Kita tidak dilahirkan untuk menjadi pengagum, namun ditugaskan untuk mencipta gagasan yang maslahat. Itulah sebabnya, Tuhan mewarisi kapasitas berpikir kita yang tanpa batas, bahkan melampaui umur yang mungkin kita punya.

Soekarno, Hatta, dan para tokoh pendiri bangsa lainnya telah memilih jalan kebangsaan yang tidak

didasarkan atas agama, suku, atau faktor-faktor objektif lain, tetapi mengikat rasa berbangsa dengan kemauan bersama untuk hidup sebagai warga bangsa. Komitmen kebangsaanlah yang menyatukan keragaman warga bangsa kita. Karena itu, jangan main-main dengan isu agama dan etnis karena keduanya akan seperti rumput kering yang mudah terbakar. Bangsa ini hanya dipersatukan oleh seutas kehendak bersama untuk hidup sebagai bangsa yang bisa saja putus bila komitmen untuk bersatu dihancurkan. Sebuah komitmen yang tidak bisa dijaga dengan bedil dan penjara, melainkan terpupuk oleh prestasi yang memunculkan kebanggaan sebagai Bangsa Indonesia.

Dibutuhkan infrastruktur kewarganegaraan untuk memupuk kesadaran berbangsa kaum milenial. Memupuk rasa berbangsa harus dilakukan secara simultan dengan penyiapan kompetensi mereka. Dua hal ini penting dilakukan agar kemunculan kaum milenial benar-benar menjadi bonus (Kementerian Perindustrian, 2018), dan bukan sebagai petaka demografi.***

Rujukan

Anna Davies, Devin Fidler, Marina Gorbis, 2011, *Future Work Skills 2020*, Institute for The Future, University of Phoenix Research Institute.

Espinoza, Chip and Mick Ukleja, 2016, *Managing the Millennials: Discover the Core Competencies for Managing Today's Workforce*, John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey.

Kementerian Perindustrian, 2018, *Indonesia Transformation Making Indonesia 4.0*, Jakarta: 27 September 2018.

McGlynn, Angela Provitera, 2005, *Our Newest Cultural Cohort*, The Hispanic Outlook in Higher Education, 16, October.

AKTUALISASI PENDIDIKAN PANCASILA DI SEKOLAH BAGI “GENERASI Z” MELALUI HABITUASI

Kokom Komalasari ¹

Abstrak

Peserta didik di persekolahan merupakan “Generasi Z atau Generasi Net” yang lahir dan menjalani kehidupan di era digital dengan karakteristik tersendiri yaitu memiliki ambisi besar untuk sukses, berperilaku instan, cinta kebebasan, percaya diri, menyukai hal yang detail, keinginan untuk mendapatkan pengakuan, digital dan teknologi informasi. Di sisi lain “Generasi Z” ini menghadapi masalah degradasi nilai, moral, dan norma Pancasila yang diakibatkan arus informasi tanpa batas (borderless) semakin membuka masuknya pengaruh kuat ideologi lain. Oleh karena itu perlu aktualisasi Pendidikan Pancasila di sekolah melalui pendekatan habituasi, sehingga mampu memberikan pemahaman, internalisasi, dan penerapan Pancasila (in action) bagi “Generasi Z”. Proses habituasi dilaksanakan melalui langkah-langkah: 1) pengembangan nilai-nilai Pancasila; 2) nilai Pancasila dan perilaku yang diharapkan didefinisikan dan dirumuskan secara jelas; 3) Perilaku yang diharapkan sesuai nilai Pancasila dituangkan dalam tata tertib sekolah; 4) Perilaku sesuai nilai Pancasila dibelajarkan dalam konteks sesungguhnya; 5) Perilaku yang sudah sesuai dengan harapan dihargai secara teratur; dan 6) Perilaku yang menyimpang dikoreksi secara proaktif dan dengan prosedur yang jelas. Dalam Pelaksanaan habituasi nilai-nilai Pancasila perlu ditegakkan prinsip keteladanan, penghargaan, sanksi yang tepat, dan teguran.

Kata Kunci: Pendidikan Pancasila, Generasi Z, Sekolah, Habituasi.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi sangat cepat membuat setiap generasi memiliki karakter dan kepribadian masing-masing berdasarkan zamannya. Berdasarkan persepektif sosiologi selama 100 tahun ini dibagi menjadi 5 generasi, yaitu: (1) generasi baby boomers/baby immigrant (lahir rentang >1960); (2) Generasi X (lahir

tahun 1961-1980); (3) Generasi Y Milenial (lahir tahun 1981-2000); (4) Generasi Z (lahir tahun 2001-2010); dan Generasi Alpha (Lahir tahun 2011 – sekarang). Masing-masing generasi menunjukkan karakter tersendiri (Renzulli, 2017). Jika melihat pembagian generasi berdasarkan usia, maka generasi yang saat ini mendominasi sebagai peserta didik di sekolah pada jenjang Pendidikan Dasar

¹) Guru Besar Bidang Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada Departemen Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia, kokom@upi.edu.

dan Pendidikan Menengah bukan lagi “Generasi Milenial” tetapi “Generasi Z” (usia 8-18 tahun) atau disebut juga “Generasi Net”. Generasi ini lahir saat internet telah berkembang pesat dalam kehidupan manusia. Mereka lahir tanpa mengetahui masa kehidupan tanpa internet, komputer, dan telepon genggam. Dengan kata lain, generasi ini lahir di era digital dan menjalani awal kehidupan di era Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan sistem *cyber-physical*, dimana industri mulai menyentuh dunia virtual, berbentuk konektivitas manusia, mesin dan data, semua sudah ada di mana-mana. Istilah ini dikenal dengan nama *internet of things* (Kearney, 2016).

“Generasi Z” yang hidup di Era Revolusi Industri 4.0 ini menghadapi permasalahan tergerusnya nilai, moral dan norma Pancasila dalam kehidupan sehari-hari karena semakin terbukanya penggunaan media internet tanpa batas ruang, waktu, dan wilayah negara (*borederless*), semakin membuka peluang lebar masuknya pengaruh beragam ideologi yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila. Oleh karena itu perlu penguatan dan pengokohan pendidikan Pancasila yang tidak hanya memberikan pemahaman tentang Pancasila sebagai ideolog negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, tetapi lebih jauh menginternalisasi dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila (*in action*) dalam kehidupan sehari-hari bagi “Generasi Z” Indonesia. Tentunya perlu upaya Pendidikan Pancasila yang memperhatikan karakteristik “Generasi Z” ini sebagaimana

sabda Rasulullah Muhammad SAW bahwa “didiklah Anakmu pada jamannya”. Sekolah merupakan lembaga Pendidikan formal sekaligus *Community of Character*, sangatlah tepat sebagai wahana untuk pelaksanaan Pendidikan Pancasila yang mendidik nilai-nilai Pancasila *in action* sesuai konteks era digital melalui pendekatan habituasi.

Karakteristik “Generasi Z”

Santosa E.T (2015) mencatat ada 7 karakteristik “Generasi Z”, dan tentunya memerlukan balikan atau upaya guru untuk mendidik “Generasi Z” sesuai dengan zamannya dan karakter yang berkembang.

1. Memiliki ambisi besar untuk sukses

“Kids zaman now” ini cenderung memiliki ambisi besar untuk sukses, dikarenakan semakin banyaknya *role model* yang mereka idolakan. Sebenarnya ambisi atau *goals* inilah yang diperlukan anak sejak dini. Jadi tugas guru mendefinisikan *goals* atau cita-cita peserta didiknya dengan jelas, serta mengarahkan upaya pencapaiannya.

2. Berperilaku instan

“Generasi Z” menyukai pemecahan masalah yang lebih praktis. Mereka tidak mau meluangkan proses panjang untuk mencermati suatu masalah, karena mereka lahir di dalam dunia yang serba instan. Oleh sebab itu, guru sebaiknya perlu mendidik “Generasi Z” tentang konsep proses, daya tahan,

dan komitmen dalam menyelesaikan masalah.

3. Cinta kebebasan

"Generasi Z" suka dengan kebebasan, baik itu kebebasan berpendapat, kebebasan berkreasi, kebebasan berekspresi, dan lain sebagainya. "Generasi Z" harus diperkenalkan dengan kebebasan yang bertanggung jawab, kebebasan yang dibatasi oleh peraturan, dan tentunya "Generasi Z" memerlukan penjelasan logis dari sebuah peraturan.

4. Percaya Diri

Karakteristik "Generasi Z" yang keempat adalah percaya diri yang sangat tinggi, memiliki sikap optimistis dalam banyak hal. Mental positif yang seperti ini memang hal yang utama dalam hidup, yaitu bisa melihat permasalahan dari segi positif. Guru perlu berhati-hati jangan sampai menjatuhkan rasa percaya diri mereka saat memberi masukan, perlu memberikan lingkungan kondusif agar kepercayaan diri dan kompetensi diri anak tumbuh subur.

5. Menyukai hal yang detail

Tak hanya memiliki kepercayaan diri yang tinggi, anak-anak yang lahir di era ini juga menyukai hal yang detail. "Generasi Z" termasuk generasi yang cenderung kritis dalam berpikir dan detail mencermati suatu permasalahan.

6. Keinginan untuk mendapatkan pengakuan

Pada dasarnya setiap orang pasti memiliki keinginan agar diakui atas kerja keras, usaha, dan kompetensi yang telah didedikasikannya. Namun, "Generasi Z" ini cenderung ingin diberikan pengakuan dalam bentuk *reward* (pujian, hadiah, sertifikat, dan penghargaan), karena kemampuan dan eksistensinya sebagai individu yang unik.

7. Digital dan teknologi informasi

"Generasi Z" sangat terampil dalam menggunakan segala macam *gadget* yang ada, dan menggunakan teknologi dalam keseluruhan aspek serta fungsi sehari-hari. "Generasi Z" lebih memilih berkomunikasi melalui dunia maya dan media sosial dibanding menghabiskan waktu bertatap muka dengan orang lain. Aspek positifnya, "Generasi Z" menjadi bagian dari komunitas berskala besar dalam sebuah jaringan media dan teknologi tanpa mengenal satu sama lain melalui internet. Namun, aspek negatifnya mereka memiliki kemampuan komunikasi publik yang cukup rendah.

Ketujuh karakteristik "Generasi Z" tersebut jika dikaitkan dengan 18 nilai karakter dari Kementerian Pendidikan Nasional (2010b) memiliki persinggungan, dimana karakteristik "Generasi Z" memiliki potensi untuk berkembang positif, jika dikembangkan melalui karakter-karakter tertentu yang sesuai sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Karakter yang Harus Dikembangkan sesuai Karakteristik “Generasi Z”

No	Karakteristik “Generasi Z”	Karakter yang Harus Dikembangkan
1.	Memiliki ambisi besar untuk sukses	Jujur Disiplin
2.	Berperilaku instan	Kerja keras Peduli Sosial Peduli lingkungan
3.	Cinta Kebebasan	Demokratis Semangat kebangsaan Cinta Tanah Air
4.	Percaya Diri	Mandiri Tanggung Jawab
5.	Menyukai hal yang detail	Rasa Ingin Tahu Kreatif
6.	Keinginan untuk Mendapatkan Pengakuan	Toleransi Menghargai Prestasi Cinta Dalam
7.	Digital dan Teknologi Informasi	Gemar Membaca Bersahabatat/Komunikatif

Dengan demikian, guru sebagai pendidik di sekolah hendaknya mengintegrasikan nilai-nilai karakter sesuai karakteristik “Generasi Z” dalam kegiatan habituasi di sekolah.

Habituasi: Strategi Aktualisasi Pendidikan Pancasila di Sekolah

Pendidikan Pancasila adalah Pendidikan karakter Pancasila. Lanqing (2003) mengemukakan bahwa untuk mengembangkan pendidikan karakter harus diawali dengan eksplorasi mencari model-model

individu dalam konteks kehidupan tertentu. Melalui konteks tertentu ditetapkan model pengembangan karakter diri yang sesuai. Kementerian Pendidikan Nasional (2010a: 30) menyebutkan bahwa salah satu pendekatan pendidikan karakter adalah Pendekatan habituasi, yaitu diciptakan situasi dan kondisi dan penguatan yang memungkinkan peserta didik pada satuan pendidikannya, di rumahnya, di lingkungan masyarakatnya membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai dan menjadi karakter

yang telah diinternalisasi dan dipersonalisasi dari dan melalui proses intervensi. Proses habitiasi sebagai penciptaan aneka situasi dan kondisi (*persistent-life situation*) yang berisi aneka penguatan (*reinforcement*) yang memungkinkan peserta didik pada satuan pendidikannya, di rumahnya, di lingkungan masyarakatnya membiasakan diri berperilaku sesuai nilai dan menjadikan perangkat nilai yang telah diinternalisasi dan dipersonalisasi melalui proses olah hati, olah pikir, olah raga dan olah rasa dan karsa itu sebagai karakter atau watak (Budimansyah, 2010: 62-63). Habitiasi sebagai pembiasaan yang artinya "merupakan proses pembentukan sikap dan perilaku yang relatif menetap dan bersifat otomatis melalui proses pembelajaran yang berulang-ulang" (Departemen Pendidikan Nasional, 2007: 4)

Pendidikan karakter terkait erat dengan *habit* atau kebiasaan yang terus menerus dipraktikan atau dilakukan (Kementerian Pendidikan Nasional, 2010b: 10). Pembiasaan dapat dipahami sebagai pembudayaan (*internalization*) dan pelembagaan (*institusialization*). Makna pertama merujuk pada upaya penanaman suatu nilai, sikap, perasaan, pandangan dan pengetahuan yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat kepada individu-individu anggota kebudayaan bersangkutan. Sedangkan makna kedua menekankan pada aspek nilai, norma dan perilaku yang disepakati secara bersama oleh individu dalam suatu konteks sosial, mengendalikan dan mengarahkan

perilaku untuk mencapai tujuan yang bersifat spesifik. (Naping, 2007:67).

Habitiasi sebagai aktualisasi dari pendidikan karakter, diperjelas Megawangi (2004: 114) yang menyatakan bahwa "pendidikan karakter adalah mendidik seseorang untuk terbiasa berperilaku baik, sehingga ia menjadi terbiasa dan akan merasa bersalah kalau tidak melakukannya". Namun terbiasa belumlah cukup karena belum tentu kebiasaan tersebut melekat menjadi suatu prosedur tetap untuk menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda. Pendapat Megawangi (2004: 114) menekankan bahwa keinginan untuk berbuat baik adalah bersumber dari kecintaan untuk berbuat baik (*loving the good*). Aspek kecintaan inilah yang disebut Piaget sebagai sumber energi dari dapat berfungsinya secara efektif pengetahuan tentang moral, sehingga bisa membuat seseorang mempunyai karakter yang konsisten. Berkowitz (2003) menegaskan bahwa "kebiasaan berbuat baik tidak selalu menjamin bahwa manusia yang telah terbiasa tersebut secara sadar (*cognition*) menghargai pentingnya nilai-nilai karakter (*valuing*)". Oleh karena itu, pendidikan karakter memerlukan juga aspek emosi. Menurut Lickona (1992), komponen ini adalah disebut "*desiring the good*" atau keinginan untuk berbuat baik. Berkowitz (2003) membagi dua aspek emosi ini yaitu *self-censorship* (kontrol internal dan pro-sosial). Kontrol internal adalah keterkaitan dengan adanya perasaan bersalah (*guilty feeling*) dan malu

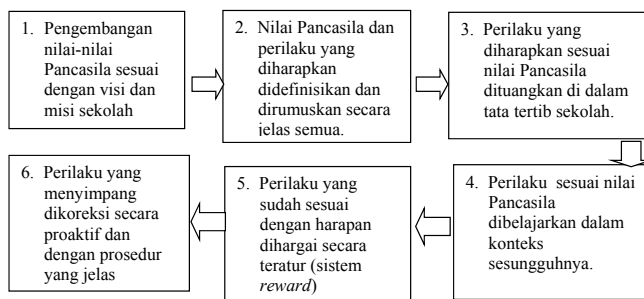
(*shame*), dimana kontrol ini akan mencegah seseorang dari perilaku buruk dan selalu ada keinginan untuk memperbaiki diri. Sedangkan aspek pro-sosial adalah terkait dengan emosi yang timbul karena melihat kesulitan atau penderitaan orang lain, dan ini biasa disebut dengan rasa empati dan simpati.

Integrasi Nilai-Nilai Pancasila dalam dalam Habitiasi

Karakter didefinisikan sebagai sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari orang lain. Karakter yang diartikan sebagai tanda khusus atau pola perilaku (*an individuals pattern of behavior ... his moral contitution*) (Bohlin et.al, 2001: 1). Karakter adalah kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu sistem, yang melandasi

pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan. Pancasila menjadi pribadi bangsa mengandung makna bahwa Pancasila harus menjadi karakter bangsa Indonesia. Seluruh tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia menggunakan Pancasila sebagai dasar moral atau norma dan tolok ukur tentang baik buruk dan benar salahnya sikap, perbuatan dan tingkah laku bangsa Indonesia.

Nilai-nilai karakter Pancasila dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari siswa dan semua sivitas akademika sekolah, baik dituangkan dalam aturan tertulis maupun tidak tertulis, sehingga menjadi sebuah budaya sekolah. Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam habitiasi di sekolah dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagaimana digambarkan berikut ini:



Gambar 1. Langkah-Langkah Integrasi Nilai-Nilai Kehidupan dalam Habitiasi (Komalasari dan Saripudin, 2017; Saripudin dan Komalasari, 2015)

Langkah 1 sampai 3 di atas disusun melalui kegiatan mengidentifikasi nilai karakter yang terkandung dalam setiap sila Pancasila dan aplikasinya melalui kegiatan mengidentifikasi nilai karakter yang terkandung dalam melalui habituaasi sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Pengejawantahan Nilai Pancasila dalam Habituaasi di Sekolah

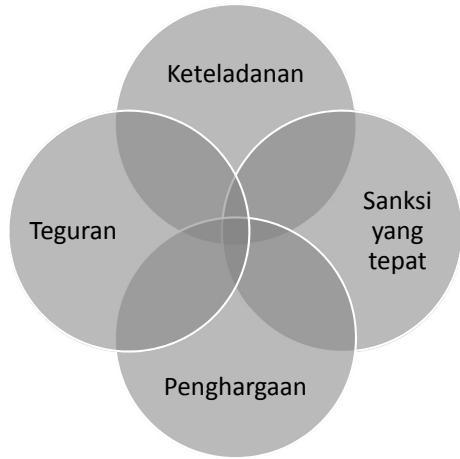
SILA PANCASILA		NILAI	TATA TERTIB SEKOLAH
1. Ketuhanan Yang Maha Esa	Religius	<ul style="list-style-type: none"> • Membiasakan berdoa bersama sebelum dan setelah pelajaran berlangsung • Melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya • Mengkaji/mempelajari ajaran agama masing-masing di luar jam pelajaran agama • Memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk beribadah di sekolah • Menghormati orng yang sedang menjalankan ibadah • Merayakan hari-hari besar keagamaan. 	
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab	Kemanusiaan	<ul style="list-style-type: none"> • Senyum, salam, dan sapa bila bertemu dengan guru, tamu, atau teman. • Berbicara santun kepada oprang tua, guru, tamu, daa teman. • Mengormati dan membantu tamu yang datang ke sekolah. • Membantu guru, teman, dan sivitas akedemika sekolah yang memerlukan bantuan. • Berempati kepada teman yang dilanda musibah. • Tidak menghina teman yang kurang (ekonominya, pelajarannya, fisiknya, penampilannya). • Melaksanakan tugas bersama-sama (untuk tugas kelompok). • Mengingatkan teman jika ada yang lalai atau melakukan perbuatan tercela. • Mengajak teman untuk melaksanakan tugas, dan tindakan-tindakan terpuji. • Berusaha menjadi contoh/teladan bagi teman-temannya (emosional, spiritual). 	

SILA PANCASILA		NILAI	TATA TERTIB SEKOLAH
3. Persatuan Indonesia	Persatuan	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan upacara bendera dengan khidmat. • Melaksanakan kegiatan yang menggugah semangat nasionalisme • Menghormati symbol-simbol kenegaraan • Mengikuti peringatan hari-hari besar nasional • Menampilkan sikap cinta tanah air dan bangga menjadi bangsa Indonesia • Menghormati perbedaan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan antargolongan. • Menghargai perbedaan status social, ekonomi dan budaya. • Memelihara persatuan dan kesatuan di sekolah • Menjaga nama baik diri, keluarga, sekolah, masyarakat tempat tinggal, bangsa dan negara • Mengutamakan kepentingan sekolah daripada kepentingan pribadi atau golongan. • Mengharumkan nama sekolah melalui kegiatan perlombaan antar sekolah 	
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan	Kerakyatan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengutamakan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan di kelas dan di sekolah • Pemilihan ketua kelas dan Ketua OSIS secara demokratis • Menghargai perbedaan pendapat dalam diskusi kelas dan berorganisasi • Memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama sebagai siswa/guru. • Bergotong royong dalam melakukan pekerjaan dalam kelompok • Menjadi pemimpin dan yang dipimpin dengan baik. 	
5. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia	keadilan	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir di sekolah tepat waktu. • Memakai pakaian dan perlengkapan sekolah sesuai dengan ketentuan. • Tidak membawa barang-barang yang dilarang (komik, majalah, dll). • Menjaga barang-barang milik pribadi dan milik orang lain. • Hemat dalam penggunaan barang-barang milik pribadi, tidak berlebihan. • Jujur: anti menyontek tugas, ulangan, dan ujian. • Tidak memamerkan kekayaan orang tua/ barang pribadi • Melaksanakan tugas yang diberikan guru atau pemimpin sekolah dengan baik • Anti Bullying/Perundungan. • Berani mengungkapkan kebenaran. • Selalu berusaha menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan keterampilan dengan rajin mengikuti kegiatan sekolah dan kegiatan di luar (kursus, pelatihan, dll). • Rajin mengikuti dan menjuarai perlombaan atau kompetisi yang dilaksanakan sekolah maupun di luar sekolah. • Menghargai prestasi diri dan orang lain 	

Nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaannya tidak hanya menjadi tuntutan bagi peserta didik untuk mematuhi, tetapi semua sivitas sekolah harus menjadi teladan dengan memberi contoh perilaku baik. Sehingga penerapan nilai-nilai kehidupan dibelajarkan melalui contoh konkrit dalam konteks pembiasaan perilaku keseharian peserta didik di kelas, luar kelas, dan lingkungan sekolah.

Peserta didik dan sivitas sekolah yang berperilaku sesuai dengan aturan dan menjadi contoh teladan bagi yang lainnya harus diberi penghargaan (*reward*), sehingga perilaku positif akan dipertahankan dan memberi motivasi pada yang lain untuk mengikuti perilaku tersebut. Penghargaan dalam konteks ini tidak dimaknai selalu dalam bentuk materi tetapi bisa dalam bentuk verbal (lisan) dan non verbal (bahasa tubuh, dll). Sementara itu peserta didik yang menyimpang terhadap tata tertib sekolah yang sudah dibuat dan menjadi komitmennya untuk dipatuhi, maka akan dikenakan sanksi tetapi harus dikoreksi secara proaktif oleh sekolah dan mengikuti prosedur yang sudah disepakati bersama.

Pengamalan nilai-nilai Pancasila melalui habitiasi di sekolah menggunakan empat prinsip yaitu keteladanan, teguran, penghargaan, dan penegakan aturan sebagaimana digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Prinsip Pelaksanaan Habitiasi

(Komalasari dan Saripudin, 2017; Saripudin dan Komalasari, 2015)

Keteladanan artinya melalui pemberian contoh perilaku yang baik dari seluruh anggota komunitas sekolah (kepala sekolah, guru, staf administrasi, penjaga sekolah, petugas kantin, dan tentunya siswa sendiri). Keteladanan memberikan pembelajaran langsung tentang bagaimana cara berperilaku yang baik tanpa harus menggurui. Siswa melihat langsung perilaku yang harus ditiru, sehingga lebih mudah dipraktikkan, dan siswa merefleksikan perilaku tersebut baik atau buruk dengan melihat dampak perilaku tersebut bagi diri sendiri dan orang lain secara langsung. Keteladanan memberikan fungsi kontrol perilaku, karena setiap orang berkeyakinan bahwa perilakunya selalu diamati dan ditiru

orang lain. Oleh karena itu harus memberikan contoh dan peniruan perilaku yang baik.

Teguran artinya memberikan kritik langsung secara lisan, tulisan, dan perbuatan terhadap perilaku orang lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kehidupan. Tentunya teguran dilakukan secara sopan dan santun, sehingga pihak yang menerima teguran menerima kritik dengan terbuka dan berupaya memperbaiki perilakunya. Penghargaan artinya memberikan pengakuan terhadap perilaku baik yang sudah ditampilkan seseorang. Penghargaan dapat dilakukan secara verbal dan non verbal. Melalui penghargaan seseorang akan mempertahankan perilaku baiknya dan memberikan motivasi pada yang lain untuk senantiasa melakukan kebaikan, karena kebaikan memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Penegakan aturan (sanksi yang tepat) artinya aturan atau tata tertib sekolah yang sudah dibuat hendaknya dilaksanakan dan ditegakkan, sehingga seluruh anggota sekolah meyakini bahwa aturan yang dibuat harus dilaksanakan karena jika tidak maka sanksi akan dikenakan. Sanksi yang diberikan hendaknya disepakati dalam aturan/ tata tertib dan sanksi hendaknya tepat dilakukan, artinya membuat efek jera bagi yang melanggar aturan untuk tidak mengulangi perbuatan melanggar aturan.

Penutup

Nilai-nilai Pancasila hendaknya menjadi bagian dari keseharian peserta didik sebagai warga negara Indonesia kategori "Generasi Z" yang hidup di era digital dengan segala peluang, tantangan, dan permasalahan. Perlu aktualisasi nilai-nilai Pancasila melalui Pendidikan Pancasila di sekolah dengan pendekatan habituasi, karena nilai-nilai Pancasila bukan sekedar dipahami, tetapi harus diinternalisasi menjadi bagian dari dirinya, dan tentunya dibiasakan penerapannya pada kehidupan sehari-hari dalam konteks kekinian di era digital. Dalam pelaksanaan habituasi nilai-nilai Pancasila, maka perlu ditegakkan prinsip keteladanan, penghargaan, teguran, dan sanksi yang tepat. Untuk itu, diperlukan dukungan semua pihak yang terlibat di sekolah dalam pelaksanaan habituasi nilai-nilai Pancasila, termasuk pihak orang tua peserta didik, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Berkowitz, L. (2003). *Emotional Behaviour; Mengenal Perilaku dan Tindakan Kekerasan di Lingkungan Sekitar Kita dan Cara Penanggulangannya*. Jakarta; PPM, anggota IKAPI.

Bohlin, K.E., Farmer, D., & Ryan, K. (2001). *Building Character in School Resource Guide*. San Francisco: Jossey Bass.

Budimansyah, D. (2010). *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press.

Departemen Departemen Pendidikan Nasional. (2007). *Panduan Pengembangan Diri*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Kearney, A.T. (2016). *The 2016 Global Retail Development Index*. Tersedia di <https://www.atkearney.com/documents/10192/8226719/Global+Retail+Expansion+at+a+Crossroads%E2%80%93932016+GRDI.pdf/dc845ffc-fe28-4623-bbd4-b36f3a443787>, diakses pada 30 Desember 2016.

Kementerian Pendidikan Nasional. (2010a). *Desain Induk Pendidikan Karakter*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional

Kementerian Pendidikan Nasional. (2010b). *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa, Pedoman Sekolah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional

Komalasari, K. & Saripudin, D. (2017). *Pendidikan Karakter: Konsep dan Aplikasi Living Values Education*, Bandung: Refika Aditama.

Lanqing, L. (2003). *Education for 1.3 Billion*. Pearson Education, Foreign Language Teaching and Research.

Lickona, T. (1992). *Educating For Character How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*, New York-Toronto-London-Sydney-Auckland: Bantam Books.

Megawangi, R. (2004). *Pendidikan Karakter (Solusi Yang Tepat Untuk Membangun Karakter Bangsa)*. Jakarta: Indonesia Heritage Foundation.

Naping, H. (2007) *Kelembagaan Tradisional dan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Lingkungan pada Masyarakat Toraja*. Makassar: PPLH Regional Sulawesi Selatan, Maluku dan Papua KLH bekerjasama dengan Masagena Press.

Renzulli. (2017). <https://goo.gl/cTymz4>, diunduh 10 Desember 2018.

Santosa, E. T. (2015). *Raising Children In Digital Era*. Jakarta: PT Gramedia

Saripudin, D. & Komalasari, K. (2015). Living Values Education in School's Habituation Program and Its Effect on Student's Character Development. *The New Educational Review*, 39 (1) : 51-62.

PEMBERDAYAAN GENERASI MILENIAL DALAM RANGKA AKTUALISASI PANCASILA

Syaifulloh

Abstrak

Generasi milenial sebagai bagian dari Generasi muda memiliki peran sangat penting dalam perjalanan bangsa saat ini, dan tentu saja bagi masa depan bangsa. Hal ini hanya akan dapat dimanifestasikan dengan baik manakala generasi milenial memiliki kompetensi yang memadai, baik menyangkut pengetahuan (knowledge), sikap (disposition), dan keterampilan (skill). Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, sudah barang tentu harus diaktualisasikan nilai-nilai fundamentalnya dalam konteks kehidupan sehari-hari, tidak terkecuali oleh generasi milenial.

Disadari bahwa aktualisasi Pancasila bagi generasi milenial tidaklah mudah, karena dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan, baik secara internal maupun eksternal terutama hegemoni globalisasi dewasa ini. Kendatipun demikian, dengan sejumlah potensi yang dimiliki generasi milenial, sangat memungkinkan untuk dapat menghadapi berbagai tantangan tersebut secara komprehensif. Terlebih manakala dukungan yang kuat diberikan oleh pihak keluarga sebagai institusi pertama dan utama, juga oleh segenap komponen masyarakat, dalam proses pendidikan dan pembinaan generasi milenial, maka tantangan yang dihadapi akan mampu disikapi secara positif sehingga menjadi potensi kekuatan. Dengan begitu, generasi milenial akan mampu mengaktualisasikan Pancasila dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Kata kunci :

Pancasila, Generasi Milenial, pemberdayaan, Pendidikan, Keluarga, Masyarakat.

PENDAHULUAN

Generasi milenial sebagai bagian dari generasi milenial merupakan sosok yang memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa Indonesia ke depan. Tentu bukan karena semata-mata jumlahnya yang banyak (aspek kuantitas), melainkan karena potensi yang dimiliki oleh generasi milenial itu sendiri (aspek kualitas). Aspek kuantitas generasi milenial, tidak

serta merta dapat menjamin peran generasi milenial tersebut menjadi sangat penting dan menjadi faktor penentu (*determinant factor*), tanpa didukung oleh aspek kualitas yang melekat dalam diri generasi milenial tersebut. Pandangan Porter (dalam Harrison dan Huntington, 2011, hlm 45) bahwa keunggulan komparatif (*comparative advantages*) suatu negara tidak akan sangat signifikan dalam mendukung kemajuan negara-bangsa,

tanpa didukung oleh keunggulan kompetitif (*competitive advantages*). Keunggulan komparatif seperti ketersediaan sumber daya alam, jumlah penduduk, jumlah tenaga kerja, jumlah Generasi milenial, dan sebagainya. Sedangkan keunggulan kompetitif lebih menekankan kepada ketersediaan sumber daya manusia (*human resource*) yang terdidik (*well educated*) sehingga memungkinkan ia memiliki kapasitas atau kemampuan dan keterampilan yang memadai dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki.

Bonus demografi yang ditandai dengan aspek kuantitas Generasi milenial pada tahun 2045 atau sering disebut sebagai generasi emas, tentu harus dimakna positif, namun jangan sampai justru lengah terhadap kemungkinan berbagai persoalan besar yang menyertainya yang potensial muncul secara simultan. Tabel 1 di bawah ini menunjukkan besarnya jumlah generasi emas Indonesia di lihat dari kelompok umur, berdasarkan sumber Sensus Penduduk Tahun 2010.

Tabel 1 : Generasi Emas Indonesia 2045

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	11.662.369	11.106.399	22.678.702
5 - 9	11.974.094	11.279.986	23.253.480
10 - 14	11.662.417	11.008.664	22.671.081
15 - 19	10.614.306	10.226.428	20.880.784
20 - 24	9.887.713	10.003.920	19.891.633
25 - 29	10.631.311	10.679.132	21.310.443
30 - 34	9.949.357	9.881.328	19.830.685
35 - 39	9.337.517	9.167.614	18.505.131
40 - 44	8.322.712	8.202.140	16.524.852
45 - 49	7.082.740	7.008.242	14.040.982
50 - 54	5.865.997	5.695.324	11.561.521

Sumber : BPS, Sensus Penduduk 2010

KARAKTERISTIK GENERASI MILENIAL

Berdasarkan hasil *Conference Millennials and Digital Culture* tahun 2017 disepakati bahwa yang dimaksud dengan generasi milenial adalah sekelompok orang yang lahir pada kisaran tahun 1980-2000an. Generasi

ini disebut juga dengan generasi Y.

Dalam berbagai referensi dijumpai banyak pandangan terkait karakteristik generasi milenial. Secara umum dari berbagai pandangan tersebut, tampak benang merah bahwa generasi ini memiliki kedekatan dengan teknologi dan bahkan menjadi pengguna aktif (*active user*) teknologi tersebut. Hal

ini tidak lepas dari latar belakang kompetensi atau kemampuan yang dimiliki generasi milenial yang sedari awal diperkenalkan dengan ragam teknologi.

Masih menurut hasil konferensi milenial dan budaya digital (2017), bahwa setidaknya ada empat karakteristik yang melekat pada generasi milenial, yakni (1) melekat teknologi, (2) haus akan perhatian, (3) *on line activist*, dan (4) banyak *start up* baru. Dalam pandangan penulis, ke empat karakteristik tersebut cukup representatif untuk menggambarkan sosok utuh generasi milenial. Terkait ciri yang pertama yakni melekat teknologi, sangat tepat karena pada saat mereka lahir dan berkembang dalam dunia persekolahan sudah diperkenalkan dengan teknologi terutama Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai bagian tak terpisahkan dari media dan sumber pembelajaran di sekolah. Terlebih pada saat mereka memasuki usia remaja dan dewasa atau kisaran tahun 2010an, perkembangan teknologi terjadi sangat pesat. Kondisi inilah yang menuntut generasi milenial untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi tersebut.

Dalam diri generasi milenial terkandung berbagai potensi yang harus dikembangkan secara optimal. Tentu saja maksud dikembangkannya potensi milenial tersebut agar generasi milenial menjadi Sumber Daya Manusia yang berkualitas, sehingga dapat melaksanakan fungsi perannya sebagai generasi penerus dengan sebaik-baiknya. Frederickson (1972)

menggolongkan potensi generasi muda termasuk generasi milenial yakni (1) potensi yang dapat didemonstrasikan (*demonstrated talents*), dan (2) potensi yang tersembunyi/terselubung (*latents talent*). Potensi-potensi tersebut meliputi : (a) *Personal, Social, and Environmental relationship*; (b) *Creative production (invention)*; (c) *Awareness*; (d) *Artistic performances*; (e) *Cognitive Skills*; (f) *Knowledge*; (g) *Vocational Competence*; (h) *Spiritual and religious experience*; and (i) *Multiculturalism*;

Agar potensi-potensi tersebut dapat dimanifestasikan dengan baik, tentu saja peran pendidikan tak dapat diabaikan. Dengan kata lain, lewat pendidikanlah (baik formal, informal, maupun non formal), potensi-potensi generasi milenial dapat diwujudkan dengan baik oleh kalangan milenial.

Chris Argyris (1961) sebagaimana dikuti Danim (1995), berpandangan bahwa profil pribadi yang matang dicirikan oleh hal-hal yakni (1) aktif; (2) merdeka (bebas dari tekanan di luar pribadi); (3) mempunyai minat khusus yang sangat kuat; (4) mempunyai idealisme; (5) mempunyai kesadaran kuat; dan (6) pengendalian diri yang kuat.

Sementara itu, ciri ketidakmatangan milenial ditandai dengan, (1) pasif; (2) bergantung (kepada alam, orang lain, atau kekuatan lain), (3) tidak ada variasi usaha; (4) minat tidak nampak; (5) perspektif jangka waktu pendek; (6) merasa puas berada di bawah posisi orang lain; (7) kesadaran yang sangat lemah.

Lewat pemberdayaan milenial diharapkan sikap dan perilaku tidak matang tersebut dapat dihindari sedini mungkin. Oleh karena diperlukan pola pemberdayaan yang benar-benar menyentuh kepentingan dan potensi milenial, agar mereka menjadi sosok atau pribadi yang matang. Sebagaimana diungkapkan Alfian (1986 : 115), bahwa untuk melahirkan generasi muda/milenial yang mampu membentuk rasa kepercayaan diri pada diri milenial, perlu dilakukan proses yaitu

1. keberanian untuk memahami diri dan masyarakatnya secara jujur dan kritis;
2. keterbukaan terhadap perubahan dan pembaharuan;
3. rasa solidaritas atau setia kawan yang tinggi di kalangan milenial.

PEMBERDAYAAN GENERASI MILENIAL

Menurut Stewart (1994) pemberdayaan atau *empowerment* diartikan sebagai suatu kualitas daya internal kepribadian individu atau organisasi dalam mewujudkan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Adapun orientasi dari pemberdayaan meliputi keunggulan (*excellence*), kemajuan (*progress*), kelestarian (*existence*). Merujuk pada pengertian itu, maka pemberdayaan milenial dimaknai sebagai kualitas daya internal kepribadian Generasi milenial, dalam mewujudkan dirinya atau mengaktualisasikan dirinya, serta kemampuan menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Berdasarkan

rumusan ini, dapat ditemukan dua indikator penting pemberdayaan milenial, yaitu :

1. Perwujudan diri atau aktualisasi diri atas segala potensi atau kemampuan yang dimilikinya.
2. Kemampuan mengadakan penyesuaian diri dengan lingkungannya, baik lingkungan sosial, maupun lingkungan fisik alamiah.

Dengan dua kemampuan di atas maka perwujudan kualitas daya internal milenial dapat ditingkatkan secara optimal sesuai dengan segala potensi yang dimiliki Generasi milenial.

Dimensi-dimensi pemberdayaan milenial yang mesti dimiliki bahkan harus dilaksanakan meliputi sebagai berikut :

- a. *Envision*, yakni milenial harus memiliki visi kehidupan yang jelas dan terarah. Dengan kata lain milenial harus berwawasan ke depan.
- b. *Educate*, yakni milenial harus senantiasa meningkatkan kualitas dirinya melalui pendidikan, baik pendidikan persekolahan maupun pendidikan luar persekolahan.
- c. *Express*, dimana milenial mesti memiliki keberanian untuk menyatakan atau mengemukakan gagasan secara tepat dan orisinal.
- d. *Enthuse*, dimana milenial harus memiliki kegairahan atau semangat dalam kehidupannya. Lebih-lebih milenial sebagai motor penggerak pembangunan bangsa, maka suatu keniscayaan bagi

- generasi milenial untuk *all out* atau mengerahkan segala kemampuan dan potensi yang dimilikinya dalam untuk berperan serta dalam kegiatan pembangunan masyarakat. Tanpa semangat, gairah, atau dorongan dalam diri yang kuat, maka niscaya milenial dapat memberikan kontribusi bagi perubahan masyarakat. Yang terjadi justru sebaliknya, dimana milenial malah menjadi bagian dari masalah pembangunan dan perubahan masyarakat.
- e. *Eliminate*, yakni kemampuan untuk mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam kehidupan milenial. Secara jujur diakui bahwa hambatan dalam kehidupan milenial sangat kompleks atau bervariasi, namun dengan dimilikinya kemampuan mengatasi hambatan ini, diharapkan milenial dapat mewujudkan apa yang menjadi cita-cita atau harapannya.
 - f. *Equip*, yakni kemampuan untuk melengkapi kekurangan pada diri milenial itu sendiri. Dalam hal ini, perlu ditegaskan bahwasanya segala kekurangan yang dimiliki milenial, bukanlah merupakan suatu dalih atau alasan yang dapat menghambat tercapainya segala keinginan atau cita-cita generasi milenial. Justru sebaliknya, adanya kekurangan pada diri milenial haruslah memberikan dorongan yang kuat untuk secara terus menerus belajar tiada henti, sehingga pada akhirnya kekurangan tersebut dapat diatasi dengan baik.
 - f. *Evaluate*, yakni kemampuan untuk menilai diri. Dalam konteks ini generasi milenial mesti senantiasa mengadakan penilaian diri terhadap berbagai aktivitas yang dilakukannya, potensi atau kemampuan dirinya, kemungkinan-kemungkinan berbagai hambatan yang muncul pada saat melakukan aktivitas tertentu, dan hal lain sebagainya. Yang pasti, kemampuan untuk menilai diri sendiri terhadap generasi milenial sangatlah penting dalam rangka pengembangan segala potensi dasar milenial. *Self Efficacy*, sebagaimana diintrodusir oleh Albert Bandura sesungguhnya berintisarikan kepada kemampuan untuk menilai kemampuan diri. Selanjutnya, kemampuan diri inilah yang diyakini Bandura sebagai jalan terbaik untuk melakukan berbagai aktivitas dengan baik.
 - g. *Expect*, atau memiliki harapan. Dalam kaitan ini perlu ditegaskan bahwa Generasi milenial harus memiliki harapan, cita-cita, atau keinginan dalam kehidupannya. Justru hal inilah yang menjadi ciri Generasi milenial yakni bersifat idealis, artinya selalu memiliki harapan untuk mencapai sesuatu yang diharapkan. Pepatah menyatakan "*a man without ambition is like a bird without wing*", artinya orang yang tidak punya cita-cita, harapan, keinginan, atau ambisi dalam kehidupannya,

maka diibaratkan burung tanpa sayap.

- h. Dengan dimensi-dimensi pemberdayaan sebagaimana diuraikan di atas, diarpakan Generasi milenial dapat memberdayakan dirinya, yakni terwujudnya suatu kualitas daya internal kepribadian Generasi milenial. Pada akhirnya, dengan pemberdayaan inilah, milenial dapat memainkan peranan pentingnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

RASIONALISASI PEMBERDAYAAN GENERASI MILENIAL

Pemberdayaan generasi milenial bermuara pada peningkatan peran generasi milenial dalam berbagai bidang dan aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini pelibatan (*involve*) secara keseluruhan potensi atau kemampuan Generasi milenial merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tak dapat dipungkiri secara faktual, masih banyak potensi Generasi milenial yang belum dapat diaktualisasikan dengan baik yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik eksternal maupun internal, sehingga berujung pada belum optimalnya pemberdayaan Generasi milenial. Beberapa faktor penyebab tersebut dapat diuraikan diantaranya sebagai berikut :

- a. Proses pewarisan nilai-nilai kepada Generasi milenial tidak

berjalan secara terus menerus, atau dengan kata lain telah terjadi *discontinuity* pewarisan nilai-nilai kepada milenial.

- b. Pihak pemerintah atau orang tua kurang memberikan akses kepada Generasi milenial untuk beraktivitas sebagai upaya pengembangan potensi atau kemampuan yang dimilikinya. Pemasungan kreativitas inilah yang menyebabkan Generasi milenial menjadi kurang kreatif dan kurang produktif dalam pola kehidupannya.
- c. Pola komunikasi antara Generasi milenial dan orangtua atau pemerintah yang berjalan kurang harmonis, sehingga menyebabkan Generasi milenial selalu dalam posisi disalahkan atau menjadi objek belaka yang kurang kreatif. Meminjam istilah Weber, bahwa Generasi milenial cenderung memiliki pola komunikasi yang disebutnya *the ethics of absoluteness*, yakni Generasi milenial cenderung berbuat reaktif atas segala jenis pelanggaran yang terjadi, tanpa memikirkan apa dan bagaimana akibat yang timbul dari rekasinya tersebut. Sedangkan orangtua memiliki pola komunikasi yang disebutnya dengan *the ethics of responsibility*, yakni berbuat sesuatu dengan terlebih dahulu mempertimbangkan berbagai kemungkinan akibat-akibat yang timbul kemudian.
- d. Infrastruktur pembinaan dan pengembangan Generasi milenial dirasakan masih kurang baik

kuantitas maupun kualitas. Kalaupun tersedia, maka pelaksanaan program yang dijalankannya kurang optimal, sehingga kurang menyentuh potensi-potensi yang dimiliki Generasi milenial.

- f. Kurang sinergisnya pola pembinaan dan pengembangan Generasi milenial oleh berbagai instansi terkait, sehingga menyebabkan hasil pembinaan yang kurang optimal, tidak terpadu, dan bersifat parsial. Pelaksanaan program terjebak pada rutinitas yang sempit, dan tidak berbasis kepada program-program yang disesuaikan dengan dinamika yang terjadi dalam kehidupan Generasi milenial. Paket-paket pembinaannya kurang membumi bagi Generasi milenial, dan cenderung tidak kontinyu.
- h. Adanya anggapan bahwa pembinaan Generasi milenial merupakan semata-mata tanggungjawab pemerintah semakin memperparah upaya pembinaan Generasi milenial. Padahal sesungguhnya, pembinaan dan pengembangan Generasi milenial merupakan tanggungjawab semua pihak, termasuk unsur masyarakat.
- g. Pembangunan kemilenialan yang sentralistik telah mengakibatkan timbulnya penyeragaman dalam berbagai aspek kemilenialan, sehingga kurang menyentuh potensi-potensi milenial dalam kehidupan di daerahnya.

POLA PEMBERDAYAAN GENERASI MILENIAL

Dalam rangka pemberdayaan generasi milenial secara komprehensif, maka diperlukan suatu pola atau bentuk yang sistematis untuk dapat melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan dari pemberdayaan generasi milenial. Dalam konteks ini, penulis berpandangan bahwa pola pemberdayaan generasi milenial, sekurang-kurangnya harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

1. Sifat pembinaannya adalah holistik, yakni utuh atau komprehensif meliputi berbagai dimensi pembinaan generasi milenial, yang meliputi potensi-potensi yang dimiliki generasi milenial.
2. Fokus sasarannya adalah pemberdayaan pribadi generasi milenial sebagai sumber kekuatan daya manusiawi, yang harus dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
3. Pusat Pembinaan generasi milenial adalah keluarga sebagai institusi pertama dan utama, yakni keluarga yang harmonis di atas landasan nilai-nilai religius.
4. Basis pembinaan generasi milenial harus berakar pada nilai-nilai religius dan harmoni budaya daerah dan nasional.
5. Nuansa pembinaan generasi milenial yakni dengan menerapkan paradigma pendidikan (*Educational Paradigm*) berupa pendekatan-pendekatan psikologis sehingga sesuai dengan

tingkat perkembangan usia generasi milenial.

Manusia adalah makhluk Tuhan yang dikaruniai akal atau pikiran. Dengan akal atau pikirannya itu manusia dapat menciptakan sesuatu yang berguna atau bermanfaat untuk kehidupannya. Dengan akalnya pula manusia dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Bayangkan kalau manusia tidak mempunyai akal atau pikiran. Tentu yang terjadi adalah kehidupan yang serba tidak teratur atau tidak tertib, karena semuanya bertindak dengan kemauannya masing-masing tanpa mempertimbangkan keberadaan orang lain, atau mempertimbangkan apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Oleh karena itu, yang mesti dilakukan manusia adalah menyukuri karunia akal pikiran tersebut dengan cara mempergunakan akal itu untuk kepentingan meraih kehidupan yang baik, damai, dan sejahtera, sebagai perwujudan dari ibadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Menyukuri karunia akal pikiran berarti juga tidak memanfaatkannya hanya untuk kepuasan atau kebanggaan semata-mata, tetapi melalakan keharusan untuk berbuat baik kepada sesama kehidupan manusia dalam masyarakat.

Dengan kekuatan akal pikiran yang dimiliki manusia itu, menjadikan manusia sebagai makhluk yang unggul, sepanjang akal pikiran itu dipergunakan untuk kebaikan kehidupan umat manusia sesuai

dengan tuntunan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebaliknya, jika akal pikiran itu dipergunakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan serta tidak mengikuti kaidah-kaidah Tuhan, maka yang terjadi adalah timbulnya berbagai malapetaka atau kerusakan dalam kehidupan manusia. Karenanya, tidak ada alasan untuk kita, untuk tidak menggunakan akal pikiran tersebut bagi hal-hal kebaikan kehidupan manusia.

Setiap individu mempunyai potensi dasar mental yang dapat dikembangkan, yang menurut Nursid Sumaatmadja (1998) meliputi (1) minat (*sense of interest*); (2). Dorongan ingin tahu (*sense of curiosity*); (3) dorongan ingin membuktikan kenyataan (*sense of reality*); (4). Dorongan ingin menyelidiki (*sense of inquiry*); (5) dorongan ingin menemukan sendiri (*sense of discovery*).

1. Minat (*sense of interest*)

Minat secara singkat diartikan sebagai keinginan atau kehendak terhadap sesuatu. Setiap manusia pasti mempunyai berbagai keinginan untuk diwujudkan dalam kehidupannya. Betapa pentingnya minat atau keinginan ini sebagai salah satu potensi dasar manusia, ada sebuah pepatah Inggris yang berbunyi “*a man without ambition is like a bird without a wing*”, yang artinya orang yang tidak mempunyai keinginan (cita-cita, harapan, kehendak, atau ambisi) diibaratkan sebagai seekor burung tanpa sayap. Makna pepatah tersebut menunjukkan betapa minat atau keinginan tersebut merupakan hal

yang tak terpisahkan dalam individu manusia.

2. Dorongan ingin tahu (*sense of curiosity*)

Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita mendapati sesuatu yang mengundang rasa keingintahuan kita. Apakah sesuatu itu yang telah kita ketahui, dan kita ingin mengetahui lebih banyak lagi tentangnya. Lebih-lebih sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kita ketahui, akan mengundang perhatian kita untuk mengetahui seluk beluk sesuatu atau objek itu. Dengan begitu, kita akan memperoleh kepuasan tersendiri. Jadi, rasa ingin tahu terhadap sesuatu atau objek yang ada dalam kehidupan kita merupakan bagian tak terpisahkan dari keberadaan kita sebagai makhluk yang dikaruniai akal pikiran untuk merenungkan atau memikirkan berbagai “teka-teki” dalam arena kehidupan ini.

3. Dorongan ingin membuktikan kenyataan (*sense of reality*)

Dorongan ini berkaitan dengan dengan sifat rasa ingin tahu (*sense of curiosity*) yang melekat pada diri manusia, karena rasa ingin tahu terhadap sesuatu atau objek, diantaranya didorong oleh keinginannya untuk membuktikan kenyataan yang terjadi. Bukankah dalam kehidupan kita sehari-hari banyak hal-hal yang mengundang pertanyaan yang untuk memperoleh jawaban yang sebenarnya harus melalui pembuktian berupa kenyataan yang sebenarnya.

4. Dorongan ingin menyelidiki (*sense of inquiry*)

Berbagai permasalahan seringkali terjadi dalam kehidupan di sekitar kita. Tidak jarang permasalahan tersebut membutuhkan penyelidikan secara mendalam untuk memperoleh jawaban yang memuaskan. Dorongan untuk menyelidiki pada umumnya timbul manakala kita ingin mengetahui sesuatu objek itu secara lebih utuh, sehingga dapat memuaskan kita.

5. Dorongan ingin menemukan sendiri (*sense of discovery*)

Tak dapat kita pungkiri, bahwa kita berkeinginan untuk menemukan sesuatu sebagai sebuah kebanggaan yang dapat kita raih. Karenanya, manusia berlomba-lomba sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menemukan sesuatu yang bersifat lebih “baru” dan “bermanfaat” bagi kehidupan manusia. Di sinilah sangat diperlukan sifat kreatif pada diri manusia untuk meraih keinginan menemukan sesuatu yang berharga bagi kehidupan.

Dari kelima potensi dasar sebagaimana diuraikan di atas, maka potensi minat (*sense of interest*) merupakan kunci untuk menumbuhkan kembangkan potensi-potensi yang lainnya. Tegasnya, jika minat atau keinginan pada diri manusia tidak ada atau kurang memadai, maka akan mempengaruhi terhadap rendahnya potensi yang lainnya. Sebaliknya, jika minat atau keinginan yang dimiliki dalam keadaan yang sangat baik, maka akan memicu/mendorong aktualisasi atau pelaksanaan potensi dasar mental

yang lainnya. Agar potensi-potensi dasar tersebut dapat berkembang secara wajar maka diperlukan adanya rangsangan, ruang atau tempat, dan suasana yang mendukung.

AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA BAGI GENERASI MILENIAL

Pancasila sebagai dasar negara yang rumusnya terdapat dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat mengikat atau *imperative* bagi seluruh warga negara, lembaga negara, dan lembaga masyarakat, tanpa kecuali. Generasi milenial sebagai bagian dari warga negara Indonesia sudah barang tentu harus terpanggil dengan penuh kesadaran diri (*fully self awareness*) untuk melaksanakan atau mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya kesadaran diri dari generasi milenial, maka sudah barang tentu akan sangat sulit untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Berikut beberapa contoh aktualisasi Pancasila yang dapat dilakukan oleh generasi milenial :

a. Tekun Belajar

Belajar bagi seorang milenial khususnya, dan umumnya bagi semua orang, merupakan suatu kebutuhan yang harus dilakukan kapanpun dan dimanapun juga berada. Tanpa belajar sulit rasanya manusia dapat mengembangkan seluruh potensinya

untuk digunakan dalam menjalani kehidupan ini. Sebaliknya dengan belajar, maka segala potensi yang dimiliki manusia, baik potensi fisik-biologis maupun potensi mental-spiritual akan mampu difungsikan dengan baik. Patut diingat bahwa belajar bukan hanya di bangku sekolah saja, melainkan di lingkungan rumah maupun masyarakat.

Dengan karakteristik generasi milenial yang cenderung memiliki rasa penasaran (*sense of curiosity*) yang tinggi, merupakan modal awal yang sangat baik untuk dapat dimanfaatkan dalam mendorong semangat belajar yang tinggi. Jika potensi ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh generasi milenial, maka generasi milenial akan mampu menunjukkan prestasi yang baik. Tapi jika yang terjadi sebaliknya dimana modal awal berupa rasa penasaran tidak dimanfaatkan dengan baik, maka hampir dapat dipastikan bukannya prestasi yang ditunjukkan, melainkan sikap dan perilaku yang justru bertolak belakang dengan prestasi seperti malas belajar karena bertumpu pada hasil yang serba cepat atau *instant*, memiliki ketergantungan yang tinggi kepada orang lain atau dengan kata lain tidak mandiri, dan tidak kritis terhadap berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat.

b. Memanfaatkan berbagai peluang yang ada

Untuk meraih sukses atau prestasi di kalangan generasi milenial, maka sekecil apapun peluang yang ada harus dimanfaatkan secara optimal.

Dengan begitu, akan terbiasa dalam memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk sesuatu yang jauh lebih bermanfaat. Ada beberapa anggapan yang harus diluruskan dalam hal melihat peluang untuk mencapai prestasi itu, yaitu :

- a. Karena peluang itu kecil, umumnya dipandang sebelah mata atau tidak proporsional ;
- b. Akan muncul peluang sama pada saat-saat berikutnya. Padahal belum tentu anggapan ini benar. Sehingga ada pepatah mengatakan "*ada kalanya kesempatan itu tidak datang dua kali*".

Generasi milenial harus menangkap berbagai peluang (*opportunities*) sebagai sebuah cara atau strategi dalam rangka mengembangkan kapasitas atau kemampuan yang dimilikinya. Sekecil apapun peluang itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, agar memberikan kontribusi positif dalam rangka mencapai kematangan diri (*self maturity*) generasi milenial. Terlebih dengan dimilikinya berbagai sumber informasi yang diperoleh melalui saluran informasi, memungkinkan generasi milenial untuk dapat mencari dan menemukan alternatif solusi dalam rangka memanfaatkan peluang untuk mencapai kemajuan yang lebih baik. Keberhasilan tokoh-tokoh muda dalam mengembangkan usaha rintisan (*start up*) di negara kita patut menjadi inspirasi dan motivasi bagi generasi milenial dalam mengembangkan sikap kewirausahaan di kalangan mereka.

c. Menjalinkan interaksi sosial

Intensitas yang demikian kuat dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui gawai (*gadget*) menjadikan generasi milenial sangat rentan terhadap pola interaksi sosial dalam kehidupan di masyarakatnya. Patut diakui, bahwa kondisi inilah yang merupakan salah satu kelemahan dari generasi milenial yakni kurang terjalannya interaksi sosial.

Padahal sejatinya generasi milenial adalah manusia biasa, yang tidak bisa hidup sendiri, melainkan berdampingan satu sama lainnya dalam wadah masyarakat. Sangat beralasan jika **Magnis Suseno**, mengatakan bahwa kehidupan manusia akan bermakna jika ia ada di tengah-tengah masyarakat. Demikian juga ahli lainnya, **Nursid Sumaatmadja (1998)** berpandangan bahwa wadah pemanusiaan individu adalah masyarakat. Sementara itu, **Krech, Cruchfield, and Ballachey (1972)** menyatakan bahwa sepanjang hayatnya manusia tidak dapat dilepaskan dari masyarakat. Inti dari ketiga pandangan itu adalah bahwa manusia adalah makhluk yang bermasyarakat atau sering diistilahkan dengan *Homo Socius* (makhluk sosial). Oleh karena itu, interaksi merupakan suatu kebutuhan dalam kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat, untuk dapat meraih prestasi yang diinginkan. Kesadaran yang harus dibangun oleh generasi milenial, antara lain bahwa

- Terhadap prestasi yang kita raih, ada andil dari orang lain, yang terkadang tidak disadari oleh kita.
- Adanya peluang atau kesempatan yang diberikan pihak lain, memungkinkan kita meraih prestasi yang baik.

d. Tidak berputus asa

Salah satu kelemahan generasi milenial adalah keinginan mencapai tujuan secara cepat atau *instan*, tanpa diikuti dengan adanya perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan tersebut. Manakala tujuannya tidak dicapai maka akan terjadi sikap putus asa atau putus harapan. Lebih parah lagi atas kegagalan tersebut seringkali menyalahkan pihak lain secara berlebihan, tanpa mau untuk melakukan evaluasi atau introspeksi diri atas kegagalan yang terjadi. Padahal “Kegagalan adalah sukses yang tertunda”, demikian bunyi pepatah. Kenyataannya memang demikian, tidak jarang untuk meraih prestasi yang diinginkan, kita dihadapkan pada berbagai kendala atau hambatan yang tak jarang pula akan berujung pada kegagalan. Hal ini sangat wajar, mengingat pada setiap diri individu mempunyai keterbatasan atau kekurangan dalam hal-hal tertentu. Sikap yang harus dikembangkan oleh generasi milenial dalam menghadapi hambatan dan kendala tersebut diantaranya adalah :

- Kreatif mencari berbagai alternatif pemecahan atas hambatan atau kendala yang ditemui;

- Mempunyai keyakinan yang kuat atas kemampuan diri untuk menghadapi hambatan dan kendala;
- Siap menghadapi resiko atas suatu tindakan yang kita ambil;
- Memandang bahwa hambatan dan kendala merupakan peluang bagi kita untuk mencapai sesuatu yang diinginkan;
- Meminta saran atau pandangan dari pihak yang dapat dipercaya dalam menghadapi hambatan-hambatan.

e. Memiliki Motivasi yang kuat

Dengan segala potensi yang dimiliki generasi milenial, sejatinya dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka memberdayakan dirinya (*self empowering*) dengan baik dan utuh (*comprehensive*). Hal ini hanya mungkin dapat diwujudkan manakala generasi milenial memiliki motivasi yang kuat di dalam dirinya. Tanpa adanya motivasi tersebut, maka akan sangat sulit untuk mencapai perwujudan diri generasi milenial. Pada umumnya motivasi diartikan sebagai suatu kekuatan (*power*) atau tenaga (*forces*) atau daya (*energy*); atau suatu keadaan yang kompleks dan kesiapsediaan dalam diri individu untuk bergerak ke arah tujuan tertentu, baik disadari maupun tidak disadari. Motivasi timbul dan tumbuh dan berkembang dari dalam diri individu itu sendiri (*intrinsic*); dan datang dari lingkungan (*extrinsic*).

Tidak ada alasan bagi generasi milenial untuk tidak mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan sehari-hari. Justru, generasi milenial harus secara terus menerus memompa semangat atau motivasinya dalam memberikan kontribusi bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

PENUTUP

Berdasarkan paparan di atas, bahwa pemberdayaan generasi milenial dalam rangka aktualisasi Pancasila merupakan suatu keharusan yang bersifat mendesak, mengingat tantangan yang dihadapi oleh generasi milenial tidaklah ringan. Karenanya diperlukan pola pemberdayaan generasi milenial secara utuh menyeluruh (*integral comprehensive*) yang dapat dilaksanakan dengan mengedepankan sinergitas diantara berbagai pihak yang berkepentingan dalam mengembangkan generasi milenial tersebut, seperti keluarga, komunitas masyarakat, institusi pendidikan, dan sebagainya.

Aktualisasi Pancasila bagi generasi milenial antara lain dapat dilakukan melalui sikap dan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti belajar dengan tekun, menjalin interaksi sosial yang baik, memanfaatkan berbagai peluang yang ada, tidak cepat berputus asa, dan memiliki motivasi yang kuat dalam rangka mewujudkan keinginan dari generasi milenial.

Daftar Pustaka

Alfian. 1990. *Transformasi Sosial Budaya*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI) Press

Danim, S. 1995. *Transformasi Sumber Daya Manusia*. Bandung : Bumi Aksara

Harrison & Huntingto. 2011. *Culture Matters*. USA.

Krech, Cruchfiled and Ballachey. 1962. *Individual in Society*. Auckland, Sydney : McGraw-Hill Kogakusha, Ltd.

Rothney, and Frederickson. 1977. *Recognizing and Assisting Multi Potential of Youth*. Publishing Co, Columbia

Sumaatmadja, N. 1998. *Manusia dalam Sosial, Budaya, dan lingkungan*, Bandung: Alfabeta

Suseno, F.M. 1998. *Kuasa dan Moral*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Sekretariat Jenderal MPR. 2018. *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*. Jakarta : Setjen MPR RI

AKTUALISASI PANCASILA BAGI GENERASI MILENIAL

Idrus Affandi

Abstrak

Banyak keunggulan yang dimiliki oleh generasi milenial, terutama kemampuannya dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi sebagai piranti yang dapat mempermudah dalam kegiatan sehari-hari. Sebaliknya, secara jujur harus diakui pula bahwa ada kelemahan mendasar yang dimiliki generasi milenial, yakni potensi dalam pemanfaatan teknologi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Padahal Pancasila merupakan dasar negara yang harus menjadi landasan etika dan moral seluruh masyarakat, tidak terkecuali bagi generasi milenial.

Aktualisasi Pancasila oleh generasi milenial sangat penting agar generasi milenial tidak kehilangan jatidirinya sebagai bangsa Indonesia. Generasi milenial dalam mengaktualisasikan Pancasila harus didasari oleh landasan filosofis, yuridis, historis, dan sosiologis.

Sesuai dengan kompetensi atau kemampuan yang melekat pada diri generasi milenial, maka berbagai perwujudan aktualisasi Pancasila harus terus didorong oleh semua komponen masyarakat. Apapun bentuk aktualisasi tersebut, sepanjang positif dan konstruktif harus diapresiasi secara proporsional, agar generasi milenial merasa tertantang untuk terus memberikan kiprahnya untuk mendukung terwujudnya kemajuan bangsa Indonesia.

Kata Kunci : Generasi Milenial, Teknologi, Pancasila, Etika dan Moral, Kompetensi.

PENDAHULUAN

Jumlah penduduk usia muda atau yang termasuk generasi milenial menurut data Bappenas tahun 2018 sebanyak 90 juta orang. Usia mereka pada kisaran 20-34 tahun. Jumlah tersebut tentu bukanlah jumlah yang sedikit, melainkan jumlah yang sangat besar dan menjadi modal bagi pembangunan bangsa Indonesia saat ini, dan tentu untuk masa depan.

Namun, jumlah atau kuantitas saja tidaklah cukup, dan tidak bisa menjadi

kebanggaan, manakala tidak disertai dengan aspek kualitas yang dimiliki generasi milenial tersebut. Pada sisi inilah kita semestinya menyadari benar pentingnya mempersiapkan generasi milenial agar mereka memiliki kompetensi atau kemampuan yang layak, sehingga dapat berkompetisi tidak hanya dalam konteks nasional, melainkan dalam level regional bahkan global.

Sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila harus dimanifestasikan atau

diaktualisasikan nilai-nilainya dalam konteks kehidupan sehari-hari oleh generasi milenial, yang sesuai dengan semangat jaman generasi milenial. Sudah barang tentu aktualisasinya disesuaikan dengan karakteristik yang melekat dalam diri generasi milenial, antara lain melek teknologi dan memanfaatkannya dalam berbagai ranah kehidupan mereka. Mereka bekerja menggunakan teknologi dengan berbagai aplikasi yang dapat membantu kepraktisan cara kerja generasi milenial.

Espinoza & Mick (2016) sebagaimana dikutip Suryadi (2018. hlm.466) membagi generasi ke dalam lima kelompok, yakni pertama disebut *The Builders*, yang lahir antara tahun 1925 sampai berakhirnya perang dunia kedua. Selanjutnya kelompok kedua disebut *The Baby Boomers*, yang lahir antara 1946-1964. Generasi ini dinilai "gila kerja" karena mereka memiliki identitas dalam bekerja, dengan memanfaatkan teknologi.

Generasi ke tiga disebut *Generation X*, yang lahir antara tahun 1965-1979. Kelompok generasi ini menjunjung tinggi kemandirian dan keseimbangan dalam kehidupan. Bagi kelompok ini, teknologi merupakan perangkat yang dapat membantu mereka mewujudkan keseimbangan kerja.

Selanjutnya kelompok ke empat disebut *The Millennials atau Generation Y*, yang lahir antara 1980 sampai 2000. Mereka sangat dekat dengan teknologi seperti telepon seluler, jejaring sosial, dan media lainnya yang berbasis teknologi. Generasi

ini melek teknologi, terbukti dengan memanfaatkan teknologi sebagai piranti atau alat untuk dapat mempermudah pekerjaan dan hasil yang lebih optimal.

Kelompok kelima disebut dengan *The Next Generation* atau *Generation Z*, yang lahir 2001. Dari segi jumlah generasi ini lebih sedikit dibandingkan dengan generasi Y.

Dari kategorisasi tersebut menunjukkan bahwa generasi milenial memiliki keunggulan dalam memanfaatkan teknologi untuk berbagai kepentingan, tidak hanya untuk berkomunikasi melainkan untuk kegiatan lainnya. Bagi generasi milenial, teknologi merupakan bagian tak terpisahkan dari berbagai aktifitas kehidupan mereka.

URGENSI PENGAMALAN PANCASILA BAGI GENERASI MILENIAL

Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa bangsa Indonesia memiliki para pendiri bangsa (*the founding fathers*) yang sangat luar biasa dalam memberikan keteladanan dan sikap religiusitas yang tinggi kepada generasi penerus bangsa Indonesia. Hal ini tercermin dalam bunyi alinea ke-3 Pembukaan UUD 1945 yakni " Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, maka bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya".

Keteladanan dari para pendiri bangsa tersebut tentu tidak akan

banyak memiliki makna, manakala generasi milenial sebagai bagian dari generasi muda tidak mampu mencerna, memahami, dan melaksanakan nilai-nilai keteladanan tersebut dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Nilai-nilai keteladanan para pendiri bangsa antara lain semangat nasionalisme yang tinggi, kebersamaan dan kekeluargaan, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompoknya, dan siap berkorban demi bangsa dan negara. Nilai-nilai keteladanan inilah yang patut dicontoh oleh generasi milenial dewasa ini, terlebih dalam menghadapi perkembangan masyarakat yang sangat cepat sekarang ini.

Meneladani para pendiri bangsa merupakan contoh aktualisasi Pancasila bagi generasi milenial. Hal ini tidak lepas dari kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sebagai dasar negara artinya sebagai dasar bagi penyelenggaraan negara, baik pemerintah maupun masyarakat harus berpedoman atau merujuk kepada nilai-nilai Pancasila. Sebagaimana ditegaskan dalam dokumen sosialisasi empat pilar MPR (2018) sebagai berikut:

“Memaknai kembali Pancasila berarti kita ingin menegaskan komitmen, bahwa nilai-nilai Pancasila adalah dasar dan ideologi dalam kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila bukanlah konsep pemikiran semata, melainkan sebuah perangkat tata nilai untuk

diwujudkan sebagai panduan dalam berbagai segi kehidupan. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan etika dan moral ketika kita membangun pranata politik, pemerintahan, ekonomi, pembentukan dan penegakan hukum, politik, sosial budaya, dan berbagai aspek kehidupan lainnya”.

Penulis berpandangan bahwa hal substansial dari pernyataan tersebut adalah bahwa Pancasila harus menjadi landasan etika dan moral bagi semua pihak, baik pemerintah dalam hal ini adalah aparatur negara, maupun seluruh komponen masyarakat, termasuk bagi generasi milenial. Dalam konteks ini, pertanyaan reflektif yang mengemuka adalah apakah kita khususnya generasi milenial sudah menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan etika dan moral yang dimanifestasikan dalam sikap dan perilaku keseharian? Pertanyaan ini penting untuk dijawab sebagai refleksi khususnya bagi generasi milenial dalam rangka mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila.

Manakala nilai-nilai Pancasila tidak dijadikan sebagai landasan etika dan moral sebagai bentuk aktualisasi Pancasila bagi generasi milenial, maka hal ini akan berimplikasi negatif, sekurang-kurangnya berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Banyak terjadi penyimpangan perilaku generasi milenial, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya, seperti kehidupan seks bebas, materialistis, hedonistis, individualitis, tidak mandiri atau

ketergantungan yang berlebihan kepada pihak lain, lebih gendrung kepada budaya barat daripada budaya daerah dan nasional, dan bentuk-bentuk perilaku negatif lainnya.

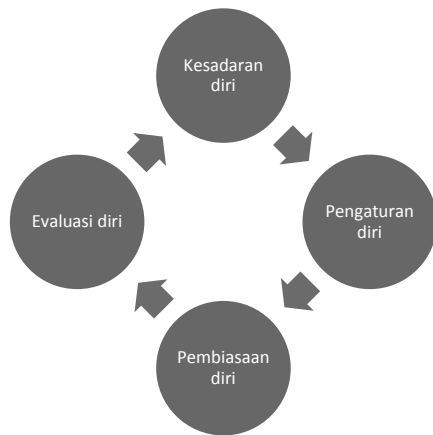
b. Proses pewarisan nilai-nilai Pancasila kepada generasi milenial tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi karena orientasi nilai generasi milenial lebih condong kepada nilai-nilai yang justru kontra produktif dengan nilai-nilai Pancasila. Mengapa ini terjadi? Penyebabnya adalah karena orientasi nilai yang dimiliki generasi milenial sebagian besar dibentuk oleh pengaruh yang demikian besar dari nilai-nilai yang melekat (*inheren*) pada teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi bagian tak terpisahkan dari karakteristik generasi milenial. Dapat kita bayangkan jika nilai individualistis yang melekat, maka berimplikasi terhadap munculnya sikap individualistis generasi milenial dalam kehidupan sehari-hari. Keadaan demikian akan menimbulkan situasi interaksi sosial di masyarakat yang tidak kondusif.

c. Peluang terjadinya konflik dalam masyarakat terutama yang melibatkan generasi milenial cukup terbuka. Ini tidak lepas dari implikasi atas orientasi nilai yang dibawa generasi milenial yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks keilmuan, inilah yang disebut

dengan konflik nilai-nilai atau ideologis (Nasikun, 1998).

d. Kreatifitas generasi milenial cenderung akan mengarah kepada bentuk-bentuk kreatifitas yang “tidak membumi” atau “tidak mengakar” karena preferensi yang digunakan adalah budaya barat yang nilai-nilainya justru tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Sikap yang bijak (*wise*) dalam mengantisipasi timbulnya hal-hal di atas bagi generasi milenial adalah melakukan refleksi diri. Bagaimana caranya? Untuk menjawab ini penulis mengemukakan tentang pilar-pilar manajemen kualitas diri (Murdoko, 2006) sebagai berikut:



Pilar pertama yakni kesadaran diri berintikan introspeksi yang kita lakukan, bahwa yang dilakukan harus dimulai dari sendiri, atas kehendak sendiri, dan berdasarkan pengendalian diri kita sendiri.

Pilar kedua yakni pengaturan diri dimana hal ini akan membawa konsekuensi bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan senantiasa merupakan kemampuan kita dalam melakukan pengaturan diri sendiri. Kita adalah subyek bagi diri sendiri, jadi tanggungjawab kita adalah kemampuan untuk mengatur diri sendiri (Murdoko. 2006.hlm.23).

Pilar ketiga adalah pembiasaan diri yang akan membawa kita untuk mengubah paradigma. Mengapa demikian? Karena dalam pilar ini bermuara para kesediaan kita untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap diri kita sehingga dapat menyesuaikan diri dengan berbagai perkembangan yang terjadi di sekitar kita.

Terakhir pilar keempat yakni evaluasi diri merupakan aktifitas nyata yang dilakukan untuk melihat sejauhmana efektifitas sikap dan tindakan kita, apakah menghasilkan sesuatu yang optimal bagi diri sendiri, orang lain, ataupun lingkungan tempat kita berada.

Dalam pandangan penulis, ke empat pilar tersebut sangat penting untuk diterapkan oleh generasi milenial dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan sehari-hari. Namun jauh lebih baik lagi manakala generasi milenial memiliki dan mengaktualisasikan kesadaran yang didasarkan nilai-nilai religius. Tentu saja agar berhasil dalam menerapkannya, generasi milenial dituntut untuk melakukan proses belajar (*learning process*) baik di lingkungan keluarganya,

masyarakatnya, komunitasnya, dan bangsa serta negaranya. Tanpa proses belajar tersebut, maka akan sangat sulit untuk melaksanakan pilar-pilar tersebut. Apa akibatnya? Tidak lain dan tidak bukan, generasi milenial akan semakin jauh dari nilai-nilai Pancasila. Ibarat pepatah mengatakan "Jauh Panggang Dari Api". Maknanya, sikap dan perilaku generasi milenial jauh dari nilai-nilai Pancasila sebagaimana diharapkan. Tentu hal ini harus dihindari sedini mungkin oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pembinaan generasi milenial, khususnya oleh generasi milenial sendiri. Dalam pelaksanaannya harus dibingkai oleh nilai-nilai Pancasila, sehingga dapat mewujudkan generasi milenial yang bersikap negarawan, dimana terpancarkan dalam sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari yang didasari logika yang sehat dan nilai religius yang tinggi.

RAGAM AKTUALISASI PANCASILA BAGI GENERASI MILENIAL

Pancasila memiliki lima nilai dasar, yakni Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah, dan Keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut harus diaktualisasikan atau diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, oleh semua komponen masyarakat, tidak terkecuali oleh generasi milenial. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam sikap dan perilaku setiap warga masyarakat itu disebut dengan nilai praksis.

Aktualisasi Pancasila oleh

generasi milenial dalam pandangan penulis dapat dianalisis dari perpektif pengamalan nilai-nilai dasar Pancasila sebagaimana disebutkan di atas. Sudah barang tentu aktualisasinya meliputi beragam bentuk, aspek, dan spektrum dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Berikut disajikan beberapa contoh aktualisasi nilai-nilai Pancasila oleh generasi milenial:

- a. Pengamalan nilai dasar Ketuhanan, antara lain dilakukan dengan berbagai aktifitas atau kegiatan generasi milenial yang berorientasi kepada nilai religius, seperti giat melaksanakan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tentu saja ibadah di sini dalam arti luas, yakni meliputi ibadah vertikal yakni berhubungan secara langsung dengan Tuhan YME, dan ibadah secara horisontal yakni menjalin hubungan baik dengan sesama umat manusia. Kita patut bersyukur, akhir-akhir ini tidak sedikit generasi milenial dengan semangat melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan di lingkungan masyarakat. Ini tentu sangat positif dalam rangka menumbuhkembangkan religiusity spirit di kalangan generasi milenial. Hal ini sangat penting untuk membentengi gearasi milenial dari hegemoni globalisasi terutama dampak-dampak negatif yang ditimbulkannya.
- b. Pengamalan nilai dasar Kemanusiaan, antara lain

dilakukan dengan aktifitas yang berorientasi peduli (*caring*) terhadap sesama manusia, yang diwujudkan dalam bentuk membantu atau menolong sesama manusia sesuai dengan kemampuan yang dimiliki generasi milenial. Menginisiasi kegiatan-kegiatan kemanusiaan seperti pengumpulan bantuan atau donasi untuk korban bencana alam yang akhir-akhir ini sering terjadi, harus terus didorong oleh generasi milenial dan patut didukung oleh orangtua dan masyarakat.

- c. Pengamalan nilai dasar Persatuan, antara lain diwujudkan melalui sikap dan perilaku generasi milenial yang berorientasi untuk kepentingan bersama, kepentingan bangsa dan negara, dan bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Untuk itu penting sekali menggelorakan kembali semangat kekeluargaan dan kebersamaan di kalangan milenial, sebagai upaya untuk meng-counter nilai-nilai individualistik dan materialistik yang cukup kuat dalam suasana kehidupan global saat ini.
- d. Pengamalan nilai Kerakyatan atau musyawarah oleh generasi milenial dapat dilakukan melalui sikap dan perilaku dalam pengambilan keputusan bersama melalui musyawah mufakat sebagai manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat. Praktek kegiatan Parlemen Remaja yang sudah dilakukan oleh MPR/DPR selama ini merupakan kegiatan yang sangat positif dan

kontributif dalam membangun nilai kebersamaan, kepedulian, musyawarah dalam proses pengambilan keputusan bersama.

- e. Pengalamalan nilai dasar Keadilan oleh generasi milenial antara lain dapat dilakukan melalui kegiatan yang berorientasi pada terpenuhinya rasa keadilan seluruh lapisan masyarakat. Tentu saja keadilan di sini dalam arti yang luas, meliputi keadilan ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Keterlibatan generasi milenial dalam organisasi baik di sekolah atau kampus maupun di luar sekolah/kampus harus terus didorong sebagai bekal untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Itulah berbagai bentuk aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang dapat dilakukan oleh generasi milenial. Di samping yang diuraikan tersebut, sudah barang tentu masih banyak contoh-contoh lainnya yang dapat dilakukan oleh generasi milenial. Semakin banyak hal positif yang dilakukan generasi milenial, tentu semakin positif dalam mengembangkan sosok generasi milenial yang diharapkan untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

PENUTUP

Salah satu keunggulan dari generasi milenial adalah kedekatannya dengan teknologi dan tentu saja pemanfaatannya dalam aktifitas kehidupan sehari-hari. Pada sisi lain, secara psikologis kelompok generasi milenial memiliki potensi yakni daya inovasi dan kreatifitas yang tinggi.

Memadukan antara keunggulan dan potensi yang dimiliki generasi milenial tersebut, tentu merupakan hal yang sangat tepat terutama dalam mendorong partisipasi generasi milenial dalam berkiprah untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia melalui aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Pemikiran dan ide-ide segar dan kreatifitas generasi milenial harus diwadahi dalam bentuk aktifitas atau kegiatan-kegiatan yang konstruktif melalui berbagai pranata di masyarakat. Hal ini dilakukan agar generasi milenial mampu menunjukkan jatidirinya sebagai bagian penting dari generasi penerus bangsa dalam mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia. Semoga hal mulia ini dapat diwujudkan.

REFERENSI

Badan Sosialisasi MPR .2018. Materu Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR RI

Murdoko, W.H. 2006. Personal Quality Management. Mengefektifkan Pengelolaan Diri dengan Mengaktifkan Empat Pilar Kualitas Pribadi. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.

Nasikun. 1998. Sistem Sosial Indonesia. Jakarta : Radjawali Press

Suryadi, K. 2018. The Millenials dan Kita. Dalam kumpulan tulisan Kontribusi Ilmu-ilmu Sosial terhadap pengembangan Administrasi Pendidikan dalam Teori dan Praktek. Bandung : Departemen Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI.

MEMBANGUN KESADARAN WARGANEGARA MILENIAL DALAM MENGAKTUALISASIKAN NILAI-NILAI PANCASILA

Dadang Sundawa

Abstrak

Permasalahan yang muncul kepermukaan dalam upaya mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila bagi warganegara muda di antaranya adanya berbagai krisis, seperti semakin marak perkembangan media sosial; krisis ketauladanan; krisis identitas; krisis kesadaran ideology; krisis ketauladanan dan krisis hukum. Permasalahan tersebut harus bisa diatasi dengan berbagai kegiatan sosialisasi untuk menanamkan atau mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial.

Generasi milenial adalah generasi yang gemar menggunakan berbagai teknologi dan media sosial. Oleh karena itu kegiatan sosialisasi yang dirasakan efektif adalah sosialisasi melalui media sosial. Oleh karena itulah, ada kebijakannya bila pemerintah mengisi konten-konten media sosial dengan hal-hal yang berkaitan dengan aktualisasi nilai-nilai Pancasila pada warganegara milenial, dengan harapan mereka kelak akan menjadi generasi emas yang dapat menjadi warganegara milenial yang berakhlak mulia, bermoral, bertetika, berbudaya dan beradab berdasarkan Pancasila.

Kata kunci : membangun kesadaran; warganegara milenial; Pancasila sebagai ideology Negara, dasar Negara dan pandangan hidup bangsa.

A. PENDAHULUAN

Istilah milenial sebenarnya telah lama muncul di kalangan bangsa Indonesia, istilah ini semai menggema seiring dengan hingar bingarnya pelaksanaan pesta demokrasi dalam ventuk kampanye calon presiden dan wakil presiden menjelang pelaksanaan pemilu tanggal 17 April 2019. Masing-masing calon Presiden dan Wakil Presiden berupaya sekeras mungkin untuk meraih simpati dan suara generasi milineal yang juga banyak dari kalangan pemilih pemula. Namun demikian sesungguhnya istilah milenial bukanlah istilah baru karena telah lama muncul dan menggema di kalangan bangsa Indonesia.

Pertanyaannya siapa sesungguhnya yang disebut generasi milineal tersebut? Menurut republika sebagaimana tertulis dalam <http://www.republika.co.id/berita/koran/inovasi/16/12/26/ois64613-mengenal-generasi-millennial> menyatakan, bahwa milenial (juga dikenal sebagai Generasi Y, Gen Y atau Generasi Langgas]) adalah kelompok demografi setelah Generasi X (Gen-X). Tidak ada batas waktu yang pasti untuk awal dan akhir dari kelompok ini. Para ahli dan peneliti bisaanya menggunakan awal 1980-an sebagai awal kelahiran kelompok ini dan pertengahan tahun 1990-an hingga awal 2000-an sebagai akhir kelahiran. Milenial pada umumnya

adalah anak-anak dari generasi Baby Boomers dan Gen-X yang tua. Milenial kadang-kadang disebut sebagai "Echo Boomers" karena adanya 'booming' (peningkatan besar), tingkat kelahiran pada tahun 1980-an dan 1990-an. Untungnya di abad ke 20 tren menuju keluarga yang lebih kecil di negara-negara maju terus berkembang, sehingga dampak relatif dari "baby boom echo" umumnya tidak sebesar dari masa ledakan populasi pasca Perang Dunia II.

Berdasarkan pendapat tersebut, kita bisa menarik kesimpulan, bahwa salah satu batasan tentang generasi milenial adalah kelahiran atau usia dari suatu generasi. Generasi milenial adalah generasi yang lahir pada tahun pertengahan tahun 1900 hingga awal tahun 2000, artinya usia mereka berada di kisaran 19 sampai 29 tahun. Ini artinya mereka berada dalam kelompok generasi muda.

Pertanyaan selanjutnya apakah perlu generasi milineal tersebut dibangun kesadarannya untuk dapat mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila? Sebagai generasi muda yang merupakan bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia yang mendasarkan dirinya pada Pancasila, maka membangun kesadaran warganegara milenial dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila menjadi keharusan yang bersifat mutlak. Mengapa? karena membangun kesadaran generasi milenial merupakan program yang sangat strategis dalam upaya menciptakan generasi emas tahun 2045.

Permasalahannya untuk membangun kesadaran warganegara milenial dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi ini menghadapi berbagai tantangan, seperti adanya krisis multi dimensional yang berkepanjangan, adanya krisi ketauladanan, adanya krisis kepercayaan dan krisis-krisis yang lain, sehingga menjadi tantangan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial.

Dr. H. Ruslan Abdulgani dalam makalahnya yang berjudul "Memantapkan Jiwa Nasionalisme Menghadapi Era Globalisasi dan Abad ke-21", mengemukakan :

Menuju nasionalisme Indonesia kekinian dan masa yang akan datang, paling tidak ada serangkaian faktor penggoyang yang mengarah pada proses erosi atau pelongsoran jiwa nasionalisme Pancasila. Faktor yang paling berpengaruh tersebut adalah: Pertama; adalah transisi dan transformasi di tingkat global atau lebih dikenal dengan Trend Globalisasi, Kedua, transisi dan transpormasi di tingkat nasional yang digerakkan sebagai akibat adanya proses industrialisasi.

Selanjutnya Ryaas Rasyid (1997 : 86) mengemukakan :

Agaknya bangsa Indonesia memang dihadapkan pada suatu tantangan yang berat. Adanya keterbukaan dan liberalisasi dari era globalisasi yang cenderung mengabaikan batas-batas tradisional dari nasionalisme, jelas

akan member beban-beban baru kepada para pemimpin bangsa kita untuk mencari pendekatan yang tepat, guna menjaga solidaritas sebagai bangsa ditengah gelombang peradaban dunia yang menerjang ke segala arah. Keterbukaan informasi dan komunikasi yang bisa merangsang lahirnya kesadaran-kesadaran baru tentang nasionalisme yang sempit pada tingkat local, agaknya akan menjadi beban tambahan yang perlu dicermati oleh para pemimpin Indonesia. Tantangan ini hanya bisa dijawab positif jika pada tahun-tahun mendatang bangsa Indonesia menikmati kehidupan demokratis”.

Dalam pandangan Ryaas, bahwa era Globalisasi itu menawarkan tantangan berat bagi bangsa Indonesia dalam berbagai segi kehidupan. Hal ini disebabkan era globalisasi dengan segala aspek keterbukaan dan liberalisasi yang digulirkannya cenderung mengabaikan batas-batas tradisional dari nasionalisme suatu bangsa. Sehingga dengan demikian terjadi proses pengikisan terhadap nasionalisme suatu bangsa.

B. PEMBAHASAN

1. Karakteristik Warganegara Milenial

Pertanyaan selanjutnya, apa karaktersitik warganegara milenial? Sebagaimana dituliskan pada bagian terdahulu, bahwa salah satu ciri

generasi milenial adalah dilihat dari usia warganegara tersebut. Dikarenakan warganegara milenial ini adalah menyangkut manusia, maka sudah dapat dipastikan bahwa karakteristik warganegara milenial sudah dapat dipastikan berbeda-beda, artinya sangat tergantung pada kondisi wilayah dan kondisi sosial ekonomi dari warganegara tersebut. Namun demikian warganegara milenial ini umumnya mempunyai persamaan karakteristik sebagaimana dimuat dalam Ensiklopedia bebas (<https://id.wikipedia.org/wiki/Milenial>) menyatakan, bahwa Karakteristik Milenial berbeda-beda berdasarkan wilayah dan kondisi sosial-ekonomi. Namun, generasi ini umumnya ditandai oleh peningkatan penggunaan dan keakraban dengan komunikasi, media, dan teknologi digital. Di sebagian besar belahan dunia, pengaruh mereka ditandai dengan peningkatan liberalisasi politik dan ekonomi, meskipun pengaruhnya masih diperdebatkan. Masa Resesi Besar (The Great Recession) memiliki dampak yang besar pada generasi ini yang mengakibatkan tingkat pengangguran yang tinggi di kalangan anak muda, dan menimbulkan spekulasi tentang kemungkinan krisis sosial-ekonomi jangka panjang yang merusak generasi ini.

Selanjutnya Sinta Wijayanti dalam <https://www.idntimes.com/life/inspiration/sinta-wijayanti-d/10-ciri-dasar-generasi-millennial-c1c2/full>, menyatakan ada 10 ciri atau karakteristik generasi milenial, yaitu :

- 1) Gampang bosan terhadap barang

yang dibeli; 2) 'No Gadget No Life': 3) Hobi pembayaran non-cash; 4) Suka serba cepat dan instan; 5) Memilih pengalaman daripada asset ; 6) Berbeda perilaku dalam grup satu dan yang lain; 7) Jago multitasking; 8) Kritis terhadap fenomena sosial; 9) Dikit-dikit posting; dan 10) Bagi millennial 'sharing is cool'

2. Membangun Kesadaran warganegara milenial dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila

Membangun dalam tulisan ini dimaknai sebagai upaya yang dilakukan secara terus menerus untuk meningkatkan atau memperbaiki potensi yang sudah ada dan dimiliki oleh warganegara milenial, artinya bukan sesuatu yang tidak ada sama sekali. Sementara itu itu yang dimaksud dengan kesadaran menurut Soerjono Soekanto (1988:152), kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum terhadap kejadian-kejadian yang kongkrit dalam masyarakat.

Jadi dengan meminjam pengertian kesadaran sebagaimana dikemukakan di atas, maka dalam tulisan ini yang dimaksud dengan kesadaran adalah kesadaran warganegara milenial terhadap nilai-nilai Pancasila yang harus diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari sampai mengkristal atau menginternalisasi

dalam diri setiap warganegara milenial.

ada 4 (empat) syarat atau 4 indikator (dengan meminjam istilah Sorjono Soekanto (198:159). Keempat syarat tersebut adalah :

- a. Pengetahuan tentang Pancasila dalam kedudukannya sebagai ideology Negara, sebagai dasar Negara dan sebagai pandangan hidup bangsa
- b. Pemahaman tentang Pancasila dalam kedudukannya sebagai ideology Negara, sebagai dasar Negara dan sebagai pandangan hidup bangsa
- c. Sikap tentang Pancasila dalam kedudukannya sebagai ideology Negara, sebagai dasar Negara dan sebagai pandangan hidup bangsa
- d. Perilaku yang sesuai dengan Pancasila dalam kedudukannya sebagai ideology Negara, sebagai dasar Negara dan sebagai pandangan hidup bangsa

Untuk membangun kesadaran warganegara milenial dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila idealnya proses pendidikan mampu memberikan pencerahan dan *katharsis spiritual* sehingga mampu menumbuhkan sikap responsif terhadap segala persoalan yang tengah dihadapi masyarakat dan bangsanya. Oleh karena itu pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila tidak boleh lagi dilakukan dengan cara-cara indoktrinasi, tetapi harus dilakukan melalui upaya dialogis secara demokrasi, sebagaimana dinyatakan oleh M. Nashir Ali (1979)

lebih demokratis, lebih *'concientious'*, lebih mawas diri.

Jika hal ini bisa diwujudkan, bukan mustahil negeri ini kelak akan dihuni oleh generasi milenial yang ulung yang mampu memainkan peran kehidupannya secara simpatik, jujur, amanah, dan rendah hati. Kalau toh harus terjun ke dunia politik, mereka mampu "bermanuver" secara cerdas, memiliki kepekaan terhadap kepentingan dan hati nurani rakyat, tidak tergoda untuk melakukan tindakan konyol yang dapat merugikan kepentingan bangsa dan Negara, bukankah bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, mewariskan semangat hidup berdemokrasi secara cerdas dengan teorinya "Ing Ngarso Tsung Tulodo" "Ing Madya Mangun Karsa" dan "Tut Wuri Handayani", yang intinya berporos pada proses pemberdayaan warganegara milenial, dalam arti Pemerintah dan seluruh aparturnya harus mampu menjadi tauladan dan mampu membangun prakarsa atau menumbuhkan semangat dan motivasi, sehingga warganegara milenial mampu berpikir secara aktif kreatif dan inovatif. Sementara itu *Tut Wuri Handayani*, mengandung makna, bahwa siapapun yang secara kebetulan ada dalam posisi yang diperintah harus patuh dan turut serta apa yang menjadi kehendak umum atau penguasa.

3. Aktualisasi Pancasila Yang Subjektif dan obyektif

Bagaimana nilai-nilai Pancasila bisa dilakukan kepada warganegara

milenial? Aktualisasi nilai-nilai Pancasila kepada warganegara milineal dapat dilakukan baik secara subyektif maupun obyektif.

Aktualisasi secara subyektif berkaitan dengan bagaimana merealisasikan nilai-nilai Pancasila pada diri setiap individu warganegara melineal, apakah itu yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila yang berkaitan dengan sikap moral maupun tingkah laku semua warga Indonesia yang dijabarkan dalam bentuk norma-norma bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta hubungannya dalam penyelenggaraan negara. Dengan demikian setiap warganegara milineal akan mengetahui, meresapi, menghayati dan akhirnya mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila ideology Negara, dasar Negara dan pandangan hidup bangsa, sebagai suatu keharusan moral.

Kesadaran, ketaatan serta kesiapan individu untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila yang bergeser dari semula sebagai kesadaran wajib hukum telah terpadu menjadi kesadaran wajib moral. Kenyataan ini akan menjadi persyaratan bagi aktualisasi Pancasila yang objektif yang meliputi pelaksanaan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif dan semua bidang kenegaraan dan terutama realisasinya dalam bentuk peraturan perundang-undangan Indonesia.

4. Pancasila adalah dasar dan ideologi Negara yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana eksistensi Pancasila dan aktualisasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di kalangan warganegara milenial?

Setiap bangsa di dunia pasti mempunyai cita-cita dan harapan hidup bagi masyarakatnya. Untuk mewujudkan cita-citanya tersebut akan dilakukan berdasarkan ciri atau karakteristik yang dimiliki Negara tersebut. Khaelani (2013:1) menyatakan Bangsa yang modern dalam mewujudkan cita-cita kehidupannya mempunyai ciri dan karakteristik sendiri melalui proses dan perkembangan sesuai dengan latar belakang sejarah, realitas sosial, budaya, etnis, kehidupan keagamaan dan konstelasi geografisnya.

Burhanudin Salam (1988:45-46) Undang-Undang Dasar yang menjadi sumber ketatanegaraan harus mengandung unsur-unsur pokok yang kuat yang menjadi landasan hidup bagi seluruh bangsa dan Negara. Oleh karena itu Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 berfungsi sebagai dasar Negara yang menjiwai seluruh isi peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar Negara digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber kaidah hukum

konstitusional negara Indonesia. Sebagai dasar negara Pancasila mengikat secara hukum, artinya tidak boleh bertentangan dengan sistem negara hukum dan sistem konstitusi.

Banyak yang berpendapat bahwa jati diri bangsa berkaitan erat dengan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Kaelan (2002: 47) menyebutkan Pancasila sebagai jatidiri bangsa. Hal ini dikarenakan jatidiri bangsa berisikan nilai-nilai dasar yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Corak dan watak masyarakat yang religius, menghormati sesama manusia, adanya persatuan, gotong royong, dan musyawarah untuk memperoleh mufakat serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut kemudian dirumuskan sebagai Pancasila.

Dikatakan pula bahwa Pancasila merupakan pernyataan jatidiri bangsa (Hardono Hadi, 1994:62), merupakan identitas kultural (As'ad Said Ali, 2009:72), Pancasila menjadi identitas atau jatidiri bangsa Indonesia (Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa, 2010: 9) dan bahwa hakekat dari identitas kita hidup berbangsa dan bernegara adalah Pancasila (Koento Wibisono, 2007:132). Sastrapetedja (2006: 488; 2010:155) mengatakan identitas bangsa Indonesia antara lain didasari oleh nilai-nilai Pancasila dan Pancasila merupakan nilai-nilai yang dapat digunakan untuk membangun atau mengkonstruksikan identitas sebagai bangsa. Berdasar hal ini

dapat dikatakan Pancasila memiliki hubungan dengan jatidiri bangsa.

Namun demikian sejak reformasi tahun 1998 sampai sekarang aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara mengalami stagnasi atau bahkan penurunan, hal ini bisa kita lihat hampir tidak ada para penyelenggara seminar/workshop, lokakarya (termasuk Perguruan Tinggi) yang mengusung Pancasila sebagai tema sentralnya. Penyebabnya tentu bermacam-macam, bisa jadi tema tersebut tidak mempunyai nilai jual, atau tidak menarik atau takut disebut titisan orde baru dsb.

Jimly Asshiddiqie dalam Yudi Latif (2012, tanpa halaman) menyatakan "Sejak reformasi, banyak orang terutama generasi muda yang salah sangka mengenai relevansi Pancasila di masa kini apalagi mendatang. Anggapan demikian jelas keliru. Yang banyak dikeluhkan orang dari masa lalu adalah tindakan penyalahgunaan Pancasila itu untuk kepentingan kekuasaan, bukan eksistensi Pancasila itu sendiri sebagai warisan falsafah hidup dan cermin impian bersama seluruh anak bangsa tentang hidup bernegara dan berbangsa yang kita idealkan bersama..."

Untuk itu diperlukan pengetahuan, pemahaman, dan sikap yang mendalam dan komitmen yang kuat serta konsisten dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila baik sebagai dasar Negara maupun sebagai pandangan hidup bangsa perlu ditanamkan

kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, khususnya warganegara milenial sebagai generasi penerus.

C. Kesimpulan

Warganegara milenial adalah bagian dari generasi muda yang akan memimpin Indonesia di masa yang akan datang. Oleh karena itu agar warganegara milenial ini tumbuh dan berkembang menjadi generasi emas di tahun 2045 harus dibangun kesadarannya dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila sampai terjadinya internasionalisasi pada diri setiap warganegara milenial sehingga dia akan menjadi warganegara yang berakhlak mulia, bermoral, bertetika, berbudaya dan beradab berdasarkan Pancasila.

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Warganegara milenial harus dilibatkan, bahkan dijadikan skala prioritas dalam kegiatan sosialisasi 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara
2. Ciri utama warganegara milenial adalah generasi yang senang dengan teknologi, termasuk media sosial. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi mengenai aktualisasi nilai-nilai Pancasila dengan menggunakan berbagai media pendidikan yang disajikan di berbagai media sosial. Dengan demikian warganegara milenial akan dapat dengan cermat (tidak terjebak dengan konten-konten

- berita yang bersifat hoax) dalam menggunakan media sosial
3. Agar sosialisasi aktualisasi nilai-nilai Pancasila dapat tersebar dengan cepat baik secara kuantitas maupun kualitas, perlu dijalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan elemen lainnya untuk

bersama-sama melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan menggunakan model sosialisasi berjenjang.

DAFTAR PUSTAKA

Bahmueller, C.F. (1997). "A Framework for Teaching Democratic Citizenship: An International Project". *The International Journal of Social Education*. 12,(2),104-112.

Banks, J.A. (1990). "Citizenship for a Pluralistic Democratic Society" dalam *Education : An Annotated Bibliography* (Online). Tersedia: <http://www.civnet.org> (17 Agustus 2005).

Kaelan, 2013, *Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Yogyakarta, Paradigma.

Kansil, Cristine Kansil, (2011), *Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta, Rineka Cipta.

Notonagoro. 1980. *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*, Cet. 9. Jakarta: Pantjoran Tujuh

Salam, H. Burhanuddin, 1998. *Filsafat Pancasilaisme*. Jakarta: Rineka Cipta

Soediman Kartohadiprojo 1970, *Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila*, Bandung Alumni

Soerjono Soekanto, (1988), *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, CV. Radjawali.

Yudi Latif, 2012, *Negara Paripurna, Historis, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta, Gramedia.

Website:

<http://www.republika.co.id/berita/koran /inovasi/ 16/12/26/ois64613-mengenal-generasi-millennial>

<https://www.idntimes.com/life/ inspiration /sinta-wijayanti-d/10-ciri-dasar-generasi-millennial-c1c2/full>,

Daftar Penulis:

1. Dr. Rahmat , M.Si, yakni dosen dari Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Tulisan di jurnal ini berjudul Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila melalui Penguatan Pendidikan Karakter Generasi Milenial pada Satuan Pendidikan Formal.
2. Prof. Dr. Suwarma Al Muchtar, S.H., M.Pd yakni Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia suwarma@gmail.com. Tulisan di jurnal ini berjudul Aktualisasi Pancasila Bagi Generasi Milenial Melalui Revitalisasi Pkn Sebagai Pendidikan Karakter Pancasila.
3. Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.IP., M.Si., M.H yakni Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia cecep darmawan@yahoo.com . Tulisan di jurnal ini berjudul Membentuk Generasi Muda Millenials Berkarakter Pancasila di era Revolusi Industri 4.0.
4. Prof. Dr. Dasim Budimansyah, S.Pd., M.Si. yakni Profesor bidang Sosiologi Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia budimansyah@upi.edu. Tulisan di jurnal ini berjudul Transformasi Nilai-nilai Kebangsaan Kepada Generasi Muda Indonesia Pada Era Digital.
5. Prof. Dr. Endang Danial.Ar, M.Pd, M.Si yakni Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia. Tulisan di jurnal ini berjudul Aktualisasi Pancasila bagi General Milenial .
6. Prof. Dr. Karim Suryadi, M.Si. yakni Guru Besar di Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Tulisan di jurnal ini berjudul Aktualisasi Cinta Tanah Air: Apa yang Membuat Kaum Milenial Bangsa Berbangsa Indonesia?
7. Prof. Dr. Kokom Komalasari, M.Pd. yakni adalah Guru Besar Bidang Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada Departemen Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia. Tulisan di jurnal ini berjudul Aktualisasi Pendidikan Pancasila Disekolah Bagi “Generasi Z” Melalui Habitiasi. Penulis dapat dihubungi ke e-mail kokom@upi.edu.
8. Syaifullah, M.Si. yakni Dosen Departemen Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia Tulisan di jurnal ini berjudul Pemberdayaan Generasi Milenial Dalam Rangka Aktualisasi Pancasila. Penulis dapat dihubungi ke e-mail syaifulsyam@yahoo.com.
9. Prof. Dr. Idrus Affandi, S.H yakni Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia. Tulisan di jurnal ini berjudul Aktualisasi Pancasila Bagi Generasi Millenial
10. Dr. Dadang Sundawa, M.Pd. yakni dosen Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Tulisan di jurnal ini berjudul Membangun Kesadaran Warganegara Milenial dalam Mengaktualisasika Nilai-nilai Pancasila.